

OUTBOUND
BPP KEMENDAGRI

INNOVATION
GOVERNMENT AWARD

MEDIA BPP

J E N D E L A I N F O R M A S I K E L I T B A N G A N

MENATA KEMBALI OTONOMI DAERAH

VOLUME 2 NO 1
FEBRUARI 2017



<http://litbang.kemendagri.go.id>
Majalah Dwi Bulanan
p-ISSN 2503 3352
e-ISSN 2528 4181



BEFORE IT'S TOO LATE
Kelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama

SALAM REDAKSI

Sejatinya implementasi kebijakan otonomi daerah menjadi sebuah keniscayaan tersendiri dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan di Indonesia. Sebab kebijakan otonomi daerah yang diberikan kepada daerah memberikan semangat baru bagi kepala daerah dalam mengelola dan mengurus daerahnya masing-masing. Dengan kebijakan tersebut baik provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai peranan yang penting dalam mengembangkan potensi daerah, mengelola pendapatannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan berbagai macam variasi kebijakan terkait dengan desain otonomi daerah di Indonesia. Faktanya, banyak regulasi yang berbenturan dengan ruang gerak daerah mengatur daerahnya masing-masing. Ada yang berteriak peralihan urusan kewenangan tidak dipersiapkan secara matang, dan kurangnya koordinasi dan hubungan di internal pemerintah daerah itu sendiri.

Hal ini tentu menjadi tugas berat pemerintah pusat dalam Menata (kembali) Otonomi Daerah yang masih menyisakan pekerjaan rumah. Lalu munculah wacana terkait revisi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menata kembali persoalan dua tahun diimplementasikannya UU tersebut. Permasalahannya,

apakah dengan merevisi UU tersebut lantas begitu saja selesai segudang permasalahan otonomi daerah? Tentu saja tugas pemerintah pusat tidak hanya sibuk pada rumusan kebijakan tanpa adanya landasan penelitian dengan terjun ke daerah mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh daerah. Pembentukan regulasi tanpa adanya pendampingan, pastinya akan terus menyisakan pekerjaan rumah yang tidak ada habisnya. Di sinilah sinergitas pemerintah pusat dan daerah dipertanyakan.

Untuk itu, dalam Laporan Utama *Media BPP* edisi Februari 2017 ini mengulas apa dan bagaimana permasalahan otonomi daerah yang lagi-lagi masih mengalami kendala. Kami coba mengulas dari beberapa segi krusial yang biasanya terjadi di daerah, seperti permasalahan pelayanan publik dan pelimpahan wewenang.

Dengan menghadirkan tulisan tersebut, harapan kami otonomi daerah dapat memunculkan perbaikan yang tepat dan daya guna bagi kemajuan bangsa dengan tidak melupakan sisi historis dan kebutuhan masyarakat. Semoga ini menjadi momentum pemerintah pusat melecut daerah yang tertinggal dengan memberikan penghargaan pada daerah yang maju, tetapi juga menjadi evaluasi bersama dan komitmen bersama dalam berdaya saing dan memajukan bangsa.

Redaksi

MEDIA BPP

PELINDUNG Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
PENANGGUNG JAWAB Dodi Riyadmadji

PEMIMPIN REDAKSI	Jonggi Tambunan
REDAKTUR PELAKSANA	Moh. Ilham A. Hamudy
REDAKTUR	Syabnikmat Nizam Subiyono Indrajaya Ramzie Jonggi Tambunan Moh. Ilham A. Hamudy
PENYUNTING	Rachman Kosasih Bungaran Damanik Frisca Natalia Elpino Windy
PELIPUTAN	M. Saidi Rifky Indah F. Rosalina
PENATA LETAK DAN GRAFIS	M. Saidi Rifky

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Alamat Redaksi
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
mediabppkemendagri@gmail.com



Kerja Siswa PKL Tak Jelas

Begitu dinyatakan diterima di BPP Kemendagri untuk PKL (Praktik Kerja Lapangan) saya sangat lega karena akhirnya bisa tertampung untuk magang. Namun, ada beberapa hal yang harus dikoreksi kembali oleh pihak BPP apabila mau bekerja sama dengan pihak sekolah. Pertama, sebaiknya BPP bisa membuat aturan yang lebih jelas bidang apa saja yang dibutuhkan. Misalnya saya jurusan akutansi, tapi di sini lebih ke administrasi pemerintahan. Sehingga banyak hal yang tidak saya kuasai. Kedua, ketidakjelasan itu membuat saya jadi bingung mau mengerjakan apa, sebab banyak sekali siswa PKL seperti saya hanya menganggur saja, mungkin karena tidak sesuai dengan bidang yang dipelajari di sekolah. Ketiga, pembagian kuota siswa PKL yang tidak merata. Ada bagian yang memang berlebihan tenaga PKL, tapi ada beberapa bagian yang justru kekurangan. Nah, saran saya sebaiknya BPP lebih baik lagi dan mengoreksi permasalahan yang terjadi. Kami di sini, ingin menerapkan apa yang kami dapat di sekolah dan juga belajar serta memunyai pengalaman baru.

Widya Oktaviani, Siswi SMK Asyafiyah Jakarta

Terimakasih banyak Sdri. Widya atas segenap masukannya untuk BPP Kemendagri yang lebih baik. Semoga permasalahan siswa PKL ini menjadi bahan koreksi untuk Bagian PJKSE BPP Kemendagri dan juga segenap warga BPP. Ke depannya, kami tentu berharap para siswa yang magang di sini dapat betah, mendapat ilmu baru, pengalaman baru, dan terjalin silaturahmi yang tidak putus-putus. Amin.

Redaksi

Fasilitas Ramah Difabel

Sebagai salah satu penyandang Disabilitas, saya sangat berharap Kemendagri di masa mendatang dapat menciptakan fasilitas yang ramah difabel. Seperti akses naik-turun lantai (*lift*), dan kamar mandi yang bersih, kering, higienis dan mudah dijangkau oleh difabel. Sehingga Kemendagri seolah tidak setengah hati dalam program Kementerian yang sangat inklusi.

Frisca Natalia. H, Staf Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi

Terimakasih atas segala masukan dan sarannya Sdri. Frisca,



redaksi rasa fasilitas yang ramah difabel memang harus segera terealisasi di Kemendagri. Semoga masukan dari Sdri dibaca dan didengar oleh Menteri Dalam Negeri.

Redaksi

BPP Kemendagri Punya Jurnal Baru

BPP Kemendagri kini mempunyai jurnal baru bernama Matra Pembaruan, jurnal tentang Inovasi Kebijakan ini akan terbit tiga kali dalam setahun. Para peneliti dapat menyumbangkan artikel ilmiahnya ke matrapembaruan@gmail.com minimal 38 ribu karakter (tanpa spasi) atau 40 ribu karakter (dengan spasi). Untuk lebih lengkapnya, bapak/ibu peneliti, dosen, mahasiswa dan segenap partisipan karya ilmiah dapat mendatangi ULA (Unit Layanan Administrasi) BPP Kemendagri Jl. Kramat Raya 132 atau menghubungi saya di 087887428595 (Niyan Nurin) untuk berkonsultasi. Terimakasih.

Niyan Nurin Ridha Putri, Pengelola Jurnal BPP Kemendagri

Terimakasih atas informasinya Sdri. Niyan. Ini merupakan kesempatan emas untuk para peneliti BPP Kemendagri dan pegiat kelitbangan untuk mengasah dan mengembangkan sayap dalam karya ilmiahnya melalui jurnal baru Matra Pembaruan. Semoga melalui informasi tersebut, banyak peneliti BPP yang berpartisipasi aktif dan berlomba-lomba dalam bidang menulis karya ilmiah.

Redaksi



BPP DAERAH 28

BPP Kota Kupang Upaya Mewujudkan Ikon Kota

Upaya keras harus dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Daerah Kota Kupang. Pasalnya salah satu program pentingnya tahun ini dalam mewujudkan sebuah kawasan *Science Tecno Park* (STP) yang dicanangkan sebagai ikon Kota Kupang harus terkendala biaya

DAERAH 29

- Yogyakarta
- Sumatera Utara

Media BPP Pada edisi kali ini menelusuri jejak-jejak peradaban Nusantara yang menyatu dengan harmonisnya alam Jogja. Pada kesempatan lain, Media BPP juga mengunjungi sebuah perpustakaan yang mendapat prestasi dari Kemendagri di Sumatera Utara.

Tokoh 38

Bagi **Bambang Subiyanto (Ketua Himpenindo)**, menjadi peneliti bukanlah perkara yang mudah. Peneliti berarti ujung tombak penentu kemajuan suatu bangsa. Banyak hal yang ia dapat dari berbagai temuannya di berbagai negara, terutama di Jepang. Belasan tahun menimba ilmu dari negeri Sakura itu, membuat Bambang berhasil menyematani hubungan penelitian Indonesia dengan Jepang.



AKTIVITAS

Outbound BPP 8
Aktivitas BPP 12

JENDELA BPP 13

KILAS BERITA 40

SAINS DAN
TEKNOLOGI 42

GAYA HIDUP 40

RESENSI FILM 48

RESENSI BUKU 50

KOMIK 51

SASTRA 52

OPINI

Replikasi Inovasi
Tepat Guna 54
Efisiensi Pelayanan
Dukcapil 56

CATATAN

Sang Demagog Ibu Kota 58

LAPORAN UTAMA 18-27

MENATA KEMBALI OTONOMI DAERAH

Sejak era reformasi, gagasan otonomi daerah terus bergulir dan menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma. Paradigma pembangunan yang bersifat sentralistik dan hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi bergeser kini berubah ke arah paradigma pembangunan yang berlandaskan prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan dalam bentuk otonomi daerah.



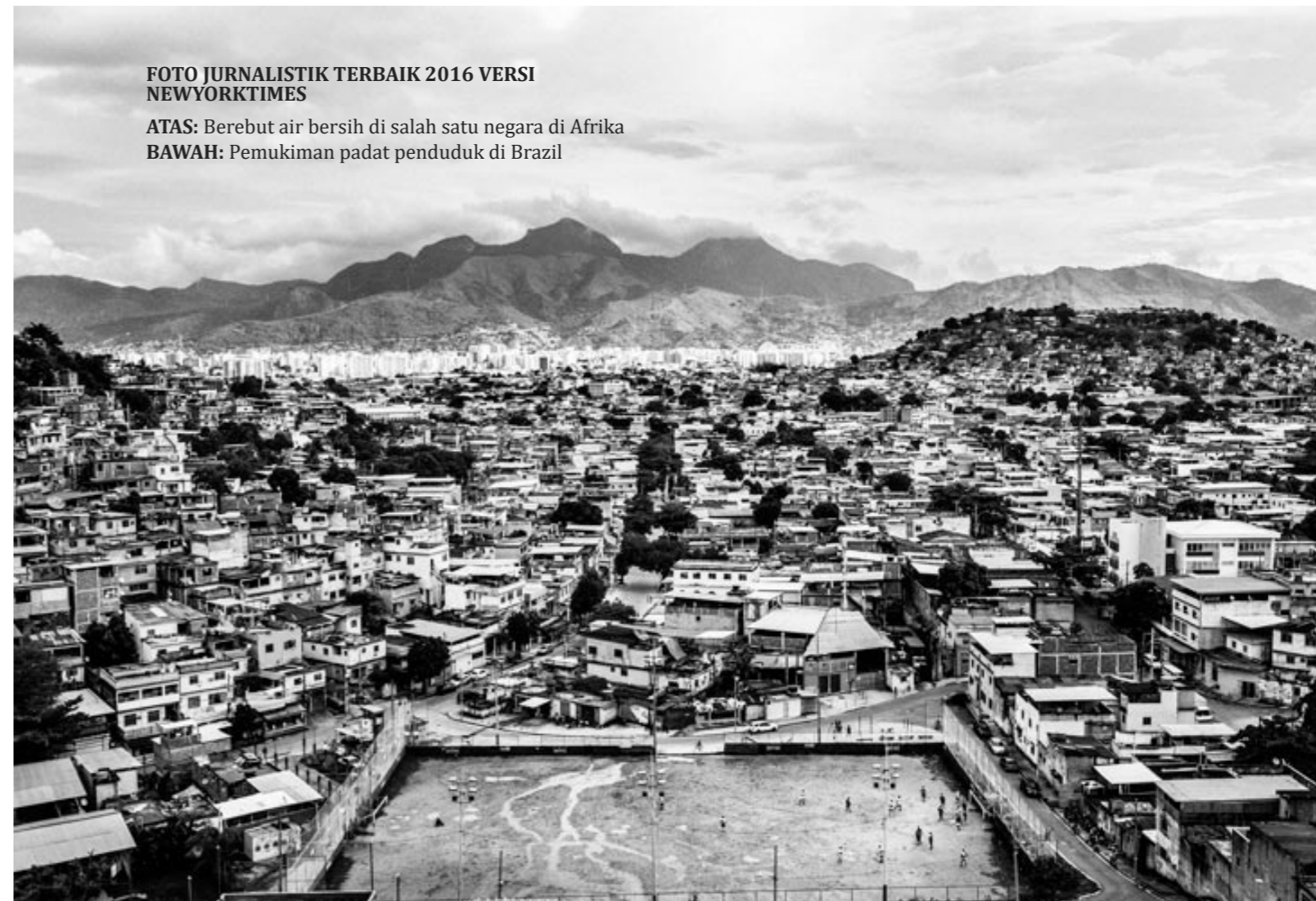


SISA KEBAKARAN - Pasar Senen, menyisakan cerita tiga hari tiga malam kebakaran. Total kerugian mencapai lebih Rp 10 miliar. Salah satu kebakaran terdahsyat di Jakarta (foto: Saidi Rifky)



FOTO JURNALISTIK TERBAIK 2016 VERSI NEWYORKTIMES

ATAS: Berebut air bersih di salah satu negara di Afrika
BAWAH: Pemukiman padat penduduk di Brazil



Outbound BPP Kemendagri BERSAMA MENUJU PERUBAHAN

Berbagai rangkaian acara dimulai dari berbagai permainan hingga motivasi perubahan dalam acara rutin tahunan BPP Kemendagri dengan tema “Kebersamaan dalam Perubahan Pola Pikir dan Perilaku Melalui Reformasi Birokrasi Demi Terwujudnya Peningkatan Kinerja” di Kuningan, Jawa Barat, Januari lalu.

Di bawah matahari yang beranjak naik, supir bus mengemudikan mobilnya menyusuri Jalan Kramat Raya. Bus melaju pelan di keramaian jalanan ibu kota, baru tancap gas ketika memasuki tol, dan semakin cepat lagi ketika memasuki Cipali. Ribuan hektar sawah menghampar luas di kanan kiri jalan. Sebagian besar padinya mulai menghijau kebiruan menyatu bersama warna langit yang mulai tertutup awan.

Riuh penumpang meletup sesekali diiringi tepuk tangan, ketika sopir membunyikan klakson. Maklum saja klakson “*telolet*” semakin digemari tatkala keberadaannya menjadi *viral* di dunia maya. Beberapa penumpang tidak bosan meminta bunyi “*telolet*” kembali, bahkan ketika sebagian penumpang mulai mengantuk dan kelelahan. Mereka kembali terbangun dengan gemuruh teriak penumpang lainnya.

Dari Cipali, bus berbelok ke arah Kuningan, melewati sebagian wilayah Cirebon. Hujan perlahan turun, air yang turun tidak

lagi seperti gerimis, tapi semakin deras. Genangan air kecoklatan terlihat di kanan kiri jalan, mengalir di turunan jalan yang terlewati bus.

Isi mobil seketika senyap, seperti hutan dan perkampungan yang terlewati sepanjang jalan menuju Kuningan. Selama hampir empat jam perjalanan, bus tiba di kawasan wisata Sangkanurip, Kuningan, Jawa Barat. Tiga rombongan bus memasuki kawasan parkir Hotel Montana.

Hari itu, acara rutin tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, pemantapan sumber daya manusia kelitbangan dilaksanakan di Kuningan, Jawa Barat. Acara tersebut mengambil tema “Kebersamaan dalam Perubahan Pola Pikir dan Perilaku Melalui Reformasi Birokrasi Demi Terwujudnya Peningkatan Kinerja”.

Sekira 200 orang peserta diboyong dari Jakarta. Seperti

pada acara-acara pada tahun sebelumnya para peserta merupakan seluruh pegawai BPP Kemendagri. Selama dua hari para peserta mengikuti acara *outbound* serta menjalin kebersamaan dan kekompakan dalam beberapa permainan yang sudah disiapkan panitia. Acara tersebut juga diharapkan tidak hanya menghasilkan kekompakan dalam pekerjaan, namun bisa memberikan semangat perubahan bagi pribadi masing-masing serta BPP Kemendagri di masa mendatang.

Acara diawali dengan pembukaan oleh Plt. Sekretaris BPP Kemendagri Subiyono, ia berharap acara dapat berjalan lancar dan memperkokoh rasa persaudaraan antarpegawai. Setelah memberikan sambutan Plt. Sekban membuka acara secara resmi.

Bak lautan darah, para peserta berbaju merah memenuhi Aula Hotel Montana. Di dalam gedung, instruktur mengambil komando, menegaskan acara inti akan segera dimulai. Indra, salah satu instruktur memperkenalkan beberapa orang tim yang akan menjadi pemandu. Mereka terdiri dari empat orang laki-laki dan dua orang perempuan. Keenam instruktur tersebut berasal dari Pusbindiklat LIPI.

Acara dimulai dengan permainan afirmasi positif dan salam sapa. Indra meminta peserta menyamakan persepsi dengan suara yang sama. “*Hallo..*” ucap Indra, kemudian peserta menjawab “*Hai..*” dan dilanjutkan dengan permainan-permainan dengan semua peserta membentuk lingkaran. Peserta pun diminta saling berhadapan dan berjabat tangan. Kemudian saling pijat dan saling membelakangi bergantian.

Ada hal menarik dalam permainan tersebut, adalah “*Who am I*” setiap peserta diminta diberikan sebuah

kertas dan menuliskan namanya di kertas tersebut secara horizontal, kemudian peserta lain secara berbeda menuliskan kata dalam setiap huruf secara vertikal sesuai dengan karakter peserta dimaksud. Terasa menggelitik ketika yang ditulis diplesetkan oleh peserta lain, misalnya nama A-R-I-F secara horizontal, pada bagian “R-nya” di tulis Rombeng, nama B-A-G-Y-O ditulis pada bagian “B” ditulis Bocor. Semakin lucu ketika beberapa peserta diminta ke depan dan menunjukkan kepanjangan namanya. Menurut Instruktur permainan tersebut dapat meningkatkan kerja sama dalam pekerjaan.

“Dari permainan tersebut kita bisa mengetahui peserta mana yang benar-benar mengenal kawannya. Fungsinya agar saling mengenal karakter tim kerjanya, dan bisa diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari,” kata Indra.

Permainan kemudian dilanjutkan dengan *stretching*, *music*, dan *team building grouping*. Permainan tersebut selain untuk meningkatkan kebugaran fisik, juga untuk membangun tim yang solid, serta mengembangkan kerja sama kelompok. Tidak kenal atasan dan bawahan, semua berbaur menyatu dalam keharmonisan

Keakraban malam

Seperti ular, para peserta mengantre untuk menyantap hidangan makan malam yang telah disediakan hotel. Menu yang disajikan malam itu, tidak lagi nasi jambang, makanan khas Cirebon yang melegenda seperti saat makan siang tadi. Menu yang disajikan malam ini adalah nila goreng lengkap dengan soto khas Kuningan.

Masih di gedung yang sama, acara dimulai dengan pemutaran video yang berisi kegiatan selama sehabian, dari mulai video dan sekilas foto-foto unik pengingat kebersamaan. Tidak sedikit beberapa foto pilihan yang mengundang tawa peserta. Sebelum acara motivasi sebagai acara inti malam itu, Plt. Kepala BPP



Kemendagri Dodi Riyadmadji memberikan sambutan.

Dihadapan peserta ia berpesan agar senantiasa menghilangkan ego masing-masing dalam bekerja. Ia juga mengapresiasi beberapa permainan yang telah dilakukan. "Saya mengapresiasi beberapa permainan yang dilakukan, semua permainan bagus untuk membentuk kebersamaan, serta mengurangi ego masing-masing agar tujuan dapat tersampaikan," tutur Dodi.

Tidak lupa ia juga berharap pada tahun mendatang acara bisa lebih lama, sehingga kebersamaan lebih lekat. Ia menyarankan acara bisa dilaksanakan selama tiga hari dua malam, serta bisa diikuti oleh seluruh peserta.

Dalam sambutannya Dodi juga menyampaikan beberapa pesan Mendagri Tjahjo Kumolo. Salah satunya terkait maraknya pemberitaan *hoax*. Menurut Dodi, Mendagri menyarankan untuk tidak menanggapi setiap pemberitaan yang tidak kompeten dan berasal dari sumber yang tidak jelas. "Apalagi kalau berita bohong tersebut langsung disebar di media sosial. Kita harus hati-hati menyebarkan pemberitaan meskipun kita memiliki persepsi yang berbeda. Sebisa mungkin *lah* pertengkar di media sosial harus dihindari karena menghabiskan waktu dan tenaga, kita harus cerdas dalam mengambil keputusan. Itu saran menteri," tegas Dodi.

Kepada Dodi, Mendagri juga berpesan untuk selalu



menjaga keberagaman di Indonesia. Mendagri menurut Dodi, juga sempat menyoroti berbagai kasus yang ramai di masyarakat seperti kasus penodaan lambang negara yang dilakukan sebagian oknum ormas dengan menambahkan huruf arab, menghangatnya isu PKI, dan sebagainya. Untuk itu Mendagri berpesan kepada setiap komponen khususnya Humas Puspen Kemendagri untuk mengontrol setiap pemberitaan yang menyerang pemerintah. Mendagri berharap ada jalan baik bagi setiap pemberitaan negatif dan bisa diatasi dengan baik.

Tiga prinsip perubahan

Motivasi merupakan acara utama di malam hari, sebelum berlanjut hiburan. Seorang motivator berdiri memakai blazer hitam kecoklatan. Memegang *microphone* dan menyapa dengan lantang. "Hallo.." peserta spontan menjawab salam. "Hai.."

MA Maliki adalah motivator kenamaan asal Jawa Barat. Malam itu ia menyampaikan tiga prinsip perubahan dalam buku *Awaken the Giant Within* dari Tony Robbins. Menurut Maliki, ketidakbahagiaan bisa hinggap di mana pun, bahkan kepada orang yang berkedudukan sekalipun. Lantaran mereka tidak bisa mengendalikan keyakinan, perasaan dan tindakan untuk mengubah jalan hidupnya.

Salah satu caranya agar selalu bahagia harus dengan melakukan perubahan. Yaitu dengan mengubah kebiasaan meskipun kebiasaan tersebut sangat sulit dilakukan. "Memang banyak tantangannya ketika melakukan perubahan, orang akan menyebut aneh, atau bahkan dimusuhi orang, betul tidak?" tanya Maliki.

Kebiasaan tidak sulit, ketika dilaksanakan bersamaan, tambah Maliki. Ia kemudian mencontohkan sebuah permainan Gajah dan Semut yang diperagakan oleh tangan, dan mencobanya dilakukan oleh peserta. Di

antara tiga prinsip perubahan yang disebutkan Maliki adalah, menaikkan standar, mengubah keyakinan, dan mengubah strategi.

Beberapa orang hebat mereka tidak menjalankan standar di bawah standar mereka. Seseorang harus menaikkan tujuan baik dalam hidup maupun pekerjaan. "Buat apa ke sini? Tanyakan apa yang membuat kita senang, dan apa yang membuat kita tidak senang bekerja di BPP? Itu yang bisa menaikkan standar kita," tambahnya.

Untuk menaikkan standar seseorang perlu piawai dalam penguasaan emosi, penguasaan fisik, penguasaan relasi, dan penguasaan waktu. Hal tersebut bisa dijadikan *role model* seseorang dalam rangka menaikkan standar hidupnya.

Selain menaikkan standar, kata Maliki seseorang juga perlu mengubah keyakinan. Keyakinan dalam membentuk tindakan, pikiran, dan perasaan. Selanjutnya adalah mengubah strategi. Jika seseorang sudah menetapkan standar dan meyakinkannya, maka pasti akan mudah menemukan strateginya. "Dan strategi terbaik adalah kita belajar dengan orang yang telah berhasil, itu jalannya," ucap Maliki.

Di akhir acara motivator memutar video motivasi, keharuan terpancar dari sorot mata yang berkaca-kaca dari peserta. Acara pun ditutup dengan hiburan musik yang menampilkan artis-artis lokal. Keakraban pun semakin terasa ketika para peserta bertanya dan bercanda bersama. (MSR)



KEGIATAN PUSLITBANG OTDA, POLITIK, DAN PUM DIPERTAJAM

JAKARTA - Pentingnya sinergitas antarlembaga yang bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri dibuktikan oleh Puslitbang Otda, Politik, dan PUM BPP Kemendagri dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perumusan/ Penajaman Kegiatan Kelitbang 2017 yang menjadi tupoksinya.

Rapat yang diselenggarakan di Aula BPP Kemendagri beberapa waktu lalu dibuka langsung oleh Plt. BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji. Adapun narasumber yang hadir merupakan beberapa pejabat terkait dari Ditjen Otda dan Ditjen Politik, dan PUM Kemendagri.

Kapus Litbang Otda, Politik, dan PUM Syabnikmat Nizam mengatakan rapat tersebut merupakan salah satu mediasi bersama Ditjen Otda dan Ditjen Polpum Kemendagri untuk meminta pandangan terkait beberapa program kegiatan yang akan dilaksanakan Pusat Litbang Otda, Politik, dan PUM atau pun Ditjen Otda, Politik, dan PUM.

Adapun beberapa program yang akan dilaksanakan Puslitbang Otda, Politik, dan PUM pada tahun ini di antaranya program prioritas nasional *Leadership Award* dan kajian aktual, kajian strategis, dan kajian kompetitif.

Syabnikmat menambahkan program tersebut sangat penting dilaksanakan. "Untuk *Leadership Award* sendiri akan dilaksanakan penilaian KDH pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya akan didapatkan indeks dan peta kepemimpinan kepala daerah provinsi, kabupaten/kota, pelaksanaannya menyesuaikan anggaran Puslitbang," kata Syabnikmat.

Selain *Leadership Award*, kajian mengenai *e-rekapitulasi* juga tidak kalah penting. Syabnikmat menyarankan minimal penggunaan teknologi *e-rekap* pada pemilu serentak 2019 mendatang, agar tidak lagi terjadi kecurangan. Teknologi pemilu lainnya adalah penggunaan *e-voting* untuk Pilkada di Indonesia yang diharapkan bisa dilaksanakan

di setiap desa di kabupaten dan kota besar.

"Untuk itu perlu ada kajian mengenai hal tersebut, khususnya penggunaan *e-voting* yang saat ini regulasinya ditentukan oleh komitmen kepala daerah, berbeda dengan pilkada dan pemilu yang diatur oleh UU dan peraturan KPU, itu harus karena teknologi bisa menghemat biaya, efektif, dan sebagainya," sarannya.

Sebagai narasumber, Gunawan Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otda Kemendagri mengapresiasi acara tersebut. BPP juga diminta untuk selalu menangkap keperluan-keperluan yang dibutuhkan komponen lain di Kemendagri.

"Komponen bisa disuplai dengan hasil-hasil penelitian yang dilakukan BPP Kemendagri, sehingga terjalin sinergitas antar komponen. Selain itu juga proses seperti ini dapat meningkatkan kapasitas BPP lebih baik lagi," tuturnya. (MSR)

SOSIALISASI SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI)

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Menyosialisasikan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Aula Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP), pada Rabu (2/2). Sosialisasi dipimpin langsung oleh Kepala Biro Organisasi dan Tata laksana Setjen Kemendagri Sukoyo selaku Anggota Pokja Pencegahan Satgas Pungli Kemendagri.

Sosialisasi dibuka langsung oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji. Sosialisasi Pungutan Liar (Pungli) sebagai respon positif terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), sebagai upaya menanggulangi keluhan masyarakat yang merasa gerah terhadap oknum-

oknum pemerintah yang meminta biaya terhadap jasa atau pekerjaan yang memiliki tuis pelayanan publik.

Dalam Sosialisasi tersebut, Sukoyo mengatakan saat ini skor Indeks Presepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2016 sebesar 37 dan menempati 90 dari 176 negara. Sukoyo juga menjelaskan beberapa faktor penyebab pungli antara lain lemahnya sistem kontrol dan pengawasan atasan, terbatasnya sumber daya manusia, faktor ekonomi, faktor mental, dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, Presiden telah membentuk Saber Pungli untuk mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintahan daerah.

"Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam memberantas pungli dengan melaporkan melalui saberpungli@kemendagri.go.id, Call Center 193/0821-1213-1323, dan SMS 1193/0856-8880-881", kata Sukoyo. (FNH)



Sekretariat PJKSE BPP Kemendagri

BUAT PROGRAM YANG MENCERDASKAN

Suksesnya pelaksanaan outbound BPP Kemendagri di Kuningan, Jawa Barat, beberapa waktu lalu tidak lepas dari kekompakan yang ditunjukkan panitia pelaksana dan peserta. Pada masa mendatang kesuksesan yang sama diharapkan muncul pada program kegiatan lainnya di BPP Kemendagri.

Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dan Sisdur serta Evaluasi Kinerja ASN (PJKSE) BPP Kemendagri yang dipimpin oleh Yuddy Kuswanto adalah panitia pelaksana kegiatan *outbound* itu. Beberapa waktu lalu, ketika ditemui di ruangannya pria yang disapa *Black* ini bercerita rahasia dibalik kesuksesan acara tersebut.

Setelah dua tahun ini menurut Yuddy, *outbound* tidak lagi menjenuhkan, pasalnya, setibanya di lokasi peserta diarahkan langsung menuju lapangan setelah makan siang. Bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya adalah peserta selalu diberikan kunci kamar di awal kedatangan. "Ini yang menyebabkan kenapa acara tidak efektif, peserta malah malas-malasan di dalam kamar, akhirnya panitia harus *manggil, capek kan?*," kata Yuddy.

Yuddy memberikan alasan pemilihan lokasi di Kuningan, pemilihan daerah tersebut didasarkan pada Kemendagri sebagai kementerian yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan di daerah. Untuk itu, menurutnya setiap orang yang bekerja di lingkungan Kemendagri harus mengetahui setiap daerah di Indonesia.

Selain kedua hal tersebut, Yuddy juga menyoroti tema yang dipilih dalam kegiatan, tema tersebut adalah "Kebersamaan dalam Perubahan

an Pola Pikir dan Perilaku Melalui Reformasi Birokrasi demi Terwujudnya Peningkatan Kinerja" hal itu senada dengan acara motivasi menjelang penutupan yang membahas prinsip perubahan. Yuddy menambahkan, dengan pemilihan tema tersebut diharapkan ada perubahan kinerja ke arah lebih baik dari para pegawai di BPP. Tema tersebut dianggap tepat dengan program reformasi birokrasi yang digadang-gadang pemerintah saat ini. Itu juga salah satu alasan pemilihan panitia *game* yang didatangkan langsung dari Pusbindiklat LIPI.

"Ada semacam harapan yang besar pada masa mendatang untuk BPP Kemendagri, utamanya para peneliti dalam peningkatan kapasitasnya dan berkontribusi di dunia kelitbang. Kita juga mendatangkan Pusbindiklat LIPI dan motivator MA. Maliki," tambahnya.

Outbound tersebut juga memiliki keterkaitan dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan PJKSE di waktu mendatang. Kepada *Media BPP* Yuddy menuturkan beberapa program unggulannya pada tahun ini, di antaranya akan dilaksanakan Rapat Koordinasi Kelitbang XVII di Palangkaraya pada Maret mendatang. Rakornas Kelitbang merupakan program besar tahunan BPP Kemendagri, serta Bimtek Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan *e-peneliti*.

Namun Yuddy belum mau bercerita tentang Rakornas Kelitbang secara panjang lebar, pasalnya masih wacana dan sedang dibicarakan. Ia kemudian bercerita tentang salah satu program pentingnya yaitu Bimtek Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI).

Bimtek tersebut diperuntukkan kepada para fungsional peneliti yang ada di BPP Kemendagri, sebagai upaya peningkatan kapasitas peneliti. Sebagaimana dalam beberapa peraturan LIPI peneliti diwajibkan menulis di jurnal internasional.

"Itu tentu bermanfaat untuk peneliti dalam meningkatkan kapasitasnya. Peneliti nantinya akan mengetahui cara menulis di jurnal internasional dan bagaimana cara mengupdate angka kreditnya dengan mudah melalui teknologi *e-peneliti*. Dalam Bimtek KTI tersebut peneliti diwajibkan membuat karya tulis dan dibahas bersama para pembicara dari LIPI, kita buat program kegiatan yang mencerdaskan" tutur Yuddy.

Terakhir Yuddy berharap beberapa program dapat berjalan lancar, serta dapat meningkatkan kemampuan. Selain itu, sinergitas juga dianggap penting sesama pegawai BPP, khususnya antara fungsional peneliti dan sekretariat agar semua kegiatan di BPP Kemendagri bisa berjalan dengan baik. "Dengan kerja yang efektif, kondusif, maka kita juga akan semakin berkontribusi bagi Kemendagri," tutupnya. (MSR)



Pusat Litbang Otda, Politik, dan PUM

CANANGKAN PEMILU DENGAN E-VOTING

Sebagai pusat bidang penelitian di lembaga *think tank* BPP, Pusat Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum BPP Kemendagri terus melakukan serangkaian kegiatan program kajian strategis sesuai dengan amanat dan arahan Menteri Dalam Negeri.

Program yang mereka canangkan dimulai sejak 2015 itu, berkaitan dengan salah satu usulan penelitian pemilu dengan *e-voting*. Baik pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, dan pemilu kepala desa.

Kepala Pusat Litbang Otda, Politik, dan PUM, Syabnikmat Nizam sendiri menjelaskan, sepanjang 2015 lalu, pusatnya telah banyak melakukan program prioritas berupa kajian strategis, kajian aktual utamanya berkaitan dengan pelaksanaan program politik pemerintahan dan pemilu.

Salah satu kajian strategis yang berhasil dilakukan pusat tersebut adalah perihal implementasi *e-voting* dalam pemilu. "Seperti yang sudah diimplementasikan 161 desa di Kabupaten Banyuasin, sudah banyak sekali menerapkan sistem *e-voting* sebagai metode pemilihannya. Tidak heran mereka selalu menjadi daerah percontohan dalam penerapan *e-voting*," ungkap pria yang akrab disapa Syab ini.

Ragam manfaat

Menurutnya, pelaksana *e-voting* merupakan strategi baru dalam meminimalisasi kecurangan yang terjadi selama pemilu. Pasalnya, sejarah mencatat, selama 11 kali pemilu, sejak dari zaman Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan pemilu. Di antaran-

ya, masalah penghitungan manual yang memerlukan waktu lama, dan penghitungan surat suara sangat berpotensi besar terjadi kesalahan, sehingga menyebabkan sengketa pemilu dan menghabiskan banyak anggaran yang terbuang lagi. "Perubahan yang semacam inilah yang harus kita canangkan, agar sistem demokrasi bangsa ini bisa lebih baik lagi," paparnya.

Syab menambahkan, pemerintah pusat dan daerah perlu bercermin dari penerapan Pemilihan kepala desa di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Banyuasin. "Dari beberapa daerah dan kabupaten tersebut *lah* kita bisa mendapatkan berbagai manfaat," terangnya.

Manfaat tersebut menurut bapak dari tiga orang anak itu antara lain, memudahkan pemilih karena dengan dua kali sentuhan dalam layar sentuh di dalam bilik pemilih, pelaksanaannya cepat karena hasil pengirimannya secara langsung dan tidak berjenjang, akurat dalam pemungutan dan pemilihan, meminimalisasi surat suara yang rusak, tidak terpakai, tidak ada surat yang tidak sah, akurasi datanya dijamin, dan yang terpenting partisipasi masyarakat sangat tinggi mencapai 90 persen.

"Selain itu, manfaat *e-voting* sendiri dapat dijadikan salah satu momen pengakurasi data penduduk sekaligus menuntaskan perekaman *KTP-el* dan penerbitan *KTP-el* di desa bersangkutan," tandasnya.

Belajar dari daerah

Seperti di Banyuasin, misalnya, meski menuai beragam tanggapan, ada yang pro dan kontra, namun Pemkab Banyuasin tetap menggunakan sistem *e-voting* pada pemilihan kepala desa (*pilkades*). Pada 2015, Pemkab Banyuasin melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) sukses menyelenggarakan *pilkades e-voting* serentak di 160 desa.

Dari sisi teknologi, pemerintah

setempat sangat mendukung berbagai aktivitas yang memadai. Seperti penggunaan bahan tanpa listrik (hanya menggunakan *accu/baterai*) dan bebas dari ancaman *hacker*. "Mereka tidak menemukan kendala yang signifikan. Masalah biaya untuk peralatannya pun cukup terjangkau. Hanya perlu komputer dengan layar sentuh, kartu pintar sebagai identitas pemilih, printer, serta perangkat pendukung lainnya berupa kabel ekstension, *accu*, *smart card reader*, dan *modem*," papar Syab.

E-voting merupakan solusi pemilu yang cepat, akurat, dapat diaudit, menghasilkan bukti hukum yang sah, dan efisien. "Di beberapa daerah justru sudah maju, mereka tidak perlu dilakukan pelatihan yang lama, karena prosesnya mudah dengan sekali sentuh," kata pria yang juga mantan anggota DPR-RI itu.

Perlu dimulai dari daerah

Meski menyambut baik segala kemajuan teknologi dalam pemilihan umum, Syab juga menyarankan agar *e-voting* ini dapat diaplikasikan terlebih dahulu melalui pemilihan kepala desa seperti apa yang sudah diterapkan di Banyuasin dan beberapa daerah lainnya. Mengingat kondisi wilayah Indonesia sangat beragam dan tidak bisa dijangkau di beberapa daerah terpencil.

E-voting menurut Syab digunakan secara bertahap pada daerah yang sudah siap baik oleh stakeholders, peralatan, serta didukung oleh kondisi geografis yang memungkinkan.

"Selain itu, *e-voting* sebaiknya mulai dilaksanakan pada lingkup yang kecil terlebih dahulu seperti *pilkades* dan *pilkada* sebelum sepenuhnya digunakan pada pemilu 2019," katanya.

Selain *e-voting*, Syab juga menyoroti teknologi *e-rekapitulasi* yang menurutnya harus bisa diaplikasikan dan diujicobakan pada pemilu serentak 2019, dalam melakukan penghitungan surat suara.

"Uji coba bida dilakukan pada *pilkada* sebelum penyelenggaraan pemilu 2019," tutupnya. (IFR)

Pusat Litbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan

MENGGAGAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN YANG CEPAT

Pencatatan sipil sejatinya dimulai sejak manusia itu dilahirkan. Saat itu pula negara berkewajiban langsung mencatat lahirnya 'penduduk baru' tersebut. Namun, di beberapa daerah Indonesia masih banyak pengurusan pelayanan akta kelahiran yang lambat dan berbelit-belit.

Untuk itu, Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan BPP Kemendagri memiliki program untuk menata dan menertibkan pelayanan akta kelahiran. Menurut Kepala Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan Subiyono, pihaknya akan melakukan riset untuk "merumuskan" model inovasi pelayanan akta kelahiran yang bisa diterima masyarakat, tepat sasaran, dan memunyai kemudahan untuk diakses oleh masyarakat, sehingga pengurusan akta kelahiran bisa lebih cepat dan aman serta benar dan sah.

Program itu dinamakan Pilot Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran. Direncanakan sebagai lokasi untuk dijadikan uji coba dalam penerapan model inovasi pelayanan akta kelahiran nantinya di tiga provinsi, yang mana masing-masing provinsi akan diambil satu kabupaten dan satu kota.

Adapun lokasi penerapan model tersebut sedang dirumuskan. Menurut Subiyono paling tidak lokasinya harus bisa menggambarkan karakteristik wilayah kabupaten/kota di Indonesia, seperti daerah perkotaan yang maju dan memiliki wilayah kumuh disamping penduduk rentan, kemudian daerah

perdesaan dan wilayah 3T (terpencil, terdalam dan terluar).

"Gambaran lainnya harus memerhatikan siapa penolong dan bagaimana proses kelahirannya, apakah persalinannya ditolong dokter, bidan, rumah sakit/klinik/Puskesmas, dukun bayi, atau diluar kategori tersebut. Selain itu juga harus diperhatikan apakah pengurusan akta kelahiran baru atau sudah terlambat," tuturnya.

Penerapan model

Subiyono menambahkan dalam pelaksanaan program model inovasi pelayanan akta kelahiran, ada beberapa tahap. Dimulai dengan melakukan pemetaan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana implementasinya terkait dengan pelayanan akta kelahiran di kabupaten/kota. Selanjutnya perekayasa model untuk merumuskan draft model inovasi pelayanan akta kelahiran di daerah.

Selanjutnya *draft* model inovasi pelayanan akta kelahiran tersebut kemudian diterapkan (diujicobakan) di 6 kabupaten/kota di 3 provinsi yang menjadi lokasi. Tidak kalah penting melakukan evaluasi penerapan. "Selama penerapan tersebut, nantinya juga akan kita lakukan evaluasi, bagaimana perkembangannya, apakah sudah sesuai atau belum," kata Subiyono. Yang terakhir adalah rekomendasi kebijakan. Yaitu hasil evaluasi penerapan tersebut -

but direkomendasi kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dijadikan kebijakan dalam pelayanan akta kelahiran di kabupaten/kota.

Subiyono mengaku, Pilot Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran ini merupakan program prioritas nasional. "Jadi kita tidak boleh main-main. Dalam setahun ini kita akan matangkan semuanya, target kita setahun dan semoga ini bisa terlaksana dengan baik," tuturnya. (IFR)

"KITA tidak boleh main-main dalam setahun ini kita akan matangkan semuanya, target kita setahun dan semoga ini bisa terlaksana dengan baik"



Puslitbang Inovasi Daerah Membangun Daerah Tertinggal Melalui Replikasi Perizinan

The *Global Innovation Index* (GII) dari tahun ke tahun memperlihatkan Indonesia masih menduduki peringkat terbawah dari 142 negara dengan skor minimal dari rentang skor antara 0-100. Penilaian tersebut didasarkan pada inovasi, baik di sektor bisnis maupun kemampuan pemerintah untuk mendorong dan mendukung inovasi melalui kebijakan publik. Atas dasar itulah Puslitbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri mewacanakan program prioritasnya dalam waktu dekat

Model Replikasi Inovasi Perizinan akan menjadi program Puslitbang Inovasi Daerah pada 2017. Lokus akan diarahkan pada wilayah tertinggal di antaranya di Kabupaten Lebak dan Musi Rawas. Sebab, kebijakan pembangunan di daerah tersebut terlalu berdimensi sektoral serta pendataan spasial dalam perencanaan pembangunannya belum optimal.

Menurut Rochayati Basra Kepala Puslitbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri, pembangunan daerah tertinggal memerlukan atensi dari semua pihak. Daerah tertinggal sebagai objek yang akan dibina oleh BPP Kemendagri merupakan perwujudan tanggung jawab sebagai unsur pembinaan

dan pengawasan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.

“Oleh karenanya, Puslitbang Inovasi Daerah bersama Tim telah memetakan model replikasi inovasi perizinan yang tentunya terkait dengan desa tertinggal, beberapa langkah sudah dimulai dengan menganalisis kebutuhan daerah, kita komunikasikan dulu komitmen replikasi tersebut. Kepala BPP juga sangat mendukung untuk segera direalisasikan,” tutur Rochayati

Selain itu, menurut Rochayati, beranekaragamnya inovasi perizinan di daerah, menjadi kekuatan tersendiri sekaligus tantangan. Pihaknya harus memetakan model-model inovasi perizinan. Seperti inovasi di Kota Surabaya terkenal dengan *Surabaya Single Window*, Paket Perizinan Daring Terpadu Satu Pintu dan Tanda Tangan Elektronik di Kabupaten Sidoarjo, Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Pengajuan Perizinan di Kabupaten Banyuwangi, Sistem Paket Dalam Kepengurusan Izin Hotel Baru dan Program 3 in 1 Kepengurusan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Bandung, dan Sistem Pembuatan Perizinan Lingkungan *Online* di Tulang Bawang, dan lain-lain.

Rochayati mengatakan, gebrakan yang dilakukan Puslitbang Inovasi Daerah

merupakan suatu terobosan inovasi. Sebab, Pusat Litbang

“**INOVASI** di daerah sepatutnya mendapat perhatian dari semua pihak. Bukan hanya Puslitbang Inovasi Daerah, tetapi mereka yang perhatian terhadap kemajuan daerah.

Inovasi Daerah ingin memberikan kontribusi walaupun bernilai kecil namun berdampak besar terhadap masyarakat. “Hal tersebut juga menunjukkan tekad BPP dalam membangun negara. Inovasi di daerah sepatutnya mendapat perhatian dari semua pihak. Bukan hanya Puslitbang Inovasi Daerah yang bertanggung jawab untuk memperhatikan kemajuan daerah,” ucapnya.

Selanjutnya Puslitbang Inovasi Daerah bersama dengan daerah yang terpilih menjadi lokus, akan berupaya menyisir kecocokan inovasi tersebut dengan daerah target.

“Puslitbang Inovasi Daerah memfasilitasi pelaksanaan dari replikasi, agar dapat berguna dan berhasil guna bagi kemaslahatan masyarakat yang berada di daerah tanpa menghilangkan kearifan daerah,” tegas Rochayati. (RSK/MSR)



Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Ciptakan Anggaran Pilkada yang Efisien

Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan serentak pada 15 Februari lalu, tentunya menjadi pembelajaran bagi semua pihak pelaku demokrasi, terutama pemerintah pusat dan daerah sebagai penyelenggara. Anggaran Pilkada yang tentu tidak sedikit ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyemarakkan pesta demokrasi. Tidak hanya terciptanya pilkada yang kondusif, aman, dan lancar namun juga dari segi pembiayaan yang harus efisien.

Untuk itu, Bidang Keuangan Daerah Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri sepanjang 2017 ini berencana menjalankan program terkait kajian pembiayaan pilkada yang efisien. “Mulai April sampai September kita akan lakukan kajian strategis terkait permasalahan pembengkakan biaya pilkada serentak selama ini,” terang Mercy Pasande Kepala Bidang Keuangan Daerah saat ditemui oleh *Tim Media BPP* di ruangannya.

Pilkada serentak justru boros?

Menurut telaah sementara Bidang Keuangan Daerah (Keuda), pihaknya mendapatkan informasi, pembiayaan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 lalu justru lebih boros dibandingkan pilkada tidak serentak. Seperti anggaran Pilkada pada 2015 yang menghabiskan anggaran sebesar 6,745 Triliun pada satu putaran tingkat Kabupaten/Kota. Padahal jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya menghabiskan sekira 5 Triliun. Hal itu dilatarbelakangi oleh banyak faktor, salah satunya adalah terkait Pokja (Kelompok Kerja) yang diatur dalam UU Pilkada. Selain itu

menurut perempuan yang akrab disapa Mercy itu, belum ada standar biaya penyelenggaraan pilkada yang rasional per pemilih per wilayah. Hingga saat ini biaya penyelenggaraan pilkada sangat bervariasi meskipun kondisi daerah relatif sama. “Apalagi sekarang *kan* anggaran pilkada dibebankan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Tentu hal ini akan memengaruhi anggaran pelayanan publik lainnya. Misalnya anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan pasti akan berkurang kalau pilkada dibebankan pada APBD juga. *Nah*, inilah yang ingin kita kaji. Bagaimana perbandingannya jika anggaran pilkada dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), apakah lebih besar atau tidak?” terangnya.

Faktor lain yang membuat anggaran pilkada serentak lebih besar adalah tidak adanya aturan yang jelas berapa *unit price* per provinsi per pemilih seluruh Indonesia.

“Jadi ada daerah yang APBD nya besar, TPS nya menjamur di mana-mana. Belum ada aturan yang jelas mengenai hal tersebut. *Nah*, yang ingin kita kaji juga ke arah sana, berapa *sih unit price* tiap provinsi yang dibutuhkan. Kita ingin membuat semacam landasan berapa seharusnya TPS berdiri di masing-masing provinsi. Karena tiap TPS membutuhkan biaya yang banyak, kasian daerah yang APBD nya rendah,” tandasnya.

Program ini rencananya akan menjadi *pilot project* nasional sebagai bahan rekomendasi landasan pengambilan kebijakan untuk Menteri Dalam Negeri. Mercy mengaku, pusatnya selama ini telah banyak mendapatkan respon positif

dari menteri terkait rekomendasi telaah kajiannya. “Pak menteri sering menanggapi rekomendasi dari kami, dan kebanyakan beliau disposisikan untuk ditindaklanjuti. Ada juga yang langsung dijadikan kegiatan di komponen lain,” terangnya.

Hal itu pula yang pernah diamini oleh Mohammad Noval, Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri yang ditemui *Tim Media BPP* beberapa waktu lalu. Menurut Noval, dari seluruh pusat di BPP Kemendagri, Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah lah yang selalu memunyai *output* dan laporan audit yang bagus.

“Karena kami selalu punya target, paling tidak 10 hari setelah kegiatan kajian/FDA dilakukan rekomendasi harus sudah sampai di tangan menteri. Kami juga selalu menyediakan tenggang waktu jika ada perbaikan-perbaikan yang mungkin disampaikan dari Pak Kepala BPP, kami bekerja dengan target,” tandasnya. (IFR)

“**KARENA** kami selalu punya target, paling tidak 10 hari setelah kegiatan kajian dilakukan rekomendasi harus sudah sampai di tangan Pak Menteri.



LAPORAN UTAMA

MENATA KEMBALI OTONOMI DAERAH

SEJAK ERA REFORMASI, GAGASAN OTONOMI DAERAH TERUS BERGULIR DAN MENYEBABKAN TERJADINYA PERGESERAN PARADIGMA. PARADIGMA PEMBANGUNAN YANG BERSIFAT SENTRALISTIK DAN HANYA TERFOKUS PADA PERTUMBUHAN EKONOMI TELAH BERGESER, KINI BERUBAH KE ARAH PARADIGMA PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN PRINSIP DASAR DEMOKRASI, KESETARAAN, DAN KEADILAN DALAM BENTUK OTONOMI DAERAH.



Otonomi daerah memang memberikan kesempatan bagi daerah untuk menggali potensi bagi kepentingan daerah dan masyarakatnya. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa aturan yang menata otonomi daerah pun banyak yang berbenturan, banyak daerah yang berteriak, begitu pula dengan pemerintah pusat dalam pengawasan dan penataan daerah. Berbagai permasalahan mulai dari manajemen pengelolaan anggaran daerah, masalah perizinan investasi, dan persoalan urusan wajib seperti masalah pendidikan, kesehatan, dan lainnya juga masih menjadi persoalan yang tidak ada habisnya.

Lahirnya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai wujud payung hukum berbagai daerah menjadi landasan awal dan langkah konkret terciptanya sistem desentralisasi daerah. Sepuluh tahun kemudian, lahir revisi dari UU tersebut, yakni UU No 23 tahun 2014 yang mengatur hal sama dengan penambahan pasal terkait Inovasi Daerah sebagai urusan yang mesti ada di setiap daerah.

Kini menginjak tahun ketiga UU tersebut diberlakukan, baru ada satu PP turunannya yang telah disahkan, yakni PP 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Itu pun banyak menimbulkan kegaduhan di beberapa daerah, ada yang menggugat dan ada yang menerima. Pekerjaan rumah kian menumpuk, apalagi santer adanya wacana revisi UU tersebut.

Menyulitkan pelaku usaha

Menurut Direktur Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Na Endi Jaweng, sejak UU itu diberlakukan, banyak sekali ketimpangan persoalan urusan daerah yang banyak ditemui dalam penelitiannya. "UU yang mengalami kegaduhan dan tidak jelas ini menurut saya di UU No 23 Tahun 2014, karena tidak hanya mengalami kegaduhan di internal pejabat

daerah tapi juga pelaku usaha. Para pelaku izin usaha akan mengalami kesulitan dalam izin usaha," ucapnya saat ditemui *Tim Media BPP* di Kuningan, Jakarta Selatan.

Endi juga menambahkan keberhasilan suatu daerah otonom sebenarnya bisa dilihat dari kemandiiriannya dalam mengatur manajemen keuangan daerah, terutama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya alam setiap daerah. mengingat Indonesia menjadi negara yang sangat potensial sebagai negara tujuan investasi dan masih menjadi tempat yang menarik minat bagi para pemilik modal untuk melakukan investasi. "Walaupun tidak sedikit pemodal dari luar masih memandang Indonesia belum mumpuni dalam memberikan dan pelayanan berkenaan dengan kepastian hukum," terangnya.

Kesulitan itu terlihat sejak masa peralihan wewenang dari UU No 32 Tahun 2004 ke UU No 23 Tahun 2014. Beberapa urusan izin usaha menjadi wewenang provinsi bukan lagi kabupaten/kota. "Karena peralihan wewengangnya tidak tuntas. Dua tahun lebih diberlakukan UU tersebut ada moratorium perizinan namun tidak ada yang kompeten mengatur hal tersebut. Saat pelaku usaha meminta izin ke kabupaten/kota, mereka bilang kami tidak punya wewenang lagi, namun saat di provinsi mereka bilang ini lembaga baru kemarin dan belum sepenuhnya paham. Jadi menurut saya ini, manajemennya transisi lemah sekali, dan hampir di semua daerah terjadi. Kecuali di Pulau Jawa," terangnya.

Selain itu, Endi mengatakan keberhasilan suatu daerah otonom juga ditentukan oleh kapasitas dan integritas kepala daerahnya, hal ini pula yang memengaruhi perkembangan investasi di daerah.

KPPOD sendiri melakukan survei terhadap 42 perusahaan di 32 daerah dengan kriteria skala usaha mikro, kecil, menengah,



besar, sektor industri, perdagangan, dan jasa. Mereka melakukan penilaian pungutan (pajak & retribusi) dan perizinan non pungutan. Ada 10 indikator yang mereka nilai dari TKED (Tata Kelola Ekonomi Daerah) yakni terkait interaksi pmda & pelaku usaha, kualitas perda, keamanan dan resolusi konflik, perizinan, biaya transaksi, infrastruktur, kapasitas & integritas, ketenagakerjaan, PPUS, dan akses lahan.

Dari penelitian tersebut menjelaskan, bahwa Pontianak lah yang menempati peringkat pertama dalam perolehan indeks secara umum, dan yang paling rendah adalah Kota Medan. "Dari sebagian daerah di wilayah timur, justru mereka menunjukkan capaian TKED yang tinggi. Seperti Gorontalo (2), Palu (5), Makassar (6), Kendari (8), Manado (9), dan Ambon (10)," papar Endi.

Dari segi waktu perizinan, Banda Aceh lah yang relatif bebas pungli dan lebih efisien. Waktu pemberian perizinan di Banda Aceh 4 hari kerja dengan biaya layanan terhitung



proporsional sekira Rp 250 ribu. "Sementara di Jayapura menempati peringkat terendah dengan rentan waktu 118 hari kerja," tandasnya.

Identifikasi daerah terendah

Dari penelitian tersebut Endi menjelaskan, jika tipologi masalah pada 10 daerah terendah masalah TKED tersebut biasanya terjadi karena empat faktor. Pertama, interaksi pem-

da-pelaku usaha menjadi masalah krusial terbanyak yang dihadapi daerah. "Banyak kebijakan terkait dunia usaha yang tidak menyentuh masalah para pelaku dunia usaha," jelasnya.

Kedua, lanjut Endi terkait kapasitas dan integritas Kepala Daerah muncul sebagai salah satu permasalahan. "Kapasitas dan integritas dapat memunculkan kepercayaan pub-

lik, khususnya dunia usaha. Saat ini belum banyak kepala daerah yang berkapasitas dan berintegritas. Daerah justru menjadi episentrum korupsi. Berdasarkan Laporan Tahunan KPK 2015, pada 2010-2015 terdapat 17 gubernur dan 49 bupati/wali kota dan wakilnya yang terjerat korupsi. Pada 2016, ada delapan kepala daerah yang berurusan dengan penegak hukum," tuturnya.

Mewabahnya penyakit korupsi tersebut dinilai menjadi *alarm* bahaya bagi keberlangsungan investasi di daerah. Korupsi memperbesar biaya perusahaan karena harus membayar biaya-biaya tidak resmi dan biaya tambahan. Konsekuensi logisnya ialah perusahaan menggeser beban tambahan kepada konsumen yang berdampak pada penurunan daya beli, yang akhirnya berpengaruh pada tingkat penjualan perusahaan.

Selain itu masalah infrastruktur menjadi kendala di beberapa daerah, terutama daerah yang baru dan berkembang. "Infrastruktur masih dibutuhkan terutama di daerah baru. Akselerasi pembangunan tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Seperti apa yang telah dilakukan di Pontianak yang banyak melakukan inovasi," tambahnya.

Lalu terakhir, masalah kompetensi ketengakerjaan yang masih perlu ada kebijakan peningkatan dari pmda untuk pemenuhan tenaga kerja. "Yang seringkali salah dari kepala daerah kebanyakan adalah, membuat peraturan daerah mengenai kebutuhan tenaga kerja yang mewajibkan penduduk setempat bekerja di tempat pelaku usaha. Ini salah besar, semestinya lakukan dulu pelatihan dan pengembangan kompetensi sebelum mereka masuk ke dunia usaha. Coba tengok Karawang, pendidikannya rendah, akibatnya penduduknya hanya menjabat posisi terendah, posisi tertinggi seperti direktur atau petinggi lain diambil dari daerah lain seperti DKI, misalnya. Akibatnya, masyarakat menjadi 'jongos' di tanahnya sendiri," jelasnya.

Melihat hal tersebut, Endi berharap ada perubahan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada aturan yang jelas men-

genai wewenang urusan wajib dan pilihan dari setiap daerah. Namun, secara garis besar Endi sebenarnya sangat mendukung mengenai urusan ekonomi pembangunan diurus oleh provinsi. “Untuk skala besar seperti ekonomi pembangunan saya lebih setuju jika yang mengatur adalah provinsi karena cakupannya lebih luas, sementara untuk masalah pelayanan dasar seperti pendidikan saya rasa cukup kabupaten/kota yang menanganinya. Tapi tetap semua itu harus ada koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota,” terangnya.

Ada empat hal yang menjadi solusi permasalahan TKED di daerah menurut Endi. Pertama, saat sistem pilkada harus memunculkan kepala daerah yang berkapasitas dan berintegritas. Kedua, penyediaan wahana komunikasi untuk berinteraksi antara pelaku usaha dan pemda. Ketiga, pengawasan perda yang lebih ketat baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Baginya, UU ini lahir di era SBY dengan mengedepankan sistem pembangunan ekonomi besar-besaran. Tentu sangat tidak cocok dengan cita-cita Nawacita Presiden Joko Widodo yang membangun negara dari desa dan daerah. “Prinsipnya segala perundang-undangan dan rancangan mengenai otonomi daerah harus memegang prinsip akuntabilitas dan keterbukaan bersama publik. Otonom yang dimaksud di sini *kan* masyarakat, jadi masyarakat harus berperan di dalamnya,” tandasnya.

Pemberian dana berjenjang

Keempat, Endi juga menyarankan terkait peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dengan penggunaan anggaran daerah. Ia mengkritik terkait penggunaan anggaran APBD yang selalu menyisakan anggaran (Silpa) dengan jumlah yang banyak. “Sebenarnya pemerintah pusat bisa menerapkan sistem transfer berbasis kinerja. Dibagilah pengeluaran anggaran berdasarkan termin atau waktu berjenjang,” katanya.

Waktu berjenjang disini maksudnya, memberikan anggaran pada negara dengan melihat kinerja

triwulanan setiap daerah. Daerah diberikan anggaran pada triwulan pertama dengan jumlah tertentu, lalu dilihat, apakah sudah ada perbaikan kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat. “Kalau infrastrukturnya tidak bagus, dan pelayanan dasarnya juga tidak bagus buat apa diberi anggaran dengan jumlah yang sama. Dana Silpa kita tahun ini 83 triliun lho, kita tidak kelebihan anggaran, tapi kita kekurangan kapasitas dalam mengelola dana,” tegasnya.

Menurut pengamatannya, Endi melihat selama ini daerah salah menggunakan dana Silpa yang didapat. Kebanyakan daerah mengembalikannya dengan menabungkan ke Bank Daerah. “Seharusnya dari Bank Daerah itu menawarkan kredit pinjaman kepada masyarakat UMKM (Usaha Mikro

Kecil Menengah) bagi warga yang membutuhkan, jangan ditabung lalu berbunga. Makanya kalau pusat terlambat memberi anggaran, daerah tidak pernah teriak. Karena dia menggunakan sisa Silpa tahun lalu untuk kepentingan gaji pegawai. Kasian pemerintahan pusat cari dana kemana-mana tapi tidak digunakan optimal oleh daerah,” sarannya.

Terakhir, Endi berpesan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk betul-betul mengatur regulasi yang meng-cover otonomi daerah secara komprehensif dan tegas. “Harus ada sanksi yang tegas kepada daerah yang tidak punya komitmen maju, selain itu pemerintah pusat juga harus benar-benar memayungi otonomi daerah,” tutupnya. (IFR)

Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah 2016



10 ibu kota provinsi dengan tata kelola terbaik



Pelayanan perizinan usaha di Indonesia (menurut laporan Doing Business 2017)

- Melalui 11 prosedur
- Memakan waktu 24,9 hari
- Membutuhkan biaya 19,4% dari pendapatan per kapita

Sumber: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah/Antra

Penghitungan Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) didasarkan 10 indikator dengan 40 responden perusahaan di 32 ibu kota provinsi di Indonesia (tidak termasuk Jakarta). Metodologi penelitian mencakup survei persepsi pelaku usaha, studi pustaka, dan simulasi perumusan kebijakan daerah.

10 indikator penilaian

- Perizinan usaha
- Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS)
- Interaksi pemda dengan pelaku usaha
- Infrastruktur
- Biaya transaksi
- Ketenagakerjaan
- Akses dan kepastian hukum atas lahan
- Keamanan dan penyelesaian konflik
- Kualitas perda
- Kapasitas integritas kepala daerah

PENGHARGAAN UNTUK DAERAH OTONOM

Era reformasi, otonomi daerah memang memberikan kesempatan bagi daerah untuk menggali potensi bagi kepentingan daerah dan masyarakatnya masing-masing secara mandiri. Pemerintah pusat pun tidak ketinggalan turut menyokong semangat kemajuan dalam berotonomi. Salah satunya dengan memberikan penghargaan kepada daerah yang mampu berkembang mengatur daerah otonomnya

Senin pagi Gedung H Kemendagri tampak orang berlalu lalang usai mengikuti kegiatan rutin apel pagi. *Tim Media BPP* menyambangi lantai 12 A kantor Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Gunawan, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah.

Di dalam ruangnya, Gunawan banyak memaparkan tentang sebuah penghargaan rutin dari Presiden untuk daerah otonom yang memiliki laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. “Hasil pemberian penghargaan itu *kan* mempunyai dua fungsi penting, pertama kami ingin melakukan evaluasi kinerja dari pemerintah daerah, yang itu dapat terlihat dari penyelenggaraan laporan keuangannya, selain itu sebagai pembina daerah,” ungkap pria paruh baya itu mengawali pembicaraan.

Menurutnya, sesuai dengan PP No 3 Tahun 2007 tentang LPPD (Laporan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah) kepada Masyarakat, dan juga PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemda, merupakan cikal bakal dari pem-

berian penghargaan kepada daerah otonom yang mempunyai laporan keuangan bagus. “Hasil laporan penyelenggaraan keuangan itu nanti berjenjang, dari laporan kota ke kabupaten lalu ke gubernur, dan gubernur ke menteri. Nah, hasil yang diserahkan pada menteri itulah yang akan kita *ranking*,” jelasnya.

Sebetulnya, lanjut Gunawan, pemberian penghargaan itu dimulai sejak 2008 namun baru diberikan secara simbolis oleh Presiden dalam peringatan Hari Otonomi Daerah sejak 25 April 2011. “Jadi sejak itulah, perayaan Hari Otonomi Daerah juga sekaligus sebagai pemberian penghargaan pada daerah,” tandasnya.

Penghargaan itu langsung diberikan Presiden dengan nama Satya Lencana untuk daerah yang menempati *ranking* tertinggi 3 besar provinsi, 10 besar kabupaten dan 10 besar kota. “Apabila daerah tiga tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan yang sama, maka Presiden akan memberikan penghargaan kembali bernama Purna Karya,” terangnya.

Gunawan menambahkan, sebenarnya pemberian penghargaan ini bukan hanya sebagai ajang *award* atau penunjang semangat daerah dalam ber-otonomi, tapi juga sebagai wujud kewajiban daerah terhadap haknya. “Harapannya semua

daerah menunjukkan kinerja yang baik. Karena kewajiban mereka ditunjukkan dengan penggunaan uang. Ada anggaran untuk alokasi pelayanan umum, pelayanan khusus, maupun dari bagi hasil. Semestinya daerah bisa melakukan itu untuk kesejahteraan umum dan pelayanan publik,” terangnya.

Indikator penilaian

Pemberian penghargaan itu merupakan hasil *ranking* dari 33 provinsi (non Kalimantan Utara), 39 kabupaten, dan 93 kota. Nantinya mereka akan dinilai berdasarkan indikator penilaian dari 34 urusan, baik pelayanan wajib, khusus, dan ditambah tugas pembantuan pemerintah daerah, seperti pembangunan infrastruktur.

Tidak hanya indikator penilaian dari Kementerian Dalam Negeri, indikator pemberian Satya Lencana kepada daerah dengan laporan keuangannya bagus juga banyak menjalin kerja sama dengan kementerian lain. Seperti IKAKA (Indikator Kinerja Kunci) yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. “Dari kami sendiri, masalah kesehatan juga menjadi layanan publik yang wajib yang menjadi salah unsur penilaian kami,” terangnya.

Gunawan juga mencontohkan, seperti layanan publik mengenai kunjungan ibu hamil merupakan dasar layanan publik pemerintah. Dari Kemendagri saja sebenarnya ada 200-300 indikator dalam 34 pelayanan dasar yang sudah dicanangkan. Namun biasanya diperdalam dari kementerian terkait sebagai bentuk evaluasi mereka juga. “Kalau kami terserah mereka akan gunakan untuk apa hasilnya itu, biasanya untuk kepentingan penelitian dan evaluasi. Tapi yang jelas kami selalu terbuka untuk semua kementerian terkait. Jadi kalau ditotal semuanya ada 800-an indikator,” jelasnya.

Kenapa indikator

itu yang digunakan? Gunawan memaparkan, sebenarnya dari laporan keuangan itu nantinya juga akan terbuka lebar bagaimana hasil atau *output* dari pelayanan publik yang daerah lakukan selama setahun. “Kami juga turun ke lapangan, memastikan benar atau tidak laporan yang mereka tulis dengan hasil yang dirasakan oleh masyarakat, jadi tidak begitu saja menerima laporan tertulis, karena kami *kan* banyak bekerja sama dengan dinas dan kementerian terkait” imbuhnya.

Tertinggi dan terendah

Dari hasil itu sebenarnya Ditjen Otda sudah mempunyai gambaran, mana saja daerah yang mempunyai laporan terbaik dan terendah. “Dari catatan kami, selama ini dari provinsi yang selalu mendominasi itu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sementara dari kabupaten lebih variasi, kebanyakan dari Jawa tapi pernah Makasar mendapat peringkat pertama. Lalu kota pun demikian, tidak ada yang tetap, semuanya fluktuatif,” jelasnya.

Selain itu, untuk waktu pengukurannya, biasanya Gunawan dan timnya mengukur laporan penyelenggaraan dua tahun sebelumnya. Namun sayangnya, untuk hasil *ranking* laporan penyelenggaraan anggaran yang baru (2016) Gunawan tidak mau membeberkan kepada *Tim Media BPP* daerah mana saja yang mendapat peringkat tertinggi dan terendah. “Karena ini masih sangat *off the record* siapa-siapa saja yang menempati posisi pertama dan terakhir, kami akan mengumumkan secara resmi pada 25 April mendatang berkaitan dengan Hari Otonomi Daerah,” kata Gunawan.

Sementara itu, dia juga menjelaskan, daerah terendah biasanya banyak terjadi di Papua dan Sulawesi Utara. Mengapa demikian? Rupanya ada banyak faktor yang melatarbelakangi

mengapa daerah itu selalu menjadi yang terendah.

“Pertama terkait komitmen pemimpin daerah, baik itu dari kepala daerah maupun SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Mereka harus punya komitmen dalam memajukan daerah, memanfaatkan sebaik mungkin penggunaan anggaran,” terangnya.

Selain itu, masalah yang kerap terjadi adalah persoalan manajemen data. Di sini sebenarnya peran Kemendagri dalam memberikan indikator lain penting untuk dimasukkan. “Ada yang memang dia kinerjanya *outputnya* baik, tapi pelaporannya kurang baik,” tandasnya.

Peran Kemendagri

Melihat hal tersebut, Gunawan dan tim saat ini sedang melakukan pemetaan dan pendampingan/pelatihan kepada daerah-daerah yang selama ini mendapat *ranking* terendah.

“Kita sudah mulai tahun kemarin, dan saat ini kami tengah memetakan daerah mana-mana saja yang membutuhkan pelatihan dan pendampingan, terutama terkait laporan penyelenggaraan program,” bebarnya.

Tidak asal menentukan pemetaan, ia mengatakan, indikator yang dibutuhkan dalam pemetaan juga memerlukan sejauh mana pelayanan publik dan kinerja *real* dari setiap daerah. “Kami akan tinjau itu semua dari sigma kinerja tiap daerah tahun sebelumnya, kalau sudah dilakukan pemetaan barulah kami akan melakukan pendampingan dan pelatihan sesuai dengan kapasitas daerah masing-masing. Untuk itu, kami perlu *me-ranking* terlebih dahulu daerah yang tertinggal,” paparnya menutup pembicaraan. (IFR)

MEREVISI REGULASI OTONOMI DAERAH

LAHIRNYA UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam dua tahun dua tahun terakhir masih menyimpulkan sebuah tanda tanya dan koreksi besar. Peralihan wewenang dari kabupaten/kota ke provinsi dan seterusnya adalah salah satu masalah yang kerap ditiarakan oleh daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam hal ini berupaya memberikan berapa masukan dan telaah atas payung hukum dalam otonomi daerah, agar terciptanya otonomi yang maju dan berkelanjutan

S elasa siang, tepatnya pada (17/1) *Tim Media BPP* menyambangi ruangan Plt. Kepala BPP Kemendagri, Dodi Riyadmadji. Di sana, kami banyak berdiskusi terkait wacana akan isu direvisinya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Mengurus pemerintahan daerah ini bukanlah persoalan yang mudah,” terang Dodi mengawali pembicaraan.

Bagi pria asal Yogyakarta yang banyak berkecimpung di Pemerintahan Dalam Negeri itu, sebenarnya UU No 23 Tahun 2014 sudah cukup mengatur mengenai otonomi daerah hanya saja ada hal yang perlu dikoreksi dan dipahami oleh semua pihak. “Pertama yang perlu harus dipahami, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebenarnya kaitannya itu dengan mengatur urusan pemerintahan daerah supaya beres, lalu urusan ini semestinya dibawa ke Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Jadi memang hal-hal seperti ini harus diletakkan pengaturan pembagian kewenangannya secara *clear*, sehingga daerah tidak hanya dapat mandiri mengatur urusannya, tetapi juga diarahkan untuk membangun daerahnya,” terang Dodi.

Lanjutnya, persoalan semacam ini semestinya diisi oleh orang yang benar-benar kompeten di bidang pemerintahan daerah, sehingga hubungan pusat dan daerah dapat berjalan selaras dan seirama. Pemerintah pusat mengerti kebutuhan daerah dengan memberikan wewenang dan otoritas mengatur daerahnya masing-masing, pemerintah daerah juga mempunyai semangat dan komitmen memajukan bangsa dari daerah masing-masing.

Selain itu, bagi Dodi permasalahan lainnya yang perlu dipahami adalah masalah regulasi yang diciptakan di daerah. Seperti produk hukum (perda atau perkara) yang kurang terciptanya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. “Untuk mengatur produk hukum daerah, sebenarnya Mendagri punya kewenangan untuk mengesahkan atau membatalkan perda. Maka produk hukum daerah itu harus ditata betul oleh Kemendagri. daerah otonom yang ingin menyusun perda saat mengajukan harusnya sudah mendaftar ke Kemendagri untuk direkam terkait dengan nomor register perda yang akan dibuat. Kemudian daerah semestinya banyak berkonsultasi, baru setelah itu diberikan pengesahan, sehingga aspirasi di daerah kabupaten/kota dapat *ter-cover* dan dipahami oleh pemerintah pusat” jelasnya.

Koreksi penerapan UU No 23

Sebagai orang yang pernah bergelut dalam perumusan mengenai regulasi pemerintahan daerah itu, Dodi tentu tahu betul perbandingan antara UU No 23 dengan UU No 32 tahun 2004 (sebelum direvisi menjadi UU No 23). “Saya sebenarnya adalah konseptor UU No 32 Tahun 2004. Bukannya saya subyektif, tapi kita harus melihat UU itu selalu diciptakan

dengan cita-cita untuk memajukan masyarakat di kabupaten/kota. Pada saat pembagian urusan, kita berpikir semua orang pasti punya niat baik. Dalam UU No 32 Tahun 2004 itu persoalan sanksi tidak dijelaskan secara detail, tapi ditulis pada turunannya. Sehingga pada saat itu Pak Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri sebelumnya) meminta saya untuk menyempurnakan UU No 32 Tahun 2004 dengan memasukkan aturan sanksi di dalamnya,” cerita Dodi.

Sebenarnya, Dodi sempat mengikuti-perombakan UU No 32 Tahun 2004 menjadi UU No 23 Tahun 2014, namun karena dia juga harus fokus merumuskan UU mengenai Pilkada, maka perombakan UU No 32 Tahun 2004 ini menjadi lepas dari pengawasannya sebagai salah satu konseptor sebelumnya. “Yang saya terkejut, revisi urusan kewenangan di UU No 23 Tahun 2014 ini logikanya jadi lompat-lompat. Banyak aturan yang semestinya sudah matang jadi berantakan. Seperti pembagian urusan Pendidikan. Dalam UU 23 dijelaskan, urusan pendidikan Menengah Atas (SMA dan SLTA



menjadi wewenang provinsi, sementara pendidikan dasar (TK-SD-SMP) menjadi urusan Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

Hal itu tentu akan menjadi ketimpangan urusan. “Coba lihat ada berapa banyak SMA di kabupaten/kota. Kalau provinsinya luas seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka tentu akan kesulitan melakukan koordinasi, harus jauh-jauh ke Semarang dan Surabaya tentunya. Padahal sebenarnya dalam ranah pendidikan mereka sudah paham betul mengaturnya, seperti dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan sebagainya,” jelasnya.

Selain permasalahan pendidikan, yang kerap gaduh di daerah menurut Dodi adalah masalah perizinan usaha/tambang. “Peralihan tambang dari kabupaten/kota ke provinsi ini yang tidak dipersiapkan secara mulus. Sebenarnya tim perumus UU No 23 Tahun 2014 *kan* cita-citanya ingin merasionalisasi adanya sengketa yang biasanya terjadi antara kabupaten/kota dan provinsi. *Nah*, supaya lebih adil maka terjadilah peralihan kewenangan yang sekarang dikelola oleh provinsi. Tetapi seharusnya kabupaten/kota tetap mendapatkan hasil dari izin pertambangan dan usaha itu, karena berada di wilayahnya. Mestinya Gubernur saat memberikan izin, sebagian pendapatan masuk ke kabupaten/kota. *Nah*, inilah yang belum dipersiapkan secara matang,” jelasnya.

Menurut Dodi, ada cara konvensional yang sebenarnya dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Pertama, terkait pemberian anggaran kepada daerah yang tidak terlalu besar. Kedua soal pengawasan daerah yang harus independen. Ketiga pemberian sanksi dan *reward* memang harus bisa berjalan efektif.

“Namun sayangnya presiden tidak ingin yang seperti itu. Dia sangat revolusioner. Sehingga kalau kita lihat pembagian daerah, besarnya bisa melampaui 30 persen dari APBN atau sekira 775 triliun dialokasikan untuk daerah otonom, sementara untuk pemerintah pusat sekira 1.300 triliun. Tapi kenyataannya di lapangan pemberian anggaran yang besar tidak diiringi dengan pengawasan dan pengontrolan anggaran,” paparnya.

Pengawasan daerah otonom

Masalah pengawasan memang tidak lepas dari yang namanya Inspektorat Daerah sebagai perangkat penga-

wasan di daerah. Yang disesalkan oleh Dodi, keberadaan Inspektorat Daerah inilah yang dirasa tidak optimal menjalankan perannya. “Banyak sekali OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK kepada Pemda, tanpa ada tindakan terlebih dahulu dari Inspektorat Daerah. Semestinya sebelum hal itu terjadi, mereka harus menasihati terlebih dahulu Kepala Daerah mereka,” sarannya.

Selain itu, Inspektorat Daerah selama

“

PELAKSANAAN

desentralisasi di Indonesia masih mengalami banyak hambatan dan kendala sehingga tujuan dari kebijakan tersebut belum dapat diwujudkan secara optimal.

ini terkesan terhambat oleh sistem yang diberlakukan. “Posisi Inspektorat bercampur aduk semua dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lain. Semestinya tidak, dia harus punya *grade* yang berbeda lebih kuat, lebih independen dengan sistem penempatan jabatan. Bupati semestinya saat menentukan orang-orang yang ditempatkan di Inspektorat, harus bisa melihat apakah orang ini berkompeten dan efektif atau tidak dalam memberikan masukan-masukan,” tuturnya.

Dulu, sebelum diterapkan UU No 23 Tahun 2014 posisi Inspektorat Daerah mengekor pada pemerintah pusat, sehingga posisinya jauh lebih independen. Terutama saat anggaran masuk ke daerah, inspektorat dapat mengontrol dan mengawasi pemerintah daerah. “Kalau seandainya Inspektorat menginduk di Kemendagri, karena sebenarnya kita punya otoritas yang lebih luas. Maka posisi Inspektorat akan lebih independen dalam pengawasan, karena selama ini *kan* Inspektorat dipilih oleh Pemerintah Daerah, jadi bisa saja diberhentikan tiba-tiba jika bertindak lebih tegas,” jelasnya.

Untuk itu lanjutnya, ia menyarankan agar posisi Inspektorat Daerah dapat berdiri sendiri atau mengekor pada pemerintah pusat agar kedudukannya lebih independen dan tegas. “Jika kita menginginkan perubahan pada otonomi daerah, UU yang mengatur otonomi daerah juga harus diubah dan memilih orang yang benar-benar

berkompeten dalam mengurusnya,” saran Dodi.

Usulan revisi UU No 23 Tahun 2014

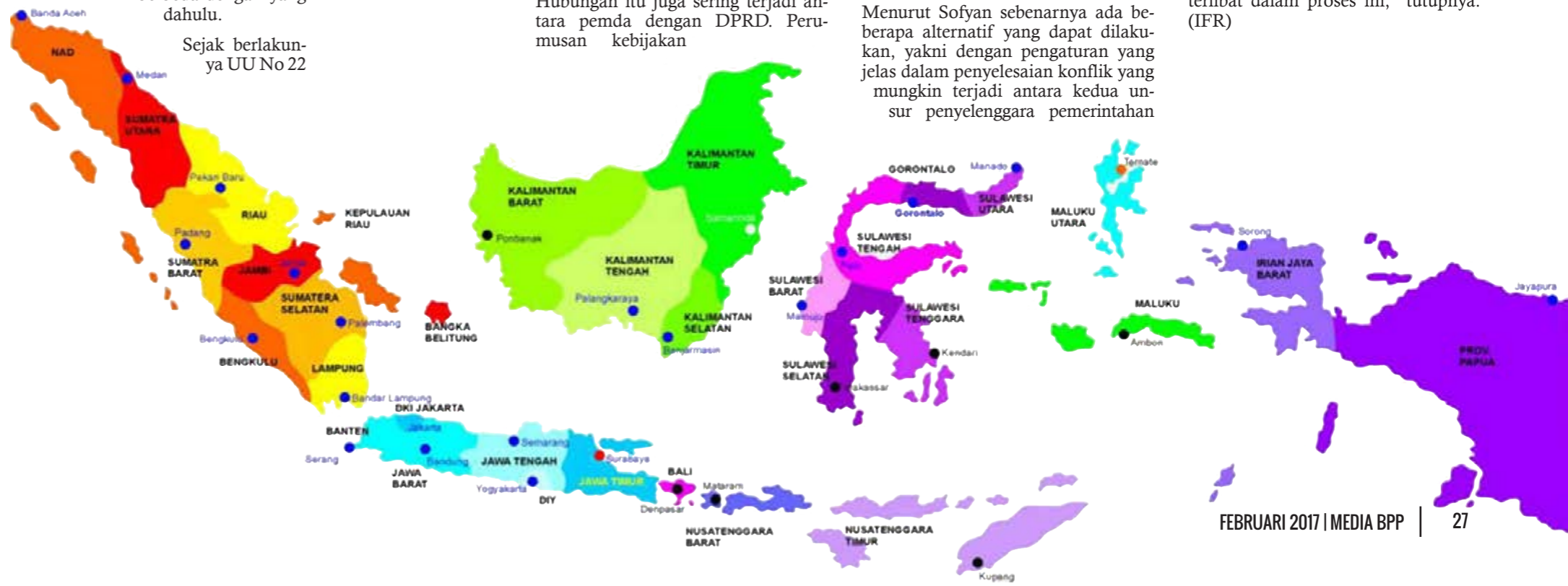
Sementara itu di tempat lain, Peneliti BPP Kemendagri, M. Sofyan mengusulkan 20 poin terkait revisi UU No 23 Tahun 2014 itu. Usulan revisi Sofyan ini sebenarnya sudah berkali-kali dirapatkan dalam forum internal peneliti BPP Kemendagri.

Sofyan menyarankan, agar beberapa hal krusial pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD, perangkat daerah, status dan peranan provinsi sebagai wakil pemerintah, perda dan perkara, perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, dan inovasi daerah perlu diatur lebih lanjut.

“Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia masih mengalami banyak hambatan dan kendala sehingga tujuan dari kebijakan tersebut belum dapat diwujudkan secara optimal. Hambatan dan kendala tersebut muncul karena pengaturan yang ada dalam UU No 23 Tahun 2014 belum mampu secara tepat mengantisipasi dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di daerah yang cenderung semakin tinggi,” paparnya.

Lebih lanjut Sofyan mengatakan, hal ini berakibat pada banyaknya masalah yang muncul di daerah tidak dapat diselesaikan dengan pengaturan yang ada. Bahkan, dalam beberapa hal pengaturan yang ada di UU No 23 Tahun 2014 tidak mengakomodasi dengan jelas dan tegas, karena dinamika situasi yang dihadapi oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah sudah berbeda dengan yang dahulu.

Sejak berlakunya UU No 23



Tahun 1999 (sebelum UU 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah, jumlah daerah di Indonesia mengalami pertambahan yang sangat fantastis yaitu sebanyak 179 kabupaten/kota dan 7 provinsi. Pembentukan daerah baru memang dapat memberi peluang untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan mendekatkan pemerintahan dengan masyarakatnya. Namun demikian, pembentukan daerah baru yang dilakukan tanpa memerhatikan persyaratan yang ketat, justru akan menimbulkan beban bagi pemerintah itu sendiri baik secara finansial, maupun administratif yang pada akhirnya justru akan berakibat pada rendahnya kualitas pelayanan publik. “Untuk itu perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai proses pembentukan daerah yang baru secara jelas dan ketat. Dalam UU No 23 Tahun 2014 yang sudah banyak mengalami revisi dari UU No 22 Tahun 1999 itu masih terlihat longgar dari segi aturan, sehingga dari segi pengaturannya tidak jelas,” terang Sofyan.

Selain itu dalam hal pembagian urusan wewenang, bagi Sofyan yang harus dipertegas adalah masalah hubungan antartingkatan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. “Revisi itu nantinya harus dapat didesentralisasikan secara lebih jelas mengenai pengaturan kewenangan antartingkatan pemerintahan, karena selain mencegah terjadinya duplikasi kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, juga akan menggambarkan hubungan interdependensi atau hirarki fungsional antarlevel pemerintahan. Sehingga tidak ada lagi kegaduhan di daerah,” imbuhnya.

Hubungan itu juga sering terjadi antara pemda dengan DPRD. Perumusan kebijakan

umum pemerintahan daerah, Bidang Keuangan Daerah, Bidang Kepegawaian Daerah, Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Keempat bidang tersebut sering menimbulkan ketegangan atau konflik antara kepala daerah dengan DPRD pada tataran perumusan dan penetapan instrumen kebijakan berupa peraturan daerah, APBD, keputusan kepala daerah dan peraturan kepala



daerah.

Seperti muncul masalah ketika salah satu pihak tidak bersedia untuk membahas usulan kebijakan pihak lainnya, terkait dengan pembuatan Perda atau APBD.

“Banyak kasus menunjukkan bahwa DPRD tidak mau membahas usulan Perda yang disampaikan oleh Pemda. Pembahasan Perda sering dijadikan sebagai bahan tawar menawar oleh DPRD untuk memenuhi kepentingan diri dan kelompoknya. Begitu pula saat pembentukan APBD. Bahkan, beberapa kabupaten/kota gagal memperoleh persetujuan dari DPRD untuk rancangan APBD yang dibuat oleh pemda, sehingga daerah terpaksa menggunakan APBD tahun lalu,” ulasnya.

Menurut Sofyan sebenarnya ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan, yakni dengan pengaturan yang jelas dalam penyelesaian konflik yang mungkin terjadi antara kedua unsur penyelenggara pemerintahan

daerah. “Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat menjadi wasit yang baik dalam penyelesaian konflik antara pemda dan DPRD. Untuk pelaksanaannya Presiden dapat menunjuk menteri dalam negeri untuk mewakilinya dalam mengambil tindakan yang diperlukan. Jika salah satu atau kedua pihak tidak dapat menerima penyelesaian yang dilakukan oleh menteri, maka mekanisme peradilan dapat ditempuh,” terangnya.

Terakhir, Sofyan berharap para pemangku kepentingan dan kebijakan mampu memahami dengan baik mengapa perbaikan terhadap UU No 23 Tahun 2014 diperlukan, aspek apa saja yang perlu diperbaiki dan diperkuat, dan hal-hal baru yang memerlukan pengaturan lebih jelas dalam UU yang baru. Dengan adanya perbaikan diharapkan berbagai masalah yang selama ini terjadi di daerah dapat dicarikan solusinya dengan baik sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

“Terlepas dari berbagai kendala tersebut, komitmen yang kuat dari pemerintah, nantinya proses revisi ini paling tidak memberikan harapan bahwa revisi UU No 23 Tahun 2014 ini akan memberikan perubahan mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam mempercepat tercapainya tujuan otonomi daerah. Tentu saja revisi ini tidak akan mampu mengakomodasi atau menyenangkan semua pihak. Namun, dengan semangat mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik pada masa yang akan datang, kiranya kita perlu memberikan apresiasi yang besar terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini,” tutupnya. (IFR)

UPAYA MEWUJUDKAN IKON KOTA

Upaya keras harus dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Daerah Kota Kupang. Pasalnya salah satu program pentingnya tahun ini dalam mewujudkan sebuah kawasan *Science Tecno Park* (STP) yang dicanangkan sebagai ikon Kota Kupang harus terkendala biaya. STP pun diharapkan menjadi sektor unggulan sebagai lokomotif perekonomian daerah.

Tersusunnya nota pendapat oleh Pemerintah Kota Kupang yang mengagendakan pembangunan STP di Kupang membuat BPP Kota Kupang kian optimis. Terwujudnya dokumen tersebut tidak lepas dari peran BPP sebagai Tim Koordinasi SIDA. Wacana pembentukan STP bukan tanpa alasan. BPP Kota Kupang telah mengaji sedemikian rupa dan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki Kota Kupang yang dinilai cukup memadai untuk dibentuk STP sebagai sebuah ikon kota. STP juga dianggap sesuai dengan visi pembangunan daerah, serta telah mendapat kesepakatan dari *stakeholder* pembangunan daerah.

Kota Kupang ditempatkan dalam koridor pengembangan V dengan konsentrasi pengembangan pada sub sektor perikanan dan kelautan, serta peternakan dan pariwisata. Di bidang kepariwisataan, melalui PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), pemerintah pusat menetapkan 50 destinasi pariwisata unggulan di Indonesia, dan lima di antaranya berada di Provinsi NTT. "Penetapan destinasi pariwisata unggulan nasional tersebut memberi peluang yang sangat besar bagi Kota Kupang sebagai pintu masuk arus wisatawan untuk memacu pengembangan kepariwisataan sebagai kekuatan ekonomi baru di waktu mendatang," ucap Noce Nus Loa Kepala BPP Kota Kupang.

Kupang merupakan ibu kota provinsi yang letaknya paling strategis. Di antara daerah lain, di NTT, Kupang

merupakan wilayah paling maju sehingga keberadaan sebuah ikon kota sangat penting, dikarenakan selama ini Kupang belum mempunyai sebuah ikon kota seperti kota-kota lainnya.

Alasan lain adanya beberapa kewajiban yang mendasari pemerintah Kota Kupang untuk menyediakan kawasan tersebut adalah UU No 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mengamankan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha dapat membangun kawasan, pusat peragaan, serta sarana prasarana iptek lain untuk memfasilitasi sinergi dan unsur-unsur kelembagaan dan menumbuhkan budaya iptek di masyarakat.

Tiga dasar hukum lainnya adalah UU No 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam negeri dalam memperkuat produktifitas dan daya saing industri nasional, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan tentang pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengembangkan dan memfasilitasi penguatan inovasi berbasis pada sumber daya unggulan daerah. serta Peraturan Bersama antara Menristek dan Dikti dan Mendagri No 3 dan 36 Tahun 2012, yang intinya pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah terutama berkaitan dengan upaya-upaya meningkatkan daya saing daerah.

Alasan semakin kuat tatkala program STP telah menjadi salah satu program prioritas nasional dalam Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Nawa Cita 6 kan sudah jelas. Di situ Presiden Jokowi akan meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 2000 kilometer, membangun 10 pelabuhan



dan bandara, 10 kawasan industri baru, 5000 pasar tradisional, efisiensi perijinan bisnis, mendirikan secara khusus Bank Pembangunan dan Infrastruktur, meningkatkan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi, dan yang menjadi sorotan adalah membangun sejumlah STP di daerah-daerah, politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini," kata Noce.

Terkendala biaya

Baru-baru ini Wali Kota Kupang mengeluarkan nota pendapat yang ditujukan kepada Gubernur NTT terkait keberadaan STP yang dinilai sangat penting diwujudkan di pusat kota. Nota pendapat tersebut berisi permohonan wali kota supaya gubernur mau mengusulkan kepada Presiden agar pembiayaan STP dianggarkan dalam APBN. Hal itu dikarenakan APBD Kota Kupang tidak memungkinkan untuk membangun STP.

"Terbatasnya alokasi dana APBD Pemerintah Kota Kupang mengakibatkan rencana pembangunan STP tersebut perlu dianggarkan dari alokasi

dana APBN," ujar Noce.

BPP Kota Kupang juga tidak tinggal diam, mereka terus berupaya keras demi terwujudnya STP. Pertemuan ke Kemenristek dan Dikti kemudian dilakukan, namun sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut maupun keputusan apakah STP Kota Kupang mendapat anggaran APBN. Namun, salah seorang Deputy Bidang Jaringan Iptek Gopa Kusworo memberikan informasi, sejumlah STP yang diwacanakan akan dibangun pada 2017 sebanyak 100 STP. Kemudian menurut Gopa, setelah pihaknya menerima beberapa usulan dan dilakukan seleksi terhadap 100 STP, kemudian terpilih menjadi 60 STP. Dan pada akhirnya setelah dilakukan seleksi tahap akhir, ditentukan sebanyak 22 STP mendapat alokasi dana APBN.

Noce berharap STP Kota Kupang menjadi salah satu dari 22 STP yang mendapat alokasi dana dari APBN. Namun, pihaknya juga tidak akan berkecil hati jika STP yang akan diwujudkan tidak termasuk dalam daftar STP di Kemenristek dan Dikti. "Kalau tidak ada, mungkin belum se-

karang. Kita tidak usah berlarut untuk hal itu, yang penting wacana sudah ada," Tuturnya.

Peningkatan kapasitas BPP

BPP Kota Kupang menurut Noce, harus fokus kepada tupoksi lain yang sama pentingnya seperti peningkatan kapasitas peneliti dan pengembangan lembaga. Seperti fokus pada program pembuatan jurnal ilmiah dalam versi *online* (OJS), laman informasi kelitbangan (*website*), dan laboratorium data.

Jurnal Inovasi Kebijakan sudah dibentuk dan terbit perdana pada November 2016. Jurnal tersebut sudah dalam versi *Online Journal System* (OJS). Namun, menurut Noce jurnal tersebut masih terbatas pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

"Jurnal ini sudah mendapat izin penerbitan dari PDII LIPI (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dengan *International Standard of Serial Number* (ISSN): 2548-2165 dan dapat diakses dengan alamat *jurnalinovkebijakan.com*, meskipun belum terakredi-

tasi," ucapnya.

Tapi aral tak bisa dihindari, lagi-lagi pengelolaan jurnal harus juga terkendala masalah teknis seperti tidak adanya pengelola, khususnya yang terampil dan mampu menguasai teknologi informasi. Selain itu, anggaran BPP Kota Kupang yang minim, tidak akan mampu membuat jurnal bisa eksis dalam waktu dekat. BPP Kupang hanya berharap BPP Kemendagri sebagai induk BPP daerah dapat memerhatikan hal tersebut. "Berharap ada bimbingan lebih lanjut, lebih bagus jika memberikan anggaran," Tukas Noce.

Selain jurnal, upaya meningkatkan kapasitasnya juga ditunjukkan menjadikan BPP Kota Kupang terus berkembang menjadi pusat penelitian di Kota Kupang. Sesuai dengan visinya yakni bercita-cita menjadikan hasil penelitian dan pengembangan (Litbang) sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan daerah dalam mewujudkan Kota Kupang sebagai kota berbudaya, modern, produktif dan nyaman yang berkelanjutan.

"Meski baru kami senantiasa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah, meningkatkan SDM, sarana dan prasarana serta kelembagaan BPP yang berkualitas, profesional dan kompetitif, mendayagunakan hasil kelitbangan sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan secara berkelanjutan, meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan BPP dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan," tandasnya.

Ada beberapa rekomendasi hasil penelitian BPP Kota Kupang yang telah dimanfaatkan oleh beberapa SKPD lingkup pemerintah Kota Kupang seperti kajian mengenai sampah (telah dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang), kajian mengenai PKL (Pedagang Kaki Lima) (telah dimanfaatkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang), kajian mengenai UKM (telah dimanfaatkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang), dan kajian mengenai parkir (telah dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang). "Kami tentu tidak akan puas diri sampai di sini, kami ingin mengembangkan penelitian bahkan dari daerah yang dianggap pelosok sekalipun," terangnya. (MSR/IFR)

Jogja, Alam, dan Keberagaman

Setelah makan di daerah Suryataman, Danurejan, Yogyakarta, di satu rumah makan terkenal yang digemari orang Jogja, *Media BPP* bermaksud mengunjungi beberapa tempat yang menjadi destinasi wisata di Jogja dan Magelang. Semangkuk soto ayam lengkap dengan kerupuk, satu buah tahu penyet dan satu tusuk sate usus membuat rasa lapar barangkali baru muncul nanti malam.

Lima menit melaju, mobil berhenti di bawah billboard "Jogja Istimewa". Lampu merah tengah menyala rupanya. Slogan tersebut diciptakan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Slogan yang memang cocok untuk Yogyakarta. Di Jogja orang hidup beragam suku dan golongan, para pelajar dari berbagai latar belakang Suku, Agama, Ras, dan pelosok negeri berkumpul di kota ini. Berbeda dengan Jakarta yang sangat sensitif dengan isu SARA, di Jogja hampir tidak pernah menemukan kegaduhan, masyarakatnya hidup rukun saling menghargai.

Sebagai bagian dari Indonesia, Jogja telah berhasil mewujudkan substansi demokrasi secara unik. Itulah salah satu keistimewaan dari Jogja. Di dalamnya, juga terdapat keistimewaan kultural yang menjunjung tinggi harmonisitas, Jogja mampu mengelola konflik dan keragaman, sehingga terwujud mozaik indah yang harmonis dan kedamaian. Semakin lengkap ketika mengunjungi beberapa destinasi wisata andalannya yang sarat dengan simbol kebhinnekaan seperti candi-candi dan keindahan wisata alamnya yang menjadi primadona saat ini, di antara destinasi wisata yang *Media BPP* kunjungi adalah Candi Borobudur, Embung Ngelanggeran, Air Terjun Srigetuk, Candi Prambanan, Tebing Breksi, Candi Ijo, Komplek Wisata Taman Sari, dan beberapa wisata kuliner yang sayang jika dilewatkan.

Candi dan simbolisme keberagaman

Candi-candi di Nusantara memunyai kekayaan simbolisme dan kualitas arsitektur yang menakjubkan. Terlebih ketika UNESCO memberikan pengakuan atas kekayaan peradaban Nusantara tersebut. Selama dua hari *Media BPP* berkunjung ke beberapa candi di Jogja, serta berkunjung ke Candi Borobudur di Magelang.

Selama hampir 40 kilometer mobil melaju kencang di jalan Jogja-Magelang hingga tiba di pertigaan memasuki arah Borobudur. Di ujung jalan yang membelah persawahan, tetes-tetes air terus berjatuhan mengetuk-ngetuk atap mobil. Air juga terus meluncur dari pohon-pohon mahoni yang daun-daunnya tak sanggup menanggung deras hujan. Udara terasa dingin.

Satu jam berlalu, kemegahan Candi Borobudur nampak dari kejauhan. Elpino salah satu *Tim Media BPP* memarkir mobil di sudut parkir. Hujan baru saja reda, menyisakan butiran embun di dedaunan, kemudian jatuh tertiuip angin yang berembus siang itu. Berbeda dengan beberapa tahun lalu ketika *Media BPP* berkunjung ke sini, kompleks Candi Borobudur semakin tertata dengan baik.

Enam tiket dengan harga masing-masing Rp 120 ribu untuk dewasa dan Rp. 30 ribu untuk anak-anak bisa didapatkan di sebelah kiri pintu masuk menuju candi. Itu untuk turis lokal, berbeda harga dengan tiket turis luar negeri atau ketika masuk di pagi buta untuk menyaksikan matahari terbit di pucuk Borobudur.

Borobudur adalah candi raksasa dan terbesar di Indonesia. Dikutip dari situs *1001 Indonesia.net*, Candi Borobudur memunyai ciri lain yaitu punden berundak (dengan kemiripan seperti piramid). Dibangun pada

abad ke-8, Candi Borobudur menjadi bukti pertemuan peradaban Budha-Hindu, termasuk juga pembentuk peradaban Nusantara.

Ciri ini mengingatkan tingkatan hidup masyarakat Nusantara. Borobudur memunyai relief di masing-masing tingkatannya. Dua di antaranya adalah relief *karmawibhanga* di selasar bawah, yang kemudian ditutup selasar sebagai pondasi untuk memperkuat berdirinya candi. Relief yang terkenal tentu saja *lalitavistara*. Relief ini mengisahkan kehidupan Budha sejak sebagai pangeran sampai mencapai bodhisatva. Yang juga impresif adalah adanya stupa dengan patung Budha seukuran manusia. Patung sejumlah 504 buah ini memunyai sikap tangan yang berbeda, yang masing menunjukkan simbol-simbol Budha dalam spiritualitas Budha.

Warung-warung *souvenir* berderet mengular di sepanjang pintu keluar kompleks candi. Salah satu warung kopi yang *Media BPP* datangi menghadap ke tempat parkir, menjual nasi rames, kopi, gorengan dan makanan ringan pabrikan. Tinah (60), salah seorang penjual makanan sudah turun temurun berdagang, termasuk anak cucunya yang sudah memiliki kios di sana.

Tinah sudah puluhan tahun berjualan, ia menjadi saksi ketika kelompok ekstremis membombardir sembilan buah stupa Borobudur pada 1985. Tinah tidak ingin kejadian tersebut terulang kembali saat ini, ia yakin saat ini keamanan lebih terjamin. Tinah sadar, kelompok ekstremis adalah oknum yang mengatasnamakan agama. Menurut Tinah, masyarakat yang hidup di sekitar Borobudur, dari dulu hingga sekarang selalu bangga dan menjaga Borobudur, dari berbagai latar belakang golongan termasuk di antara pada pedagang yang menjadi teman-temannya. Masyarakat di sekitar Borobudur kian menunjukkan kebhinnekaannya dalam berbagai kegiatan dan hidup rukun. Semakin bangga ketika Borobudur diakui dunia.

"Sekarang sudah tidak ada lagi masalah kalau orang Budha mengadakan Waisak, misalnya, semua agama hadir di sini, sama ketika ada acara besar ke-Islaman masyarakat non muslim juga biasanya hadir kalau diundang," tegas Tinah.

Selain keamanan, sebagai pedagang kecil, Tinah juga berharap kenyamanan pengunjung bisa lebih ditingkatkan oleh pemerintah dan pengelola candi. Khususnya tidak mengecewakan para turis baik lokal maupun asing ketika datang ke Borobudur. Banyaknya pengunjung memberikan manfaat, sehingga keberadaan candi tersebut memberikan manfaat besar dan bisa mengangkat perekonomian warga sekitar.

Berbeda dengan Candi Borobudur, Candi Prambanan terletak di sebelah timur Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan Klaten, Jawa Tengah. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan candi ini dibangun, namun kuat dugaan, Candi Prambanan dibangun sekira pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Maha Sambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi Prasasti Siwagrha yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangka 778 Saka (856 M) ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan.

Pada 1773 C.A Lons melaporkan penemuan baru bangunan terbesar yaitu Candi Syiwa. Upaya penggalian dan pencatatan pertama dilaksanakan di bawah pengawasan Groneman. Penggalian diselesaikan pada tahun 1885, meliputi pembersihan semak belukar dan pengelompokan batu-batu reruntuhan candi. Prambanan terkenal dengan kisah klasiknya tentang seorang bernama Joko Bandung Bondowoso, pemuda yang tergilagila dengan kecantikan Roro Jonggrang anak dari Raja Boko. Istana Ratu Boko tidak jauh dari prambanan.

Media BPP memilih menggunakan pa-

ket wisata Prambanan dan Ratu Boko. Seharga Rp 50 ribu perorang dewasa dan setengahnya untuk anak-anak. Mobil yang telah disediakan mengantarkan *Media BPP* menuju Istana Ratu Boko. Butuh 25 menit untuk tiba di peninggalan istana tersebut menggunakan mobil. Peninggalan Ratu Boko terletak di sebelah utara Prambanan tepat di atas ketinggian 196 mdpl. Istana Ratu Boko adalah situs arkeologi yang beda dari situs-situs serupa. Istana Ratu Boko merupakan bekas kompleks istana yang terdiri atas beberapa bagian bangunan dengan luas 250.000 meter persegi.

Dari Prambanan *Media BPP* kembali menuju Jalan Piyungan dan berbelok ke Jalan Candi Ijo. Sekira 9 kilometer melalui jalan lurus menanjak, *Media BPP* tiba di kawasan Candi Ijo di ketinggian 375 mdpl. Sebagian jalan menuju candi masih rusak, lubang jalan banyak ditemui. Sesekali Elpino harus bersusah payah memilih jalan yang bagus atau bahkan harus mengambil ancang-ancang di tengah tanjakan. Mungkin itu penyebab Candi Ijo tidak terlalu ramai dengan wisatawan.

Candi Ijo masih tergolong candi Hindu. Candi ini sangat istimewa karena lokasinya yang berada di atas bukit. Di Candi Ijo kita akan melihat hamparan kota Yogyakarta seujung mata memandang. Seperti kebanyakan candi pada umumnya, candi sebagai tempat ritual masyarakat pada masa-masa selalu dibuat di ketinggian yang dimaksudkan agar lebih dekat dengan sang pencipta.

Alam dan keharmonisan

Tidak hanya situs peninggalan kejayaan peradaban Nusantara, Jogja juga dikenal memiliki tempat-tempat wisata alam yang indah untuk dikunjungi, *Media BPP* mengunjungi beberapa tempat wisata andalan Jogja di antaranya, Embung Ngelanggeran, Air Terjun Sri Getuk, dan Taman Wisata Taman Sari.

Malam segera berganti, bersama hilangnya embun pagi, *Media BPP* berencana mengunjungi salah satu objek wisata yang terbilang baru di Gunung



Kidul. Adalah Embung Ngelangeran yang terletak di bawah bukit Ngelangeran, Patuk, Gunung Kidul. Sejak diresmikan oleh Gubernur DIY pada 2013, objek wisata Embung Ngelangeran terkenal ke seantero Nusantara. Keindahannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Setidaknya itulah kesimpulan *Media BPP* ketika berkunjung ke sana.

Sayangnya untuk menuju ke tempat tersebut, pengunjung harus sedikit bersabar, tiga kilometer menuju lokasi kondisi jalan bervariasi dari sekadar aspal tipis hingga makadam, beberapa ruas memang sudah dilakukan pengecoran, namun di beberapa ruas lain lumpur masih terus menempel di kendaraan.

Menuju Embung Ngelangeran wisatawan akan disugahi keasrian alam dan hutan di kanan dan kiri jalan. Tidak banyak permukiman, namun banyak lalu lalang kendaraan. Semakin sedikit bahkan tidak ada ketika mobil berbelok memasuki tikungan menanjak. Diiringi suara jangkrik dan gemuruh angin, mobil terus melaju pelan di bawah Gunung Api Purba. Sesekali *Media BPP* ketakutan mobil tidak bisa melewati *track*, namun itu tidak masalah dan berhasil dilewati.

Embung adalah sebutan untuk danau buatan. Embung ini menjadi unik selain berada di ketinggian dengan latar belakang pemandangan indah di antara bebatun Gunung Api Purba dan

sebagian Kabupaten Gunung Kidul juga dibuat dengan terpal karet yang didatangkan khusus dari Korea Selatan. Memasuki tempat wisata tersebut setiap pengunjung dikenakan biaya Rp 3 ribu dengan Rp 5 ribu untuk parkir mobil. Tujuan utama dibuat embung atau waduk buatan tersebut adalah untuk pengairan kebun buah yang dipersiapkan di sekelilingnya.

Bergerak ke utara sekira 22 kilometer dari Embung Ngelangeran kita akan disugahi pemandangan alam lainnya yaitu Air Terjun Sri Gethuk. Lama perjalanan yang bisa ditempuh dari Embung Ngelangeran adalah 40 menit menggunakan kendaraan roda empat. Menuju wisata Air Terjun Sri Gethuk pengunjung tidak perlu khawatir, karena jalanan cukup bagus.

Pemandangan yang disuguhkan ketika memasuki area wisata ini juga tidak kalah menarik, beberapa kilometer menuju lokasi pemandangan kayu putih di kanan kiri jalan berubah menjadi pohon jati. Tiba di lokasi *Media BPP* berjalan kaki melewati jalan setapak melalui pemandangan sawah hijau berhiaskan nyiur kelapa, sebenarnya bisa saja dengan menggunakan perahu melawan arus sungai Oya. Sayang sekali, saat itu perahu tidak bisa *Media BPP* naiki, salah satu petugas setempat berkata arus sungai sedang besar, di atas sedang turun hujan.

Air Terjun Sri Gethuk terdapat di

Desa Wisata Bleberan, Gunung Kidul. Satu kilometre menuju air terjun gemuruhnya mulai terdengar, beberapa saat kemudian, Sri Gethuk tepat di depan mata. Bebatuan yang indah di bawah air terjun membentuk undak-undakan. Mengunjungi Sri Gethuk saat itu, *Media BPP* tidak bisa dikatakan sial, karena kondisi sungai Oya yang tidak memungkinkan karena banjir besar dan warna air yang kecoklatan, namun *Media BPP* bisa menikmati keindahan air terjun dan berfoto membelakanginya di antara bebatuan.

Seorang pemilik warung mengatakan air terjun yang terletak di antara ngarai Sungai Oya tersebut selalu mengalir sepanjang tahun tanpa mengenal musim, jika tidak musim hujan pemandangan di sepanjang Sungai Oya sangat bagus dan menjadi destinasi utama wisatawan menyusuri sungai tersebut.

“Kebanyakan pengunjung selain menikmati keindahan air terjun juga mereka berenang di sungai, kalau tidak banjir airnya alami dan bagus, loncat dari bebatuan, karena dalam juga sungainya,” kata pedagang.

Eksotisme Sri Gethuk selalu dikaitkan dengan Grand Canyon di utara Arizona, Amerika yang identik dengan aliran sungai yang mengalir membelah tebing-tebing tinggi. Gunung Kidul sebagai wilayah kering dan tandus juga ternyata memiliki keindahan alam

la, Tebing Breksi menjadi salah satu destinasi yang di datangi *Media BPP* beberapa waktu lalu. Pada 2015, Sri Sultan Hamengku Buwono X meresmikan Tebing Breksi sebagai cagar budaya. Sebelumnya bukit yang berada di Sambirejo, Sleman, DI Yogyakarta ini merupakan lokasi tambang batu breksi yang menjadi pendapatan utama warga sekitar. Tebing tersebut juga merupakan bongkahan tebing dengan beberapa sisi yang dipahat oleh seniman lokal.

Terdapat pula tangga-tangga yang mengantarkan ke puncak tebing, dan bisa melihat pemandangan Jogja dari atas, di kaki tebing juga terdapat Talatar Seneng, sebuah *amphitheatre* yang sering digunakan sebagai tempat pertunjukkan. Salah seorang warga mengatakan, teater tersebut juga pernah digunakan musisi terkenal Dewa Bujana melakukan konser musik.

Menjelang sore perjalanan *Media BPP* berhenti di Kota Yogyakarta, Taman Sari adalah tujuan wisata selanjutnya. Taman sari hanya dibuka hingga pukul 17.00 WIB. Beruntung sat itu pemandu terbesar hati menemani *Media BPP* berkeliling sekitar kompleks Taman Sari.

Taman Sari sering dikaitkan dengan Istana air yang penuh keindahan dan rahasia di dalamnya. Selain arsitektur kuno, danindahannya, lokasi Taman Sari juga cukup besar, setiap lorong-lorong dan bangunannya memberi kesan masih banyaknya rahasia yang harus terus digali di tempat tersebut. Perlu seharian untuk mencari tahu sejarah pembangunan situs tersebut.

Berada di Taman Sari seperti berada di abad ke-17 pada masa kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ketika dipimpin oleh Sri Sultan HB I. Taman Sari dibangun oleh arsitektur yang didatangkan khusus dari Portugis, dengan luas 10 hektar dan memunyai 57 bangunan yang terdiri dari kompleks pemandian, danau buatan, pulau buatan, jembatan gantung, kanal air, taman, lorong bawah tanah, hingga gedung dengan arsitektur bergaya Eropa, China, Jawa, Hindu, Budha, dan Islam.

Saat ini bangunan Taman Sari tidak lagi seperti yang terbayang, hampir seluruh areanya telah berbaur dengan pemukiman penduduk. Tidak ada jarak, dinding luar bahkan dipakai dinding rumah. Untuk berkeliling pen-

inggalan kompleks tersebut, *Media BPP* harus masuk ke pemukiman dan gang sempit di balik rumah-rumah warga. Seorang pemandu mengatakan kepada *Media BPP*, awalnya setelah kejadian gempa di masa kesultanan setelah HB I, situs Taman Sari tidak lagi dipakai. Danau buantannya hancur dan sebagian bangunan rusak. Karena dibiarkan tersebut, kemudian warga masyarakat termasuk para *abdi dalem* dan keluarga mereka mendirikan rumah-rumah di sekitarnya, hingga turun ke anak-cucu mereka. Baru kemudian setelah UNESCO membiayai untuk dilakukan renovasi, Taman Sari dibuka untuk wisata.

“UNESCO juga hanya bisa membiayai kolam pemandian untuk dilakukan renovasi, susah kalau dikembalikan seperti semula, karena banyak warga yang sudah tinggal di sini puluhan tahun,” ucap pemandu.

Perjalanan *Media BPP* pun harus berakhir di Gedung Kenongo yang merupakan gedung tertinggi di Taman Sari. Di gedung ini pula pengunjung bisa menikmati matahari terbenam yang memesonakan. Seluruh kompleks Taman Sari pun bisa dilihat dari sini.

Menjelang malam *Media BPP* melanjutkan perjalanan ke selatan Kota Jogja untuk menikmati kuliner khas Jogja. Sebagai surga kuliner, tidak lengkap jika tidak mengunjungi salah satu destinasi kuliner Jogja Sate Klatak Pak Pong yang terletak di Imogiri, Bantul Yogyakarta. Di tempat ini kita bisa menemukan cara unik menikmati sate kambing. Sate klatak tidak dihadangkan dengan menggunakan tusuk bambu melainkan dengan jeruji besi sepeda. Selain itu keunikan bumbunya yang hanya menggunakan taburan garam dengan sedikit ketumbar. Sate Klatak buka dari pukul 10.00 pagi hingga pukul 12.00 malam, satu tusuk sate klatak dibanderol seharga Rp 14.000, harga yang murah bahkan jauh dari rasanya yang lezat dan enak.

Provinsi DIY masih menyisakan banyak tempat wisata alam dan sejarah yang unik dan bagus untuk dijadikan referensi perjalanan selanjutnya. Selain Harmonis Jogja merupakan daerah yang romantis. Jogja mempertemukan kokohnya gunung dan candi-candi, birunya laut, hijaunya alam, dan terangnya langit dalam sebuah senja. (MSR)



serupa, Gemuruh Sungai Oya dan Air Terjun Sri Gethuk seolah menjadi pemecah keheñingan bumi Gunung Kidul yang terkenal kering.

Di hari berbeda, pukul 13.00 WIB ketika matahari tepat di atas kepa-

Perpustakaan Sumatera Utara

TERBAIK KE 2 SE-INDONESIA

Sekolompok anak muda Medan tengah asyik membaca. Mereka nampak tenang, dan beberapa di antaranya tengah mencari buku di lorong rak perpustakaan daerah. Para remaja yang mayoritas mahasiswa itu biasa menghabiskan waktunya di perpustakaan 4 lantai milik pemerintah daerah itu, atau mereka biasa menyebutnya Perpustakaan Daerah Sumatera Utara.

Bangunan gedung perpustakaan yang baru direnovasi 2015 lalu nampak berdiri mewah dengan dominasi cat putih dan balkon berwarna krem. Selama tiga bulan tahap renovasi, perpustakaan ini sempat menutup pelayanannya. Kini perpustakaan yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Medan No 45 ini sudah lebih baik, dengan fasilitas membaca yang nyaman seperti komputer, *Wifi Gratis*, dan koleksi buku yang selalu *up to date*.

"Kami berusaha untuk selalu meningkatkan pengunjung dengan fasilitas yang nyaman. Pemerintah daerah sudah memberikan anggaran sebesar Rp 18 triliun agar minat membaca masyarakat semakin meningkat," kata Hasangapan Tambunan, Kepala Perpustakaan Sumatera Utara.

Mendapat penghargaan

Selain itu, persoalan pelayanan publik selalu mereka tonjolkan agar bisa mencapai target maksimal. Hal itu terjawab dalam sebuah pencapaian nasional. Perpustakaan Sumatera Utara berhasil meraih peringkat kedua terbaik dari 13 perpustakaan di Indonesia hasil survei Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2016. Posisi ini naik signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya berada di peringkat 12. Artinya posisi ini terbalik, dari semula peringkat dua dari belakang, kini peringkat dua dari depan.

"Survei Kemendagri mengatakan, perpustakaan Sumut masuk peringkat



kedua setelah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang masuk peringkat pertama. Ini cukup baik jika kita bandingkan tahun lalu yang hanya masuk peringkat 12," ungkapnya.

Survei ini merupakan beberapa pengukuran dari beberapa indikator, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, anggaran pengelolaan perpustakaan, jumlah rata-rata pemus-

taka per bulan yang berkunjung, dan jumlah koleksi judul buku yang dimiliki. Selain itu, penilaian juga berdasarkan jumlah perpustakaan yang pembinaannya menjadi kewenangan provinsi. Perpustakaan Provinsi Sumut memang sangat rajin memberikan pembinaan kepada perpustakaan sekolah menengah atas/madrasah aliyah dan perpustakaan khusus di provinsi tersebut.

Ramai pengunjung

Mereka juga rajin menerima dan mengumpulkan karya cetak dan karya rekam yang diterima perpustakaan milik provinsi, serta jumlah promosi gemar membaca (dalam satu tahun) pada perpustakaan ini melonjak tajam.

Dari indikator jumlah rata-rata

Koleksi buku yang lengkap

Tidak hanya itu, yang membuat pengunjung ramai-ramai datang ke sana ialah jumlah koleksi buku yang sangat lengkap. Mulai dari buku umum, agama, filsafat, sains, politik, hukum, sosial, ekonomi, dan masih banyak lagi. Bahkan hingga saat ini tercatat ada 324.523 buku koleksi dalam perpustakaan tersebut.

eri, seperti China dan Belanda yang belum lama datang berkunjung. Kemarin peneliti dari China datang ingin meneliti terkait otonomi daerah, dan yang dari Belanda datang ingin meneliti mengenai pelayanan masa kolonial. Itu semua buku hanya boleh baca di sini, dalam ruangan Deposit. Karena itu buku langka ya," terang Syafrijal salah satu staf Perpustakaan Sumut yang ditemui oleh *Tim Media BPP* beberapa bulan lalu.

Koleksi buku yang lengkap juga seringkali menjadi even bagi mereka merayakan pesta pameran buku terluas, bagi mereka yang ingin membaca dan meminjam koleksi buku Perpustakaan Sumatera Utara itu. "Kami selalu sosialisasikan apabila ada koleksi buku terbaru yang datang, biasanya kami beritahu masyarakat melalui media sosial di *Facebook BPAD Provinsi Sumatera Utara* atau web kami di *bpadsumut.blogspot.co.id*," paparnya

“

SURVEI Kemendagri mengatakan, perpustakaan Sumut masuk peringkat kedua setelah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang masuk peringkat pertama.

Sukses membina daerah

Selain sukses di dalam, Perpustakaan Sumut juga meraih juara satu nasional untuk lomba bercerita rakyat tingkat SD/MI. Sekolah Matauli Sibolga Tapteng juga meraih juara III tingkat nasional untuk perpustakaan sekolah terbaik se-Indonesia. Semuanya merupakan binaan dari Perpustakaan Sumatera Utara

"Kalau nanti kita bisa dapat lagi prestasi tingkat nasional, maka bisa saja mengalahkan Yogyakarta yang selama ini dinilai cukup tinggi untuk tingkat minat baca, karena dari survei Kemendagri kita sudah peringkat ke dua. Kita juga masuk juara pertama lomba bercerita dan perpustakaan sekolah tingkat nasional," tutupnya. (IFR)

perpustakaan yang berkunjung dalam satu tahun terakhir tertera kalau perpustakaan Sumut sudah dikunjungi lebih dari 110.000 orang. "Kalau kenyataannya sekarang sudah lebih dari jumlah itu, karena dalam sehari rata-rata pengunjung 300 orang, dan kalau Sabtu dan Minggu bisa mencapai 500 orang," paparnya.

Perpustakaan yang berdiri sejak 23 Mei 1956 itu memang selalu memanjakan pemustakanya dengan koleksi yang lengkap. Bahkan untuk buku-buku yang sulit ditemui dan terbilang langka, mereka satukan dalam wadah ruangan yang bernama Deposit. "Banyak pengunjung di sini juga salah satunya peneliti, bahkan ada peneliti dari luar neg-

PILKADA DKI Jakarta 2017



sandaran apalagi untuk memastikan pasangan calon mana yang akan terpilih dalam Pilkada nanti.

Ucapan senada dilontarkan oleh Kuskrido Ambardi Pakar Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada. Ia mengatakan perbedaan metode yang dilakukan oleh semua lembaga

ga survei untuk melihat kemungkinan benar atau salah dari prediksi tersebut, menurutnya hasil survei hari ini belum tentu memiliki kesamaan kondisi dan konteks saat hari pencoblosan. Ada banyak kondisi yang sulit ditebak pada hari-hari mendatang. Maka, perlu berhati-hati bila menafsirkan hasil survei sebagai gambaran hasil akhir pemilihan.

"Kemudian kalau hasil akhirnya sama, jangan-jangan itu kebetulan? Beberapa waktu lalu di pilkada sebelumnya misalnya, ada lembaga yang mengumpulkan hasil-hasil survei dari semua lembaga survei, kemudian diambil tengahnya, lalu dia yang kemudian paling tepat. Ada kebetulan-kebetulan yang tidak bisa dihindari, kita harus melihat ke situ, dan apa pun yang kita lakukan hari ini akan dihakimi setelah 15 Februari," katanya.

Ucapan Kus, boleh jadi benar, pasalnya dalam hitung cepat Pilkada DKI 15 Februari lalu, menunjukkan perbedaan mencolok antara hasil survei yang dilakukan dengan hasil hitung cepat maupun hasil KPU.

Hasil Survei beberapa lembaga survei menjelang pencoblosan di antaranya Litbang Kompas menempatkan pasangan nomor urut satu memperoleh 28,2 persen suara, pasangan nomor urut dua 36,2 persen suara, dan nomor urut tiga 28,5 persen suara.

Selain itu LSI Denny JA menempatkan Agus-Sylvi memimpin dengan 30,9 persen. Disusul dengan Ahok-Djarot 30,7 persen dan Anies-Sandiaga 29,9 persen.

Beberapa hasil survei berbeda dengan hasil *quick count* di hari pencoblosan. Litbang Kompas menghitung 17,37 persen untuk pasangan nomor satu, 42,87 persen untuk pasangan nomor dua, dan 39,76 persen untuk pasangan nomor urut tiga.

Sementara LSI menghitung 16,87 persen suara Agus-Sylvi, 43,22 persen suara Ahok-Djarot, dan 39,91 persen suara Anies-Sandi.

Fenomena tersebut memperlihatkan beberapa angka hasil survey tidak sama bahkan jauh dengan hasil suara di hari pencoblosan.

(MSR)

PERANG LEMBAGA SURVEI DI PILKADA DKI

Pada Januari 2017, sebanyak lima lembaga survei merilis hasil temuannya terkait Pilkada DKI Jakarta. Dua lembaga survei unggulkan Agus Hanumurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Dua lembaga lainnya nominasikan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syahiful Hidayat.

ELEKTABILITAS PASANGAN CALON PILKADA DKI



HASIL SURVEI BISA DICEK SETELAH 15 FEBRUARI

Memasuki Pilkada, tidak sulit menemukan rilis survei yang dilakukan terhadap ketiga calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Beberapa lembaga survei intens merilis elektabilitas pasangan cagub-cawagub tiap pekan dengan hasil yang berbeda-beda. Semua lembaga survei mengklaim, teknologi dan metodologi yang digunakan dalam melakukan *sampling* merupakan yang paling baik dengan tingkat kepercayaan 90 persen. Kreadibilitas lembaga survei menjadi pertanyaan ketika hasil survei dipertanyakan.

Hingga awal Februari, setidaknya lima lembaga survei merilis hasil survei terhadap ketiga pasang cagub-cawagub

DKI, kelima lembaga tersebut adalah Poltracking, Indikator Politik Indonesia, Charta Politika, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Hasil survei kelima lembaga riset tersebut mengisyaratkan satu kesimpulan yang sama, yaitu Pilkada DKI 2017 diprediksi bakal berlangsung dalam dua putaran. Pasalnya, tidak ada satu pun pasangan calon yang tingkat keterpilihannya mencapai 50 persen, baik itu pasangan Agus-Sylvi, Ahok-Djarot, maupun Anies-Sandi.

Pada Januari lalu bahkan lembaga survei di bidang marketing juga ikut mensurvei ketiga pasang calon dan sempat membuat pro kontra di masyarakat bahkan antar lembaga

survei. Adalah GRP (Grup Riset Potensial) sebuah lembaga *marketing research group* yang mengeluarkan hasil survei jauh berbeda dengan lembaga survei lainnya. Menariknya, GRP menempatkan salah satu pasangan calon berada jauh di atas lawan-lawannya dengan dukungan hingga 45 persen, padahal beberapa lembaga survei menempatkan pasangan tersebut bebeda tipis dari lawannya bahkan selalu paling buncit.

GRP menggunakan metodologi berbeda. Teknik statistik yang digunakannya adalah regresi multinomial logistik (*multinomial logistic regression*). Teknik yang terbilang baru, karena selama ini lembaga survei menggunakan teknik *sampling*

acak bertingkat (*multistage random sampling*). GRP mengklasifikasi 267 kelurahan menjadi 27 kategori kelurahan dengan jumlah sampel 100 per-kelurahan tersebar di seluruh RW.

Terkait fenomena tersebut, direktur CSIS sekaligus Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Phillips Jusario Vermonte angkat bicara. Menurutnya tidak perlu membantah dan menegasi hasil survei atau riset GRP. Apa yang dilakukan GRP menurutnya menjadi penting dalam konteks mengembangkan diskursus survei dan kajian ilmu politik berbasis data di Indonesia. "Yang jelas riset GRP itu menarik dan menyenangkan, karena ia telah membuka ruang baru dalam pengembangan ilmu politik di Indonesia," terangnya.

Phillips juga mengatakan, hasil survei itu penting. Survei juga merupakan cerminan aspirasi responden, hanya pada saat survei dilaksanakan. Namun, hasil survei tidak bisa dijadikan

survei sah-sah saja, namun harus dijelaskan agar memunyai kreadibilitas. Apapun yang dihasilkan lembaga survei saat ini, pada akhirnya harus bisa memprediksi Pilkada DKI Jakarta. Menurutnya, adalah hal yang percuma jika dengan berbagai kecanggihan yang dilakukan namun meleset dari perkiraan. "Kan sama sekali tidak ada artinya," kata Kus.

Lembaga survei harus memunyai justifikasi terhadap prediksi survei, sehingga bisa meyakinkan hasil prediksi. Menurut Kus, dibalik hasil-hasil lembaga survei sebenarnya ada kecemasan dari lembaga survei, di antaranya hasil akhir pilkada tidak selalu sama dengan hasil survei dan ketidakhadiran responden ke TPS. "Kita kadang merasa yakin dengan kontrol kualitas, namun kita tidak memikirkan bagaimana kalau kemudian yang kita survei tidak datang ke TPS. Kan tidak ada hubungannya statistik yang diperdebatkan, kalau ditanya mana buktinya, lembaga survei mau jawab apa?" ucapnya.

Untuk itu, Kus mengajak semua lemb-

KETUA HIMPENINDO PROF. BAMBANG SUBIYANTO

BELAJAR DARI GAYA PENELITIAN JEPANG

Bagi Bambang Subiyanto, menjadi peneliti bukanlah perkara yang mudah. Peneliti berarti ujung tombak penentu kemajuan suatu bangsa. Banyak hal yang ia dapat dari berbagai temuannya di berbagai negara, terutama di Jepang. Belasan tahun menimba ilmu dari negeri Sakura itu, membuat Bambang berhasil menjembatani hubungan penelitian Indonesia dengan Jepang.

DISIPLIN adalah satu hal yang pertama kali dia pelajari saat melakukan studi ke Jepang. Bukan hal yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan kondisi baru. Apalagi metode penelitian Jepang yang serba ada dan tercukupi.

Berawal dari studi lapangan ke Jepang, setelah menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan IPB pada 1982, Bambang muda, berangkat ke Jepang atas tugasnya menjadi peneliti muda di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Di Negeri Matahari Terbit itu, ia banyak belajar dari peneliti Jepang yang sangat lihai dalam mengelola limbah kayu dan hutan. "Mulanya saya ingin belajar dari sana, karena kebanyakan 50 persen limbah kayu di Indonesia itu terbuang percuma. Kalau di Jepang, mereka selalu memanfaatkan hasil hutan sekecil apapun," ungkapnya membuka percakapan.

Ditemui di ruangan Wakil Kepala LIPI, Bambang kembali mengingat awal mula dia tertarik menjadi seorang peneliti. "Yang saya tahu, Indonesia sangat kaya sekali SDA (Sumber Daya Alam)-nya, dan Amerika kaya akan SDM (Sumber Daya Manusia). Saya ingin menjadikan Indonesia itu negara yang maju dengan SDA dan SDM yang ada melalui dunia penelitian, untuk itu saya tertarik di dunia penelitian," ungkap suami dari Sekjen Kementerian PU itu.

Melalui Jepang itulah dia belajar bagaimana pengelolaan lahan yang baik dan menciptakan SDM yang mumpuni ketika pulang ke Indonesia. Menurut data yang ia peroleh, lebih dari 60 persen wilayah daratan Jepang atau seluas 24,081 juta hektare masih berupa hutan. Masih bertahannya luas hutan tersebut karena kontrol yang ketat dari pemerintah Jepang untuk melestarikannya.

Luas hutan di Jepang sekira 0,2 hektare/kapita sementara Indonesia jauh lebih luas dengan sekitar 0,75 hektare hutan/kapita. Kepemilikan dan pengelolaan hutan di Jepang juga dikelola oleh *Public/Private Forest* dan *National Forest*. *Public forest* yang luasnya sekira 68 persen, dimiliki oleh pemerintah daerah atau prefektur, kotamadya atau desa dengan luas 11 persen dari luas hutan.

Menurut dia, *private forest* Jepang yang dimiliki oleh perorangan, perusahaan, organisasi, kuil, biara dan sebagainya dengan luas sekira 57 persen dari luas hutan. Sementara *national forest* yang pengelolaannya berada pada naungan *Forestry Agency, Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery* mencapai seluas 7,8 juta hektare. "Kebijakan utama pemerintah Jepang di bidang kehutanan adalah mendayagunakan sumber daya hutannya untuk perlindungan tata air dan konservasi tanah," terangnya.

Lebih lanjut bapak tiga orang anak ini juga mengatakan konservasi sumber daya alam hayati, pemenuhan kebutuhan kayu dan hasil hutan lainnya bagi masyarakat Jepang dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi perlindungannya. Itulah yang membuat dia jatuh hati pada penelitian Jepang. "Saya ingin coba menerapkan itu di Indonesia," tandasnya.

Dapat beasiswa ke Jepang

Belajar banyak dari Jepang dari 1982 hingga 1988, berkenalan dengan berbagai professor ternama di Jepang, membuat Bambang berfikir kembali tentang jenjang pendidikannya sebagai seorang peneliti. Dalam hati ia selalu berkeinginan kuat melanjutkan jenjang pendidikannya ke magister dan doktor. Bambang lalu pulang ke Indonesia dan mengajukan beasiswa pendidikan kepada pemerintah Indonesia. Hatinya masih jatuh cinta dengan Jepang, sehingga dia ingin melanjutkan studi dan penelitiannya di Jepang. Barulah pada 1988 pria kelahiran Nganjuk, Jawa Timur itu diterima di Kyoto University dari hasil rekomendasi para professor kenalannya di Jepang. "Pada

1988 sampai 1992 saya melanjutkan studi magister dan doktor di Universitas Kyoto Jepang, di sana karena saya cukup lama, setelah lulus dan mendapatkan gelar doktor saya juga semacam jadi jembatan kerja sama penelitian Indonesia dengan Jepang," katanya.

Kerjasama dengan Jepang

Awal mula kerja sama itu, baru berupa laboratorium pengujian antara Indonesia - Jepang. Laboratorium Indonesia yang kurang memadai, biasanya didukung dan didorong dari uji laboratorium di Jepang, seperti memeriksa mikroba yang sangat kecil. "Karena saya punya rekan di Jepang, saya selalu minta tolong kerja sama laboratoriumnya," celotehnya.

Lalu seiring perkembangan waktu, kerja sama itu berkembang menjadi pengiriman peneliti Indonesia ke Jepang. Dari LIPI sendiri setiap tahun selalu mengirimkan 30 peneliti ter-

Pulang ke Indonesia Bambang tidak lama langsung diangkat menjadi Kepala Pusat Inovasi pada 2008 - 2013 dari sebelumnya pernah mencicipi jabatan sebagai Kepala Laboratorium Kayu dan Kepala UPT Bio Material pada 2002-2008. Karirnya terus menanjak, hingga pada 2014 sampai sekarang ia menjabat sebagai Deputy Bidang Jasa Ilmiah LIPI sekaligus Wakil Ketua LIPI.

Membentuk HIMPENINDO

Bambang tidak hanya memikirkan nasib SDM untuk internal LIPI dan perguruan tinggi saja, tapi ia juga banyak melihat masalah penelitian yang 'mandul' di berbagai lembaga non penelitian seperti BPP di setiap kementerian. "Permasalahan penelitian di kementerian itu biasanya masalah lingkungan yang tidak didukung penuh oleh pemerintah. Makanya dari situlah, Himpenindo (Himpunan Penelitian Indonesia) itu terbentuk," ungkapnya.

Secara garis besar, ia sebenarnya sepakat dengan cita-cita dari Presiden Joko Widodo yang mengimbau agar penelitian bisa terasa betul manfaatnya hingga ke masyarakat. Namun sayangnya, di beberapa kementerian belum tercipta ke arah seperti itu. "Kami ingin mengumpulkan seluruh peneliti di Indonesia, menyuarakan apa yang mereka inginkan supaya bisa didengar oleh pemerintah Indonesia. Selain itu Himpenindo juga sebagai wadah informasi penting seputar penelitian," terangnya.

Hasil pembentuk Himpenindo sendiri mengeluarkan namanya sebagai Ketua. Meski diakui belum banyak berkontribusi besar bagi kemajuan penelitian di Indonesia. Tapi dengan terciptanya semacam wadah peneliti ini, Bambang berharap ada nafas segar di tengah kegersangan penelitian Indonesia.

"Karena Himpenindo kan baru tiga tahunan, waktu pemilihan struktur organisasinya juga baru karena penunjukkan harus dari LIPI, maka saya terpilih lah menjadi ketua. Pada masa mendatang saya sepakat jika Ketua Himpenindo tidak harus dari LIPI dan bisa melalui *voting*," terangnya.

Bambang juga berharap Himpenindo bisa berkembang meng-cover aspirasi seluruh peneliti Indonesia. "Karena bangsa yang besar adalah bangsa dengan SDM dan SDA yang memadai. Penelitian itulah merupakan denyut jantungnya kemajuan bangsa," tutupnya. (IFR)

“**PERMASALAHAN** penelitian di Kementerian itu biasanya masalah lingkungan yang tidak didukung penuh oleh pemerintah. Makanya dari situ lah, Himpenindo (Himpunan Penelitian Indonesia) itu terbentuk.”

baiknya untuk *training program* penelitian. Kini tidak hanya itu, program kerja sama itu juga berupa pertukaran pelajar dengan seluruh dosen di berbagai perguruan tinggi se-Indonesia. "Saya ingin sekali Indonesia maju seperti Jepang dan negara-negara lainnya, untuk itu kita perlu membangun SDM yang kuat," tandasnya.

Sebenarnya bisa saja, usai menamatkan pendidikannya sebagai doktor, Bambang sempat ditawarkan bekerja di perusahaan elit Jepang. Namun, tekadnya untuk membesarkan ilmu pengetahuan di Indonesia, Bambang memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan mengabdikan pada lembaga yang membesarkan namanya, LIPI.

Naik jabatan

Tidak hanya menjadi jembatan kerja sama penelitian Indonesia - Jepang, yang kini masih berhubungan baik.

MENDAGRI SETUJU INSPEKTORAT DAERAH HARUS INDEPENDEN

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ingin agar inspektorat di daerah bersifat independen. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan setuju dengan gagasan KPK tersebut. "Ya, saya setuju," ujarnya di Hotel Discovery Ancol, Jl London Timur, Pademangan, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Tjahjo mengatakan langkah tersebut memang perlu direalisasikan karena selama ini Inspektorat daerah ditunjuk oleh kepala daerah. Menurutnya, hal itu mengakibatkan timbulnya rasa sungkan dari Inspektorat untuk menindak aparaturnya. "Fungsi Inspektorat daerah itu bagaimana, *kan nggak* mungkin Inspektorat Daerah sebagai bawahan kepala daerah yang mengatur laporan ke Sekda, bagaimana dia mau memeriksa pemda?" tuturnya.



Menurut Tjahjo, untuk saat ini fungsi KPK adalah supervisi. KPK langsung bersinergi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menindak kasus-kasus korupsi. Atas dasar itu juga, Tjahjo menginginkan independensi inspektorat daerah. "Ya, agar kepolisian dan kejaksaan makin optimal. Inspektorat harus independen dulu," kata Tjahjo.

Sebelumnya, KPK berpendapat kinerja Inspektorat daerah kurang maksimal karena ditunjuk oleh kepala daerah. Hal tersebut mengakibatkan tata kelola pemerintahan di daerah tidak berjalan optimal. "Untuk penyeimbang, kita ingin adanya Inspektorat independen. Syukur-syukur ada di bawah kendali presiden. Dan kalau independen, KPK bisa kerja sama dengan lebih baik," kata pimpinan KPK Alexander Marwata kepada wartawan di pendapa Gubernur Banten setelah memberikan ceramah koordinasi pemberantasan korupsi di Jl Syekh Nawawi Al Bantani, Selasa. (IFR/Tribunnews.com)



MENDAGRI AKUI BANYAK ORMAS YANG TAK TERDAFTAR

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan saat ini jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang tak terdaftar jauh lebih banyak ketimbang yang terdaftar.

Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi banyaknya ormas anarkis yang tak kunjung diproses secara hukum.

"Ormas yang tidak terdaftar itu melebihi jumlahnya dari yang terdaftar. UU memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berserikat," kata Tjahjo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Karena itu, kata Tjahjo, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Lewat PP tersebut, nantinya pemerintah akan terus memonitor aktivitas ormas di Indonesia. Hal yang akan dimonitor, yakni terkait azas yang dianut ormas beserta tujuan pendirian ormas.

"Nanti kami monitor mana ormas yang daftarkan dulu azasnya Pancasila tapi sekarang justru teriak-teriak antipancasila," ucap Tjahjo.

Tjahjo mengakui bila saat ini pemerintah memang belum memiliki teknis yang jelas untuk membubarkan ormas anarkis yang tak berbadan hukum.

"Kalau memang mau didetailkan harus direvisi, tapi *kan* ini PP-nya baru sebulan. Kita lihat dulu lah. Sementara ini biar kepolisian yang proses kalau ada gerakan ormas yang mengganggu ketertiban, melanggar hukum, dan menghina lambang negara," ucap Tjahjo. (IFR/Tribunnews.com)

KEMENDAGRI PASTIKAN DATABASE AMAN MESKI ADA TEMUAN E-KTP PALSU

JAKARTA - Penemuan 36 lembar e-KTP palsu pekan lalu sempat membuat heboh. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan data e-KTP palsu itu bukan didapat dari database Kemendagri.

"Semua data fisik e-KTP palsu berbeda dalam *data center*. Orangnya mengisi secara manual. Saat ini database kita aman, tidak ada log dan kebocoran, tidak ada *hacker*," ucap Zudan di Gedung A Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Dia pun menampik adanya anggapan bahwa data e-KTP palsu itu didapat dari server Kemendagri. Dia menduga data itu didapat dari website KPU.

"Yang dapat dibaca di server adalah data asli, bukan data palsu. Kemungkinan pelaku mengambil data dari website KPU yang menampilkan data DPT atau DPS pilpres, dan pilkada. Dari 2014, data kependudukan yang di-upload dilakukan untuk proses pemilu. Kemungkinan data dari sana," ujarnya.

Selain itu, Zudan menduga data pada fisik e-KTP palsu yang ditemukan juga berasal dari kartu keluarga yang hilang. Menurutnya, KK yang mengalami kesalahan pada pengisian data juga disinyalir menjadi sumber data yang digunakan pelaku. "Atau datanya diperoleh dari KK yang hilang atau salah *entry* tapi tidak dimusnahkan," imbuhnya.

Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta berhasil menemukan paket 36 e-KTP palsu yang dikirim dari Kamboja. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menduga hal itu hanya sebagai pengecoh.

"Saya duga itu ingin mengecoh kita. Dicitak di sini, mungkin di daerah Senen, Pramuka, atau di mana saja, dibawa ke Kamboja, kemudian dibawa lagi ke sini. Seolah-olah ada impor biar lebih heboh," ujarnya.

Zudan menyatakan tidak terdapat jual-beli blangko terkait

dengan penemuan e-KTP palsu itu. Dia pun berpendapat e-KTP palsu tersebut tidak akan digunakan untuk keperluan Pilkada DKI 2017. "Saya lihat dari jumlah, jika dikaitkan dengan Pilkada, maka jumlahnya sangat kecil, hanya 36. Hampir mustahil bisa mengangkat perolehan suara," imbuhnya.

Jika dikaitkan dengan Pilkada, Zudan mengatakan pengamanan di TPS sangatlah ketat. Menurutnya, niat itu tidaklah mungkin terjadi karena risikonya pun sangat besar. "Untuk memilih pada 1 jam terakhir bagi penduduk yang namanya belum ada di DPT, pengamanan di TPS juga berlapis. Risiko politik dan hukumnya sangat besar, ada pidana pemilu dan pemalsuan dokumen," tuturnya.

Dia menduga penerbitan e-KTP palsu oleh oknum yang belum diketahui identitasnya itu digunakan untuk hal lain. Zudan berpendapat kemunculan e-KTP palsu pada momen Pilkada DKI hanya memperkeruh suasana menjelang pemilihan. "Saya menduga untuk penipuan yang lain, misal di bank yang belum bekerja sama dengan Dukcapil. Bisa jadi, pelaku ingin mendelegitimasi Kemendagri dan memperkeruh suasana Pilkada DKI," ucapnya.

Dari temuan Ditjen Dukcapil Kemendagri, 36 e-KTP palsu berasal dari 10 kecamatan dan 20 kelurahan di DKI Jakarta. Menurut Zudan, tidak ada kelurahan atau kecamatan dengan data pemalsuan tertinggi.

"Beberapa kelurahan yang dimaksud antara lain Kelurahan Kapuk (Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat), Kelurahan Karet Tengsing (Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat), Kelurahan Petamburan (Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat), Kelurahan Tanah Tinggi (Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat), Kelurahan Cempaka Baru (Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat), Kelurahan Kemayoran (Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat), Kelurahan Kartini (Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat) dan Kelurahan Karang Anyar (Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat)," tuturnya. (IFR/Liputan6.com)

MENDAGRI: WASPADA ISU KTP PALSU JELANG PILKADA

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2017 mewaspadaai beredarnya KTP Elektronik (e-KTP) palsu menjelang pemungutan suara Pilkada serentak 15 Februari 2017. "Info di media sosial beredar soal e-KTP palsu, di mana satu orang dengan foto sama namun identitas berbeda. Ini untuk mengejar jumlah dukungan," kata Tjahjo melalui pesan singkat.

Tjahjo mengatakan modus KTP palsu ini umumnya dilakukan saat ada pasangan calon kepala daerah perseorangan.

Tjahjo menilai e-KTP yang beredar tersebut sebenarnya bukan

kepemilikan oknum yang data dirinya tercantum di kolom KTP. Data tersebut merupakan milik orang lain, hanya ditempel foto orang yang sama di fisik KTP tersebut.

"Info tim *monitoring* Pilkada Kemendagri dari Ditjen Dukcapil menjelaskan bahwa ketiga foto tadi palsu karena menggunakan data milik orang lain," ujar Tjahjo.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh juga menegaskan kalau KTP Elektronik tersebut palsu. Upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

"Dalam dua detik, langsung terjawab semua. Kalau pilkada orang memang cari dukungan dengan modus seperti ini, dan ini bukanlah produk Dukcapil," ujar dia.

Zudan juga menjelaskan pihaknya sudah berkordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait kesiapan Kemendagri mengantisipasi hal ini. Ia juga berharap, KPU bisa gunakan "*card reader*" untuk mendeteksi penyalahgunaan data e-KTP ini.

Sebelumnya beredar di media sosial tiga buah KTP elektronik memuat foto orang yang sama, namun dengan biodata yang berbeda. (IFR/Liputan6.com)

Baterai *Smartphone* Mudah Habis? Atasi dengan Kalibrasi

Banyak dari pengguna *smartphone*, khususnya Android, mengeluh karena daya baterainya mudah habis. Padahal, saat awal-awal pembelian baterai masih terasa awet. Hal ini sangat wajar terjadi, bahkan pada *smartphone flagship* sekali pun. Sebenarnya, banyak faktor yang bisa mengakibatkan hal ini terjadi, salah satunya cara pengisian daya baterai yang kurang tepat hingga baterai menjadi tidak sehat.

Kenali tandanya

Namun sebenarnya, tanda-tanda baterai 'tak lagi sehat' pun dapat dilihat dari berbagai indikasi, diantaranya:

- Indikator daya baterai menunjukkan baterai cepat berkurang, padahal *smartphone* dalam keadaan tidak digunakan
- Indikator daya pada baterai sering naik turun, misal indikator sudah 60 persen, setelah lima menit kemudian malah naik menjadi 65 persen
- Ketika melakukan pengisian daya, ikon indikator pengisian baterai sering timbul-hilang
- Pada saat baterai sudah habis, *smartphone* tidak dapat dinyalakan sama sekali.

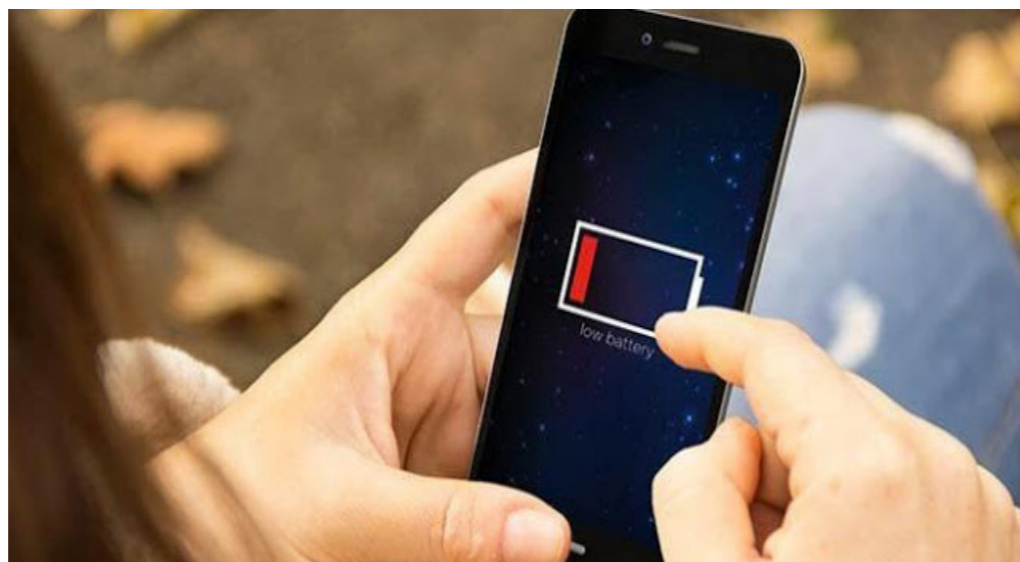
Perbaiki dengan kalibrasi

Nah, untuk mengatasi tersebut Anda bisa mengatasinya dengan kalibrasi, membuat tiga langkah mudah untuk kalibrasi baterai *smartphone*. Apa itu sistem kalibrasi? Sebenarnya sistem operasi Android memiliki fitur yang disebut Baterai Statistik, yang melacak kapasitas baterai, ketika penuh atau kosong. Fitur ini memungkinkan OS untuk melacak tingkat persentase baterai saat digunakan. Namun terkadang masalahnya fitur baterai statistik tersebut rusak dan mulai menampilkan data yang tidak nyata.

Jika fitur baterai statistik itu rusak atau terganggu maka deteksi persentase baterai akan tidak akurat. Hal itu dapat menyebabkan akan otomatis dimatikan sebelum baterai mencapai 0 persen. Kalibrasi baterai *smartphone* dilakukan adalah untuk memperbaiki informasi statistik baterai yang salah tersebut. Sehingga tingkat persentase baterai menampilkan keakuratan dari nilai persentase baterai yang sebenarnya.

Chek kondisi baterai dulu

Sebelum memutuskan untuk melakukan kalibrasi pada baterai *smartphone* Anda, periksa terlebih dahulu keseha-



tan baterai *smartphone* Anda. Untuk memeriksa kesehatan baterai, lepas baterai *smartphone* Anda dan periksa apakah baterai menggelembung, retak, atau ada kebocoran? Jika tidak ada masalah pada baterai, maka Anda boleh melakukan kalibrasi.

Tetapi jika ada masalah, sebaiknya Anda segera mengganti baterai Anda dengan yang baru. Sekalipun dikalibrasi, maka hasilnya akan tetap sama. Baterai akan cepat habis. Terutama jika Anda baru memperbarui *firmware* dari *kitkat* ke *lollipop*, tentu wajar jika baterai cepat habis.

Tiga cara mudah kalibrasi

- Dengan tiga langkah sederhana ini baterai *smartphone* Anda diharapkan mampu dapat berjalan optimal seperti biasanya. Anda bisa mencoba satu per satu cara di bawah ini, yaitu:
- Dalam keadaan *smartphone* menyala, *charge* hingga penuh atau mencapai indikator 100 persen. Setelah penuh cabut charger dan matikan *smartphone*
- Dalam keadaan *smartphone* mati, *charge* kembali *smartphone* Anda dan tunggu hingga benar-benar penuh 100 persen. Jika sudah penuh, nyalakan *smartphone*
- Setelah menyala, gunakan terus *smartphone* sampai daya baterai habis alias 0 persen dan biarkan *smartphone* mati sendiri. Jika *smartphone* sudah mati, *charge* lagi sampai daya penuh

Setelah melakukan langkah ketiga, artinya proses kalibrasi sudah selesai. Selamat mencoba! Jangan lupa pastikan Anda mengikuti langkah di atas dengan benar. (IFR/diolah dari berbagai sumber)



Perbedaan Kembar Identik yang Tinggal di Bumi dan Antariksa

Scott Kelly (kiri) tinggal di ISS (Stasiun Antariksa Internasional) selama setahun, sementara saudara kembar identiknya, Mark Kelly (kanan), tinggal di Bumi. Penelitian NASA mengungkap perbedaan pada tubuh keduanya.

Pada tahun 2015-2016, NASA melakukan percobaan unik pada astronaut kembar, dengan salah satunya berada di luar angkasa, sementara lainnya di Bumi. Kini, hasil awal dari studi tentang saudara kembar ini terungkap. Hasil awal tersebut dipresentasikan dalam pertemuan Program Penelitian Manusia NASA di Galveston, Texas, 26 Januari lalu.

Scott menghabiskan waktu setahun di ISS dari Maret 2015 hingga Maret 2016, sementara Mark tetap berada di Bumi. Selama waktu itu, berbagai tes diujikan pada mereka untuk membandingkan perbedaan genetika di antara keduanya.

Salah satu tujuan utama dilakukannya studi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerbangan antariksa jangka panjang terhadap tubuh manusia. Meskipun saat ini manusia telah mampu berada di luar angkasa selama beberapa dekade, perubahan fisik dan mental yang tepat belum dapat diidentifikasi secara jelas. Untuk hal tersebut, membutuhkan hal yang sangat krusial untuk misi jangka panjang, seperti perjala-

nan ke Mars.

Susan Bailey, Ahli Biologi Radiasi di Colorado State University di Fort Collins yang fokus menyelidiki telomer (bagian paling ujung dari DNA linear) dan telomerase (enzim yang berpengaruh pada pertumbuhan telomer) menemukan milik Scott tumbuh lebih panjang dibanding saudaranya. Padahal, selama ini diketahui telomer akan memendek seiring bertambahnya usia. "Ini bisa dikaitkan dengan peningkatan latihan dan berkurangnya asupan kalori selama misi," tulis NASA dalam rilisnya.

Panjang telomer Scott segera kembali berukuran normal setelah ia pulang ke Bumi, dengan alasan yang belum diketahui. Studi terpisah yang bertujuan untuk menyelidiki alasan ini, rencananya akan dilakukan pada 2018 mendatang.

Sedangkan Mike Snyder, penyelidik Integrated Omics, melaporkan tingkat perubahan lapisan lemak pada Scott yang mengindikasikan inflamasi. Selain itu, terdapat peningkatan kadar asam 3-indolepropionic (IPA) pada Mark. Metabolit ini dikenal hanya diproduksi oleh bakteri dalam usus dan tengah diselidiki sebagai antioksidan terapi otak yang potensial. IPA juga diketahui dapat membantu menjaga aktivitas insulin yang normal untuk mengatur gula darah setelah makan.

Dari segi kemampuan kognitif, para peneliti menemukan adanya sedikit penurunan dalam hal kecepatan dan akurasi pada astronaut pasca misi antariksa selama satu tahun. Sedangkan penyelidikan biokimia mengungkap adanya penurunan dalam pembentukan tulang pada semester kedua misi Scott.

Perubahan juga terlihat pada DNA saudara kembar tersebut. Andi Feinberg, ahli epigenomik, menemukan bahwa Scott mengalami penurunan metilasi atau modifikasi kimia dalam DNA sel darah putihnya saat berada di luar angkasa, namun kembali normal saat tiba di Bumi. Pemantauan pada Mark menunjukkan adanya peningkatan metilasi selama beberapa waktu, namun kembali normal pada akhir masa observasi.

"Hasil ini dapat mengindikasikan bahwa gen lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan, baik di Bumi maupun di luar angkasa," tulis NASA.

Tak hanya sampai di sini, melalui penelitian lebih lanjut yang mengintegrasikan penemuan-penemuan awal dengan penyelidikan fisiologi, psikologi dan teknologi lainnya, NASA dan mitranya terus berupaya memastikan agar astronaut dapat melakukan misi eksplorasi ruang angkasa di masa depan dengan aman, efektif dan efisien. (IFR) | Diolah dari: National Geographic



Pentingnya Stretching untuk Pegawai Kantoran

Duduk selama 8 jam atau lebih di hadapan komputer bisa memicu terjadinya perut buncit.

Ditambah lagi, dengan camilan manis dan asin yang setia menemani jemari Anda beradu dengan *keyboard*.

Bila Anda tak ingin lingkaran perut bertambah, sebaiknya luangkan sedikit waktu untuk berolahraga di balik meja kerja. Anda bisa memulai gerakan sederhana dengan *stretching* atau peregangan dengan alat seadanya di sekitar meja Anda. Nah, berikut ini, gerakan sebelum obesitas dan penyakit lainnya mengintai Anda.

Blade kiss and circles

Duduk lurus di kursi dengan kaki ditekek dan posisi sejajar. Kencangkan perut, lebarkan bahu, dan angkat dua lengan sejajar dengan bahu. Turunkan tangan ke bawah dan naikan lagi, lakukan selama 8 kali. Gerakan ini mampu menguatkan otot punggung dan bahu.

Standing pretzel

Berdirilah di belakang kursi, sementara tangan Anda bertumpu pada kursi. Letakkan tangan kiri di atas kepala, tekuk lutut kiri ke samping (seperti posisi murid dihukum guru), dan berjinjitlah dengan kaki kanan. Lakukan selama 20 kali dan lakukan pada sisi yang lain.

Leg curl and press

Ingin punya bokong yang seksi? Duduklah tegak lurus pada tepi kursi. Biarkan lutut kiri menyentuh lantai dan menjadi tumpuan. Tekan kaki Anda selama lima kali ke bawah dan lakukan pada kaki yang lainnya.

Straight-arm squeeze

Duduklah tegak pada ujung kursi, tarik lengan Anda ke belakang hingga otot lengan tertarik. Tahan selama beberapa detik dan lakukan 10 kali. Gerakan ini mampu mengencangkan otot bahu, trisep, dan punggung.

“Dalam sebuah penelitian tersebut, rata-rata sekira 40 persen ketahanan tubuh orang yang diabetes lebih sedikit dari pada orang dengan berat badan ideal



Obesitas = Tidak Produktif

Orang dengan obesitas atau kegemukan biasanya sangat memengaruhi status profesinya. Karenanya, golongan orang seperti itu lebih malas bekerja, tapi banyak istirahat di kantor karena kekurangan energi. Dampak tentu signifikan bagi kesehatan dan kesejahteraannya. Apalagi karena pengaruh kelebihan berat badan.

Sebuah studi baru mengklaim, pekerja obesitas tergolong kurang produktif. Hal ini dibuktikan oleh para peneliti dari Virginia Tech dan University of Buffalo.

Menurut dr. Michael Triangto, SpKO orang gemuk akan memiliki daya tahan sekira 40 persen lebih sedikit dibandingkan dengan orang dengan berat badan ideal. “Dalam sebuah penelitian tersebut, rata-rata sekira 40 persen ketahanan tubuh orang yang diabetes lebih sedikit dari pada orang dengan BB ideal,” terang dokter yang berpraktik pada Slim and Sport Therapy Jakarta, Mall Taman Anggrek.

Ini tidak berarti perusahaan akan mulai menyingkirkan pekerja obesitas. Sebaliknya, mereka harus mengatur gaya hidup sehat agar produktivitas pekerjaannya meningkat. Begitu pula dengan penyesuaian gaji sesuai beban kerja. “Pegawai yang mengalami obesitas mungkin perlu istirahat lebih lama agar bisa kembali ke keadaan awal mereka dari fungsi otot,” selorohnya.

Manfaat Streching dalam Kantor

Meningkatkan fleksibilitas

Karena terlalu lama duduk, membuat tubuh terasa kaku. Sempatkan waktu sejenak untuk melakukan *stretching* agar postur tulang belakang tetap bagus. Pilih gerakan-gerakan yang mudah agar tidak merepotkan diri Anda selama bekerja.

Menghindari Stress

Karena banyak bergerak dan menyempatkan *stretching*, kestabilan tubuh tetap seimbang. Anda akan lebih mudah mencegah obesitas dan nyaman beraktivitas, menghindari stres dan masih banyak manfaat lainnya.

Menebarkan energi positif

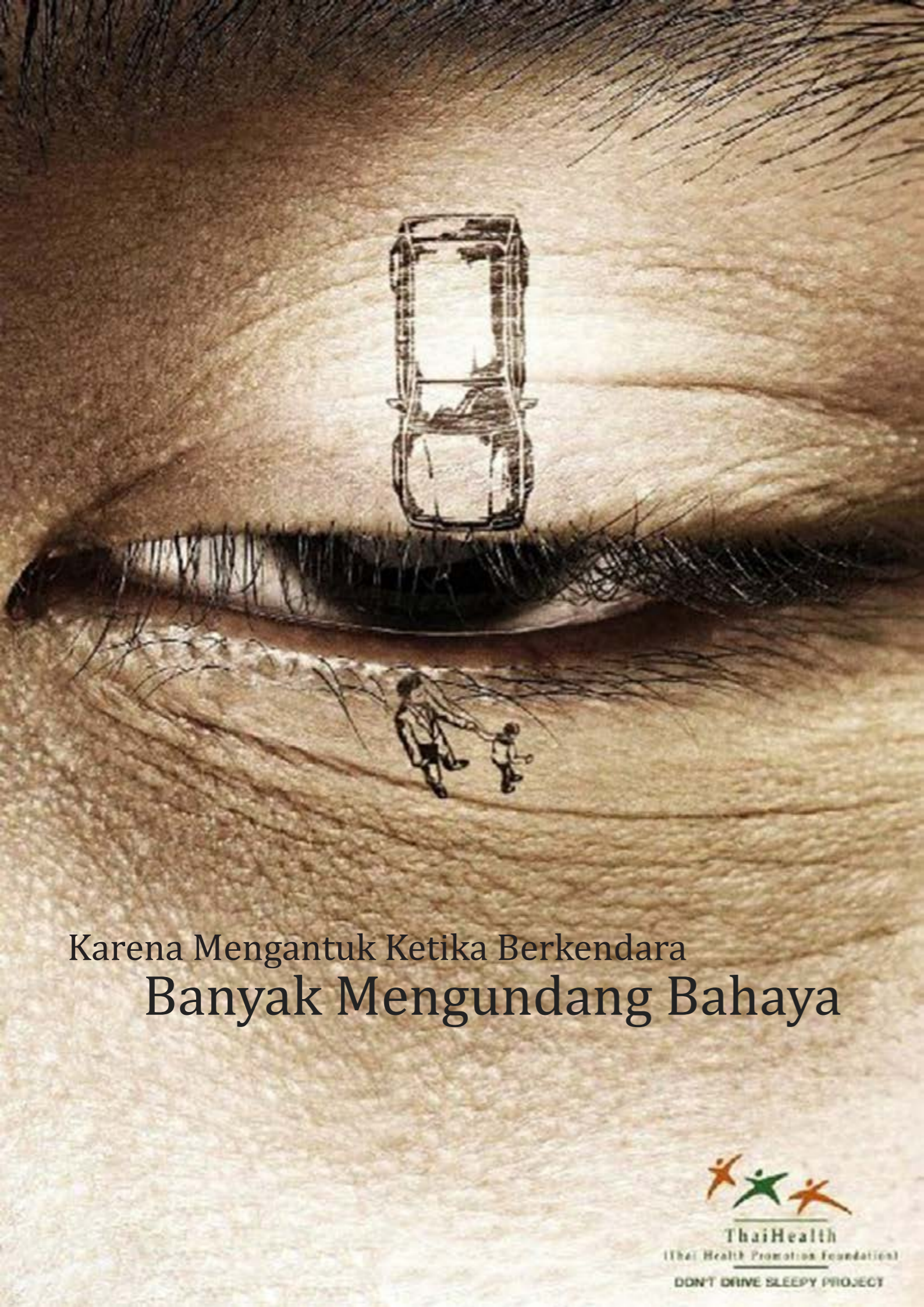
Ketika Anda melakukan *stretching* teman-teman kantor Anda juga pasti bakal tertarik. Artinya Anda sudah menebarkan energi positif mengajak teman untuk hidup sehat.

Mencegah nyeri

Kalau Anda kerap mengeluh nyeri punggung, leher dan kekakuan di bagian tubuh lainnya, sering-seringlah lakukan *stretching*. Kegiatan sederhana itu dapat mencegah nyeri sendi, otot, tulang, terutama kekakuan di bagian tulang belakang.

Meningkatkan produktivitas kerja

Di sela-sela bekerja Anda butuh istirahat dan rileks. *Stretching* adalah salah satu caranya. Kalau Anda rutin melakukannya, dijamin lebih mudah meningkatkan produktivitas pekerjaan yang sangat diinginkan untuk mencapai target perusahaan. (IFR)



Karena Mengantuk Ketika Berkendara
Banyak Mengundang Bahaya



Segenap Redaksi Media BPP
mengucapkan:

*Selamat menempuh hidup baru untuk
salah satu Jurnalis dan Tim Media BPP*

*Indah &
Boim*



Resident Evil: The Final Chapter

Sutradara: Paul W.S

Genre: Action

Pemain: Milla Jovovich

Ali Larter

Ruby Rose

Eoin Macken

Tayang: Februari 2017

Akhir dari Perang Melawan Zombie



Masih ingat tentang film *sequel* Resident Evil? Cerita tentang sebuah perusahaan Umbrella yang mengalami kebocoran virus zombie kepada seluruh manusia dunia. Jika Anda tidak pernah menontonnya, dan baru pertama kali menonton Resident Evil, tak perlu khawatir bingung memahami ceritanya, karena di awal cerita pada edisi *sequel* terakhir Resident Evil: the Final Chapter ini akan mengulas sedikit bagaimana terbentuknya Umbrella Corporation bisa menyebar virus yang bisa membuat manusia menjadi zombie.

Film yang diadaptasi dari *game* terkenal ini sudah mempunyai 6 *sequel*, yakni Resident Evil (tahun

2002), Resident Evil: Apocalypse (tahun 2004), Resident Evil: Extinction (tahun 2007), Resident Evil: After Life (tahun 2010), Resident Evil: Retribution (tahun 2012), dan terakhir Resident Evil: the Final Chapter (2017).

Nah, di Film terakhir ini bercerita tentang akhir petualangan Alice (Milla Jovovich) melawan serangan zombie yang dibentuk dari hasil eksperimen Umbrella Corporation. Alice kini menjadi satu-satunya harapan umat manusia untuk bertahan hidup. Ini karena hanya Alice yang mengetahui keberadaan antivirus untuk menghancurkan wabah zombie semakin menjadi-jadi.

Namun sayangnya, antivirus tersebut tersembunyi di dalam The Hive, markas bawah tanah Umbrella Cor-

poration yang terletak di Raccoon City, kota mati yang menjadi awal kemunculan zombie di dunia. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi Alice untuk berpacu dengan waktu agar bisa mengambil antivirus tersebut dan kembali menyelamatkan umat manusia yang tersisa.

Dalam menyelesaikan misi yang mulia, Alice dibantu oleh segelintir manusia yang masih bertahan hidup. Mereka adalah Claire (Ali Larter) yang merupakan rekan lama Alice, Abigail (Ruby Rose), dan Doc (Eoin Macken). Namun usaha Alice tidak mudah karena pimpinan Umbrella Corporation yang terkenal punya banyak strategi untuk menghalangi Alice yaitu Dr. Alexander Issacs (Iain Glen) dan berambisi menggagalkannya.

Secara keseluruhan film ini menyen-

aikan efek kejutan yang luar biasa bagi para penikmat film *sequel* bercerita tentang zombie tersebut. Banyak sekali kejutan zombie yg tiba-tiba mendadak muncul saat kita sedang serius memperhatikan apa yang akan dilakukan Alice berikutnya. Tidak butuh waktu lama, Resident Evil: The Final Chapter berhasil menggiring penontonnya masuk ke dalam cerita. Sutradara Paul W.S. Anderson konsisten menghadirkan ketegangan dalam suasana mencekam sejak awal film. Penonton dibuat takut sambil menahan nafas ketika melihat aksi Alice meloloskan diri dari kejaran aneka ragam zombie.

Keseruan Resident Evil: the Final Chapter bertambah dengan jalan cerita universal. Paul W.S. Anderson mengungkap formula umum 'ke-

baikan melawan kejahatan'. Tema ini terbukti masih efektif di mana penonton terhibur serta tidak merasa kebingungan dengan ceritanya.

Film ini mengajarkan pengetahuan kepada penontonnya bahwa 'kebaikan akan menang melawan kejahatan akan tetapi, banyak tantangan untuk meraih kemenangan tersebut'. Terlebih film ini juga mengajarkan kekompakan dan kerja sama antartim, saling menolong umat manusia.

Menurut para pemainnya, Film Resident Evil: the Final Chapter akan lebih seru dari film Resident Evil sebelumnya, karena *the Final Chapter* memberi kesan babak akhir dari perjalanan Alice yang panjang. (Aris Apriyadi/Widya Oktaviani/IFR)

Bagaimana peran parlemen dalam penegakkan hukum di Indonesia, bagaimana upaya parlemen dalam meningkatkan sinergitas penegakkan hukum di Indonesia? Dari beberapa pertanyaan tersebut menunjukkan, Trimedya Panjaitan menawarkan solusi penegakkan hukum yang tepat, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ia juga memberikan informasi penting tentang parlemen yang tidak banyak diketahui orang.

Trimedya menyoroti penegakkan hukum di Indonesia dari berbagai sudut pandang penguasa dari masa ke masa. Tidak lupa ia juga mengangkat peran DPR dalam mengawal penegakkan hukum dan berbagai kasus-kasus besar yang pernah hadir dan sempat menjadi pembicaraan masyarakat.

Trimedya juga mengungkap beberapa hal seperti pemberantasan korupsi, penegakkan hukum, dan pembenaan konstitusi. Pada bagian awal, ia mengkritik tajam penegakkan hukum di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai lemah. Terbukti beberapa permasalahan korupsi ketika itu tidak bisa diselesaikan. Seperti kasus *Bailout Bank Century*, misalnya, yang tidak pernah menemukan jalan keluar.

Korupsi pada masa pemerintahan SBY, menurut Trimedya lebih parah, bahkan banyak dari kalangan anak muda, tak terkecuali kader-kader dari partai penguasa. Dalam masa seperti itu, DPR hadir dan berperan dalam penguatan hukum termasuk membangun karakter antikorupsi pemuda di Indonesia. DPR juga aktif melakukan pengawasan terhadap progres pemberantasan korupsi agar pelaksanaannya berlangsung sungguh-sungguh.

Pemberantasan korupsi yang digulirkan Presiden SBY hanya sebatas pernyataan dengan berupaya mencitrakan dirinya sebagai tokoh yang bekerja keras dan serius dalam memberantas korupsi. Faktanya pada saat itu, aparat lebih mementingkan kuantitas dari pada kualitas, misalnya kejaksaan hanya memburu anggota DPRD yang korupsi bernilai puluhan juta sampai ratusan juta ketimbang kasus dugaan korupsi triliunan yang dilakukan pengemplang dana BLBI dan koruptor "*Big Fish*" yang lainnya. Kesan tebang pilih atau diskrimatif tidak bisa dilepaskan dari kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan

Sisi Lain Parlemen

Penegakkan hukum yang berkeadilan seperti jauh panggang dari api. Dua periode pemerintahan SBY dinilai belum mampu menuntaskan permasalahan penegakkan hukum di Indonesia. Di sisi lain, DPR yang selalu dilihat negatif, memiliki peran penting dalam penguatan lembaga hukum sekaligus penegakkan hukum di Indonesia.

aparat penegak hukum selama dua periode.

Sebagai pembanding, Trimedya beberapa kali menyinggung penegakkan hukum ketika masa Presiden Megawati yang dinilai lebih baik. Dalam buku ini Trimedya juga memaparkan 42 prioritas utama visi misi penegakkan hukum pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dinilai lebih jelas dan fokus dengan agenda konkret.

Pada bagian selanjutnya peran parlemen tidak ketinggalan ditonjolkan, sebagai lembaga negara yang mewakili suara rakyat, DPR turut menyumbangkan kiprahnya. Melalui tiga fungsi yang diembannya (legislasi, pengawasan, dan anggaran), berbagai



Penulis: Trimedya Panjaitan
Penerbit: Expose
Terbit: Oktober - 2016
Kategori: Sosial-Politik

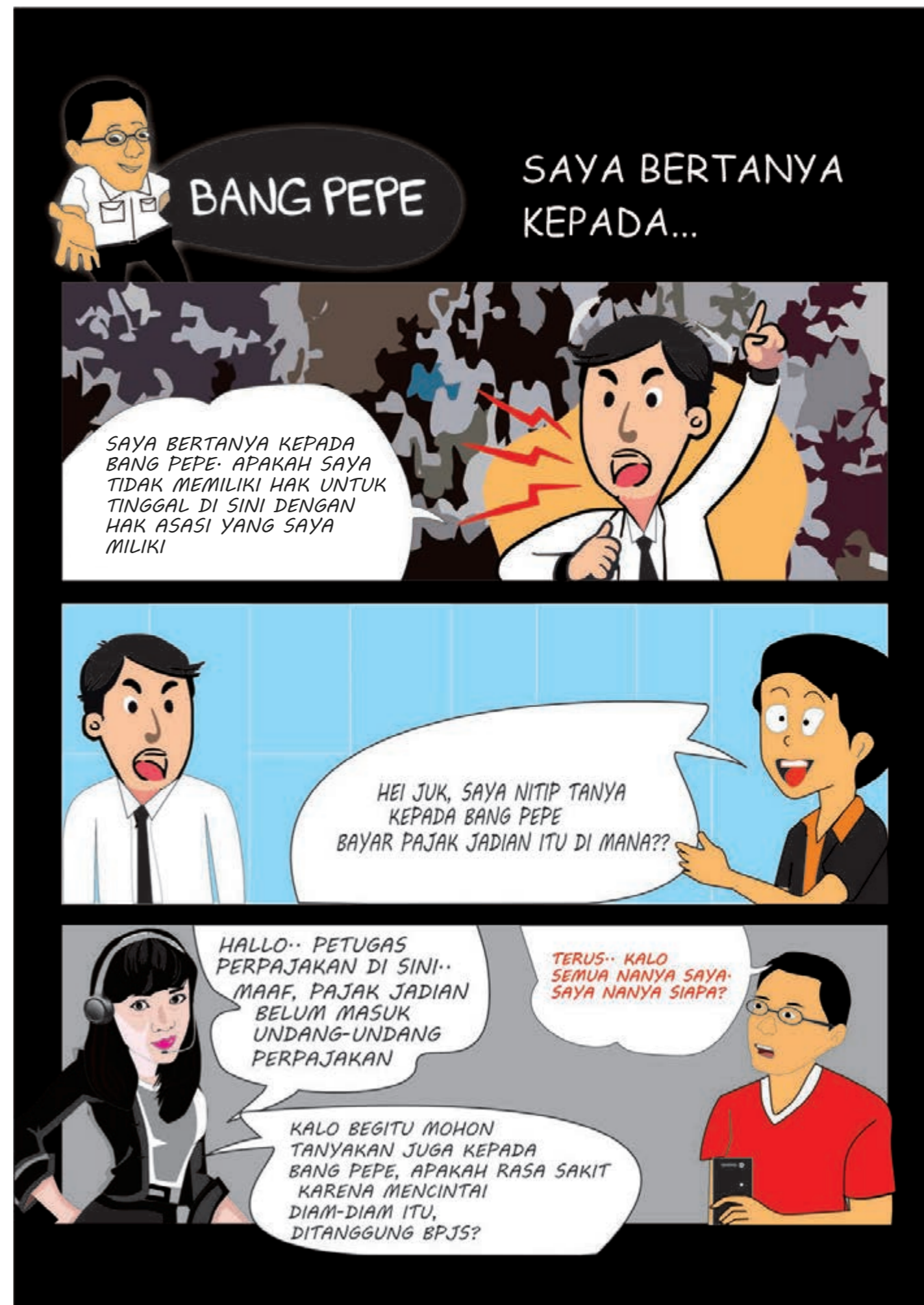
peraturan perundangan terkait penegakkan hukum dilahirkan. Aturan lama yang tidak terkait konteks terkini terus-menerus diperbaiki. Begitu pun dalam penerapannya, tidak boleh ada sama sekali yang lepas dari mata tajam pengawasan parlemen.

Pada bagian akhir, Trimedya ingin menegaskan, Indonesia adalah negara yang merindukan penegakkan hukum di segala aspek kehidupan seperti yang dicanangkan oleh pendiri bangsa (*founding fathers*). Karena, menurutnya dari 1945 sampai dengan 2017 kondisi penegakkan hukum masih buntu. Di sana-sini masih terjadi banyak ketimpangan.

Buku ini menawarkan solusi, karena menciptakan hukum untuk keadilan tidaklah mudah dilakukan di negeri ini. Secara umum hukum sering kali tidak mampu menentu mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan atau ekonomi. Hukum menjadi seperti sarang laba-laba yang hanya mampu menjerat binatang kecil, tetapi tak berdaya, sarang robek bila mengenai binatang besar.

Sebagai penulis, Trimedya Panjaitan patut diberi acungan jempol. Kiprah dan pemikirannya bisa diselami dalam bukunya yang berjudul *Parlemen dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Buku tersebut sekaligus dapat memberi informasi, memperkaya ilmu hukum serta menjadi acuan bagi semua pihak khususnya praktisi hukum agar membuka cakrawala penegakkan hukum di Indonesia.

Trimedya menggiring pembaca untuk melihat sisi lain DPR yang selama ini selalu dilihat negatif oleh sebagian pihak. DPR selalu dianggap lembaga paling korup dan sarang koruptor. Namun, di balik itu DPR adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam kancah penegakkan hukum di Indonesia. (Bungaran Damanik/MSR)



Apakah Doa Bisa Mengubah Masa Depan

Hari Taqwan Santoso

Apakah doa bisa mengubah keadaan? balas Wantono pada seorang kawan. Pagi itu rumahnya rubuh begitu saja tanpa bisa diketahui sebabnya. Rumah peninggalan orang tuanya itu memang sudah berumur, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa ia telah rapuh. Tidak pernah ada yang mengira, rumah itu akan rubuh, lebih-lebih roboh begitu saja tanpa seorang pun tahu alasannya. Bahkan Wantono sendiri, yang sudah bertahun-tahun berteduh di bawah atapnya, gagal menemukan sebab kerobohan rumah itu. Tiang-tiangnya kemarin masih kokoh, la bisa memastikan kendati tidak mengecek secara teliti. Kayu-kayu yang menopang atapnya juga tidak seharusnya menjadi lapuk begitu saja sehingga akhirnya *sempal*¹ secara serempak.

Wantono tinggal sendiri. Dia sedang berada di sawah ketika kejadian berlangsung dan buru-buru pulang ketika seorang kawan datang dengan tergopoh-gopoh untuk memberitahukan bahwa rumahnya roboh secara misterius. Setibanya di lokasi, Wantono mendapati rumah yang ketika tadi ditinggalkannya masih utuh, sekarang tinggal puing-puing. Rumah itu seperti habis diterjang angin topan atau diguncang gempa bumi saja. Hampir rata dengan tanah.

Warga berdatangan, mereka membantu Wantono untuk membersihkan puing-puing rumahnya dan membangunnya kembali. Mereka memutus arus listrik ke rumah itu terlebih dahulu lalu membagi tugas. Ada yang memilah material, ada pula yang mengangkutnya ke tempat tersedia. Material yang masih bisa digunakan seperti genteng utuh atau kayu bekas tiang, dipilah dari material yang telah menjadi sampah. Kendati memunyai kesibukan mereka masing-masing, membantu Wantono yang tertimpa musibah tanpa disangka-sangka itu jauh lebih penting. Begitulah kehidupan di desa. Kebetulan juga, orang-orang sedesa itu sebenarnya masih saling berkerabat karena leluhur mereka, para *babad desa*, bersaudara.

Menanggapi musibah yang menimpanya itu Wantono terpaku sejenak, lalu ketika warga mulai bekerja dia turut bekerja tanpa mengucap satu patah kata pun. Kawan yang tadi memberitahukan keruntuhan rumahnya itu mengira dia mengalami guncangan batin. Ia pun menghibur dengan berkata, “Kamu yang sabar Wan, ini adalah cobaan dari Tuhan. Berdoa saja, nanti pasti ada gantinya. Bahkan lebih baik.”

Si kawan terkejut mendengar balasan Wantono yang tanpa ekspresi, serta tidak disangka-sangka itu. Bahkan lebih lagi ketika Wantono menambahkan, “Tuhan, ya? Kepercayaan pada sosok yang mengatur alam semesta, termasuk runtuhnya rumah orang tuaku ini sebagai cobaan. Cara berpikir seperti itu sebenarnya hanya satu bentuk kemalasan berpikir. Aku sudah melatih diri untuk tidak kalap dalam menerima kejadian-kejadian yang tidak kuinginkan secara mendadak, jadi gagasan seperti itu tidak kuperlukan lagi.”

Tidak disangka-sangka jawaban itu keluar dari mulut Wantono. Jawaban itu membuat kawannya terdiam, terkejut dan masih tidak percaya. Seolah dia lah yang terkena guncangan batin sementara Wantono sendiri tenang-tenang saja. Tangannya cekatan dalam memilah genteng yang masih utuh dari genteng-genteng

pecah, untuk kemudian disusun di tempat yang telah disediakan sebelumnya.

“Bayangkan kalau kau yang mengalami peristiwa ini, lalu kau berdoa supaya rumahmu utuh lagi. Apa iya batu-batu bata yang sudah hancur itu utuh lagi, berterbangan, menyusun diri membentuk tembok? Lalu kayu-kayu yang sudah *sempal* itu terpasang kembali seperti sedia kala? Ah, rasanya tidak. Kau masih harus bekerja, dan kalau perlu melibatkan orang lain seperti yang kualami sekarang ini. Kalau demikian halnya, apa gunanya berdoa?”

“Kau?”

“Ya.”

Si kawan hendak menanyakan apakah Wantono sudah mengambil gagasan yang telah umum diyakini sebagai kebenaran faktual di desa sebelah. Bahwa kepercayaan kepada sosok di atas sana tidak lebih sebagai jalan masuk bagi orang-orang yang hendak memanfaatkan kesempatan untuk meninabobokan. Sekali seseorang berpikir begitu maka ia menjadi tidak kritis terhadap segala hal yang dianggap punya otoritas kelangitan sehingga mudah untuk dimanipulasi. Sialnya, di antara mereka yang punya kepercayaan semacam itu, orang-orang yang melihatnya sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi selalu ada.

“Sejak kapan?”

“Ah, itu tidak penting.”

Hanya dalam dua minggu, Wantono telah dapat membangun rumahnya kembali dengan bantuan para warga. Ia mendapat rumah yang kalau dilihat, lebih baik dari rumahnya semula, tanpa doa! Bantuan berupa tenaga cuma-cuma yang didasari oleh kebaikan hati para warga lah penyebabnya. Doa sama sekali tidak punya andil, pikir Wantono. Orang harus beraksi secara nyata, bukan meminta pada sosok yang bahkan dilihat saja enggan karena memang tidak ada, lanjutnya. Entah itu dia yang menjadi penunggu pohon tua atau yang bertahta di atas langit, sama saja.

Wantono kembali menjalani pekerjaannya sehari-hari sebagai petani, namun gagasan yang didapat dari cendekiawan sekaligus kepala desa sebelah itu begitu menarik sampai dia tidak dapat berhenti dari memikirkannya sambil mengayunkan cangkul. Saat istirahat, Wantono melayangkan pikirannya lagi. “Kawanku bilang kalau doa mampu mengubah keadaan,” gumamnya sendiri sambil sesekali menyedot asap tembakau.

“Katanya, dia pernah menyaksikan sendiri keajaiban dari ucapan-ucapan yang disebut doa itu. Saudaranya di kota sedang sakit parah. Dokter dengan segala pengetahuannya tentang obat sudah tidak dapat menolong lagi. Akan tetapi begitu dia meminta seorang pemuca agama untuk mendoakan kesembuhannya, saudaranya itu pun berangsur-angsur sembuh. Bahkan kesembuhannya bisa dianggap ajaib karena menurut dokter yang sama, kalau pun dia bisa disembuhkan dengan bantuan dokter tersebut maka prosesnya tidak akan memakan waktu secepat itu. Karena itu, simpulnya, doanya pasti mujarab.”

“Itu adalah cara berpikir yang salah kaprah,” bantah Wantono pada kesimpulan yang diutarakan temannya itu. Ia bergumam sendirian layaknya seorang penderita gangguan jiwa. “Saudara kawanku sakit parah dan dokternya sudah ‘angkat tangan’, adalah fakta. Alih-alih tidak tertolong, dia justru sembuh lebih cepat dari perkiraan, juga fakta. Tapi, dia sembuh karena didoakan seorang pemuca agama, itu sekadar pendapat belaka. Fakta bahwa doa si pemuca agama dan kesembuhannya adalah dua kejadian yang terjadi secara berurutan, tidak lantas menjadikan keduanya terhubung dalam satu kesatuan. Dengan kata lain belum tentu ada kaitan sebab-akibat di antara keduanya. Aku bisa

membayangkan diriku mengangkat tangan, lalu nun jauh di sana sebuah gunung berapi meletus. Aku mengangkat tanganku lagi dan sebuah gunung berapi lainnya meletus. Kejadian-kejadian itu berurutan, tapi tentu saja tidak ada sebab-akibat di dalamnya. Tidak berarti aku bisa membuat gunung menjadi meletus dengan mengangkat tangan.”

Dengan cara berpikir yang tidak lazim di desanya itu Wantono tidak pernah dimusuhi, sebab ikatan kekeluargaan antarwarga jauh lebih kuat dari perbedaan apa pun yang mereka punyai. Terlebih lagi, ia hanya tertarik pada “gagasan dari desa sebelah” itu tanpa terlibat kegiatan politik apa pun. Maka ketika banyak warga sebelah yang dibantai karena jalan pemikiran seperti itu, bahkan mereka yang sekadar ikut-ikutan saja juga kena getahnya, Wantono selamat. Ia tidak ikut diciduk untuk disembelih dan mayatnya dibuang ke sungai sebagaimana orang-orang sepemikiran yang terlibat kegiatan politik baik langsung maupun tidak.

...

Puluhan tahun telah berlalu sejak peristiwa runtuhnya rumah Wantono yang misterius dan tidak pernah terpecahkan itu. Masa senjanya dilewati sendirian di rumah yang dibangun oleh gotong-royong warga setelah roboh tempo dulu. Wantono mendudukkan pantat yang tubuhnya telah renta itu di sebuah kursi goyang. Sesekali dihisapnya asap tembakau bakar berbalut *klobot*² yang dibuat oleh tangan-tangan tuanya sendiri. Bersama kepulan asap, pikirannya melayang. Di waktu senggangnya seperti sore ini, ia masih sempat memikirkan keadaan orang-orang menggunakan pisau nalar yang benar-benar terasah.

Ia semakin miris dengan kenyataan yang ada sekarang. Gagasan yang dulu diterimanya sebagai sebuah keraguan, yang dimaksudkan untuk melatih diri agar tidak salah kaprah dalam berpikir, hari-hari ini mewujudkan menjadi nyata. Gagasan bahwa agama

hanya sebagai alat untuk meninabobokan orang-orang bodoh itu, dulu diterima sebatas karena ia masuk akal. Sekarang gagasan tersebut, bagi Wantono, sudah terbukti nyata. Banyak orang yang mengaku agamis, terlalu cepat marah oleh kata-kata yang sebenarnya tidak menyinggung. Khalayak yang tidak kritis lalu ikut-ikutan untuk menghakimi seolah mengetahui duduk persoalannya dengan baik. Inilah wujud nyata peninaboboan orang-orang bodoh oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan agama, pikirnya.

Kendati miris, Wantono tidak tertarik untuk ikut andil dalam pertikaian yang terjadi dalam bentuk apa pun. Sekarang ia tidak lebih dari sekadar orang tua yang mencoba untuk menghindari kesalahkaprahan dalam berpikir sedari muda, sejak mengenal “gagasan aneh dari desa sebelah” berpuluh tahun lalu. Wantono sadar betul bahwa usianya di dunia yang fana ini mungkin hanya tinggal beberapa hari lagi. Maka tidak ada alasan untuk ikut nimbrung dalam hiruk pikuk dunia. Jauh lebih bermanfaat untuk menjalani hari-hari yang tersisa dengan menikmatinya.

2 Kulit jagung.

1 Terlepas paksa.

Opini Ray Septianis Kartika

REPLIKASI INOVASI TEPAT GUNA

Replikasi inovasi merupakan indikator keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan inovasi daerah. Ukuran keberhasilan replikasi tersebut adalah, sejauh mana inovasi yang diadopsi berbasis wilayah, artinya bisa memanfaatkan segala potensi daerah yang ada.

Replikasi inovasi sejatinya merupakan solusi yang sejauh ini bisa mengangkat taraf hidup masyarakat. Seperti yang disampaikan beberapa waktu lalu oleh Asman Abnur dalam acara Forum Replikasi Nasional Inovasi Pelayanan Publik di Bandung, Jawa Barat. Asman juga menuturkan replikasi adalah jalan termudah bagi daerah yang minim inovasi dan masih tertinggal. Pasalnya, replikasi tidak harus menekankan unsur kebaruan, namun bisa dilakukan dengan memperbaiki program dan kebijakan yang sudah diterapkan di daerah lain. Replikasi sejatinya dapat membantu pemerintah daerah dalam menjawab permasalahan daerahnya.

Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB, menegaskan banyak inovasi yang bisa direplikasi, baik di pemerintah pusat maupun di daerah. Dari ribuan inovasi setidaknya 52 inovasi layak untuk direplikasi. Inovasi tersebut terdiri dari terobosan dalam pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, dan kependudukan), pelayanan perekonomian (perizinan, infrastruktur, dan transportasi), dan lainnya (peningkatan kinerja dan tata kelola). Menariknya lagi, 38 inovasi (73 persennya)

merupakan hasil kreasi kabupaten, kota, dan provinsi (daerah).

Namun, replikasi belum sepenuhnya terealisasi, banyak kendala dan resistensi. replikasi tidak serta merta berhasil diaplikasikan pada suatu daerah. Beberapa replikasi gagal karena ketidakcocokkan iklim wilayah dengan inovasi yang dipilih. Ketidakcocokkan tersebut bisa berupa karakter wilayah, minimnya dukungan anggaran, serta komitmen kepala daerah yang tidak berbasis pada proses dan program, menjadi kendala penerapan replikasi.

Inovasi pilihan yang memadukan teknologi informasi mutakhir juga menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan, apakah inovasi dengan teknologi informasi yang *mumpuni* di suatu daerah bisa diaplikasikan di daerah yang masih tertinggal. Replikasi pun tidak serta-merta bisa dilakukan begitu saja, tidak asal menunjuk cocok atau tidak dilaksanakan di daerah. Perlu perencanaan dan strategi matang dengan memperhatikan berbagai potensi yang ada di daerah.

Untuk itu, dalam melaksanakan replikasi, melibatkan pemerintah daerah penting dilakukan. Pemerintah daerah berperan penting dalam keberhasilan suatu replikasi inovasi. Sebelum replikasi diwujudkan, sebaiknya mungkin mereka harus mengidentifikasi segala potensi yang ada di daerahnya. selain itu, mereka juga harus memiliki strategi pemetaan daerah dengan mengadopsi berbagai sumber aset yang layak dikembangkan menja-

di wajib dilakukan. Agar pelaksanaan replikasi inovasi berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Sebaliknya, pemerintah daerah tidak boleh asal menyetujui tawaran replikasi inovasi. Terlebih karena hanya sebatas tuntutan inovasi, atau karena daerah merasa sudah memenuhi kriteria, tanpa kajian matang, dan tuntutan ketika keadaan daerah sudah diambang mengkhawatirkan tanpa prestasi. Atau ketika masyarakat mulai mempertanyakan peran kepala daerah dalam membentuk daerah yang mandiri, baik dalam mengambil keputusan atau menentukan model inovasi.

Kepala daerah harus paham betul makna dari replikasi itu sendiri. Selain itu komitmen pelaksanaan replikasi juga sangat penting agar inovasi bisa dijalankan secara berkelanjutan. Replikasi juga harus mengutamakan kesamaan karakter, situasi dan kondisi daerah yang hendak direplikasi. Yang tidak kalah penting adalah perlunya dukungan dan sumber daya, melaksanakan inkubasi inovasi atau percobaan inovasi, melakukan dokumentasi dan duplikasi hasil inovasi, serta strategi menghadapi segala resistensi yang bisa saja terjadi.

Sehingga ketika replikasi mencapai tujuan yang diharapkan, sampai suatu daerah berhasil melaksanakan terobosan inovasi, secara otomatis akan diketahui oleh daerah lain, bahkan tidak sedikit yang datang untuk belajar.

Jika kita mau berkaca pada sebuah studi yang dilakukan The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) mengenai transfer kebijakan (replikasi). Ada empat kriteria yang harus dilakukan dalam pemilihan inovasi yang akan diadopsi (replikasi). Kajian tersebut adalah kajian awal adopsi inovasi melalui penetapan kriteria replikasi, yang merupakan kajian atas berbagai literatur akademik dan praktis. JPIP menyebutnya dengan singkatan MK3 (Manfaat, Kompatibilitas, Kompleksitas, dan Kebijakan).

Pertama, manfaat. Merujuk pada keuntungan relatif dari inovasi yang akan diadopsi, bila dibandingkan dengan praktik pemerintahan sejenis yang dijalankan sela-

ma ini. Daerah pengadopsi bisa mengukur manfaat apa yang sekiranya bisa didapatkan dengan mengimplementasikan inovasi yang akan ditiru. Analisis manfaat biasanya disandingkan dengan analisis biaya yang dikeluarkan. Khususnya, manfaat dan biaya untuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Kedua, kompatibilitas, kriteria ini menilai seberapa cocok inovasi yang akan direplikasi dengan kondisi dan situasi yang akan diadopsi. Beberapa indikator seperti budaya masyarakat dan aparatur, etos kerja, infrastruktur, serta lingkungan fisik dan sosial daerah pelaksana bisa diukur tingkat keharmonisannya dengan inovasi. Dengan demikian, bisa diputuskan, semakin tinggi tingkat kecocokan, kemungkinan keberhasilan replikasi inovasi semakin baik.

Ketiga, kompleksitas. Kriteria ini menunjukkan tingkat kerumitan inovasi yang akan direplikasi. Contohnya dalam pelayanan publik dengan prinsip menyederhanakan dan memudahkan prosedur, alat, dan berkas. Namun, tak ada salahnya daerah memahami kemampuannya, apakah sebuah inovasi yang akan diadopsi itu terlalu pelik untuk diadopsi atau tidak.

Keempat, kebijakan. Ini merujuk pada regulasi-regulasi sebelumnya yang berlaku di daerah. Sebelum replikasi dijalankan, perlu dilakukan kajian hukum, adakah peraturan yang berlaku di daerah mau pun nasional yang bertentangan dengan inovasi yang akan direplikasi. Sebaliknya, bila ditemukan, regulasi yang mendukung harus dijadikan sebagai penguat replikasi. Bagi pemerintah, keabsahan hukum tentu penting agar inovasi dinilai bukan hanya layak secara teknis, tetapi juga legal.

Oleh karenanya, untuk mendorong pelaksanaan replikasi yang cerdas dan efektif, daerah juga perlu melakukannya dengan terencana, sistematis, dan berorientasi pada dampak. Replikasi inovasi yang dilakukan daerah bukan serta merta terjadi secara alamiah, akan tetapi banyak hal yang harus diperhatikan, proses yang panjang dan tentunya kesepakatan untuk melaksanakan replikasi.



Ray Septianis Kartika,
Peneliti Badan
Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Opini Hasoloan Nadeak

PERLUNYA EFISIENSI PELAYANAN DUKCAPIL

Belum semua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kabupaten/Kota melakukan inovasi pelayanan publik. Manfaat pelayanan publik yang inovatif tidak bisa diragukan lagi. Inovasi pelayanan publik berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan transparan, sehingga terwujud *good governance*. Indikasi penting mewujudkan *good governance* terdapat dalam PP No 37 Tahun 2007 Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 21 huruf (b) memperjelas, bupati/walikota diperintahkan untuk melakukan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dalam hal pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Namun, fakta saat ini, beberapa daerah abai terhadap aturan tersebut, layanan Dukcapil dikelola sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Gengsi selalu menjadi pilihan. Pada akhirnya, efisiensi seperti jauh panggang dari api. Alih-alih memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan, justru malah menambah beban dan setumpuk permasalahan. Imbasnya pelayanan publik, khususnya yang berhubungan dengan pencatatan dokumen kependudukan tidak ada perubahan mendasar. Masalah yang sama masih kerap terjadi berulang-ulang.

Sebaliknya, beberapa daerah inovatif telah jauh melampaui, pelayanan publik tidak lagi dilakukan secara manual. Mereka memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Teknologi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dari sisi pemerintah, pelayanan

yang diberikan lebih cepat, dapat memudahkan dalam pengumpulan data, dan hemat biaya. Kemudahan juga didapatkan publik, mereka tidak harus mengular panjang di kantor pemerintahan, hemat waktu, dan tidak harus panik karena menunggu.

Pemanfaatan kemajuan teknologi dalam pelayanan publik nyatanya tidak diaplikasikan oleh beberapa daerah yang tertinggal jauh dari segi pelayanan publik. Pelayanan masih dilakukan secara manual dan tidak maksimal. Selain itu, inovasi pelayanan publik sering diartikan salah kaprah. Mereka beranggapan inovasi yang dijalankan cukup mengandung kebaruan, tanpa berfikir efisiensi.

Salah satu contoh inovasi di Kota Medan, misalnya, layanan pembuatan akta kelahiran dan KTP elektronik sudah dilakukan dengan jemput bola, datang langsung ke masyarakat, didukung dengan empat unit mobil jemputan secara berkeliling. Namun, empat unit mobil tidak cukup untuk Kota Medan dengan penduduk lebih dari 2 juta jiwa dan luas 265,10 kilometer melingkupi 21 kecamatan. Tentu itu membutuhkan dana besar dan waktu yang tidak sebentar.

Alhasil, selama satu tahun hanya melakukan kunjungan sebanyak dua kali. Misalnya, yang dilakukan kepada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan Medan Area. UPTD yang membawahi 41 SD dan MI, 13 TK, dengan jumlah murid seluruhnya 11.000 anak. Dengan hanya dua kali, Dinas Dukcapil hanya mengumpulkan sekira 8.000 berkas permohonan akta ke-

lahiran. Belum lagi masalah efisiensi. Para pemohon harus menunggu lama sampai selesai dibuat akta kelahiran. Lebih parah lagi, orang tua pemohon harus datang langsung ke Kantor Dinas Dukcapil Kota Medan untuk pengambilannya.

Solusi pengurusan akta kelahiran di Kota Medan dengan menggandeng pihak Rumah Sakit sempat ditawarkan. Tetapi, kerja sama tertulis tidak kunjung dilakukan. Alasannya butuh sarana dan prasarana memadai serta harus melalui sistem *online*. Akhirnya pelayanan dengan menggunakan kendaraan seperti yang disebutkan di atas menjadi pilihan.

Lain Medan lain pula Deli Serdang. Pelayanan jemput bola yang dilakukan Dinas Dukcapil Kabupaten Deli Serdang, pada 2015 hanya fokus di enam kecamatan dan 17 desa. Padahal Deli Serdang memiliki 22 kecamatan, 327 desa, dan 13 kelurahan. Tidak sampai di situ, Dinas Dukcapil hanya mampu mengumpulkan sebanyak 2.800 berkas dan baru 600 berkas yang berhasil diselesaikan. Bayangkan perlu waktu berapa lama lagi untuk mencapai jumlah penduduk Deli Serdang sebanyak 1.700.000-an jiwa.

Pelayanan jemput bola saat ini menjadi pilihan pemerintah daerah, seiring dengan tuntutan inovasi pelayanan publik. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dengan layanan jemput bola adalah dapat memangkas birokrasi panjang dan berbelit, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan bisa memangkas "*high cost economy*".

Pelayanan jemput bola seharusnya tidak sekadar diikuti sama persis di berbagai daerah, kepala daerah harus benar-benar kreatif meramu inovasi yang akan diterapkan (replikasi) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Tidak mungkin pelayanan jemput bola di Kota Medan dilakukan sama persis dengan Deli Serdang yang letak geografis, luas wilayah, dan kultur masyarakatnya berbeda. Untuk itu, pengujian terlebih dahulu penting dilakukan demi efektivitas dan perbaikan kualitas pelayanan. Tidak langsung diterapkan yang kemudian memaksa masyarakat mengeluarkan tenaga dan uang lagi untuk proses selanjutnya.

Sebenarnya banyak cara untuk mewujudkan *good governance* melalui pelayanan

publik. Beberapa indikasi mewujudkan pemerintahan yang baik sebenarnya bisa saja dilakukan dengan melakukan kerjasama antarpemerintah dengan lembaga nonpemerintah, seperti RSU, RSIA, dan rumah bersalin. Oleh pemerintah, lembaga-lembaga tersebut sebaiknya diberikan ruang untuk berperan secara optimal dalam kegiatan pemerintahan. Sehingga terjalin sinergi antaraktor. Antara lembaga pemerintah dan nonpemerintah.

Dukungan pemerintah pusat juga tidak kalah penting. Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sudah lama menampilkan perannya dalam sebuah kebijakan melalui PP No 37 Tahun 2007 dan mengambil keputusan melalui Surat Mendagri No 471/1768/Sj yang mengimbau untuk melakukan berbagai penyederhanaan pelayanan.

Peran ini dapat lebih dioptimalkan lagi melalui penyediaan anggaran sebagaimana diatur UU No 24 Tahun 2013 Pasal 87A yang berbunyi pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan demikian, tidak boleh ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk tidak melaksanakan inovasi pelayanan Dukcapil. Pelayanan Dukcapil juga tidak boleh dilaksanakan setengah-setengah.

Pelayanan Dukcapil yang optimal sejatinya dapat membuat tata kelola pemerintahan berjalan lebih efektif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, karena pelayanan publik yang baik, akan memunculkan nilai-nilai efisiensi, keadilan, dan daya tanggap. Itu menjadi nilai penting.

Selain itu juga, pelayanan Dukcapil yang efisien dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta berorientasi pada kepentingan publik. Dengan begitu masyarakat bisa menilai sendiri mana saja daerah yang berhasil melaksanakan pelayanan Dukcapil, indikasinya adalah kemajuan daerah dan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Saatnya daerah hadir dan menjadi pelindung bagi masyarakat.



Hasoloan Nadeak,
Peneliti Badan
Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Sang Demagog Ibu Kota

Merujuk sigi yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada awal Februari 2017 ini, sentimen agama di Ibu Kota meningkat dalam Pilkada Serentak Februari 2017. LSI mencatat sentimen agama memainkan peran penting dalam kontes Pilkada DKI Jakarta. Ternyata, 71,4 persen menganggap kesamaan latar belakang keyakinan merupakan salah satu faktor penting dalam memilih pemimpin di Ibu Kota.

Sementara hanya 27,2 persen saja yang menyatakan kesamaan agama tidak penting dan 1,4 persen menjawab tidak tahu. Yang meyakinkan lagi, persentase tersebut terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada Maret 2016, responden yang menyatakan kesamaan agama itu penting hanya 40 persen saja. Lalu, pada Oktober meningkat menjadi 55 persen.

Tren ini agaknya akan terus meningkat pada putaran kedua Pilkada Ibu Kota pada 19 April nanti. Asumsi ini memang perlu pembuktian lebih lanjut. Tetapi, gejalanya sudah benderang terlihat. Sang Demagog Ibu Kota sejak awal senyatanya memainkan isu itu. Bersama kelompoknya Sang Demagog tidak segan-segan untuk memobilisasi massa dengan menggunakan sentimen-sentimen primordial agama dibumbui etnisitas demi mencapai kepentingan politik-ekonomi pragmatis.

Sang Demagog sangat pandai memainkan suasana dan hiruk pikuk percaturan politik Ibu Kota yang cukup memanas lantaran membawa sentimen agama. Secara halus Sang Demagog seolah-olah memperlihatkan bahwa ia tidak mau ikut terlibat dan terjebak, akan tetapi secara terselubung sebenarnya Sang Demagog memanfaatkan kondisi ini. Hal ini dapat terlihat ketika Sang Demagog menemui kelompok garis keras meskipun hanya sekadar silaturahmi.

Sang Demagog memanfaatkan suasana sentimen agama dan akan lebih gencar lagi pasca putaran pertama Pilkada Serentak Ibu Kota. Karena kalau mencoba netral dan objektif, Sang Demagog sadar tidak semua pemilih berwatak rasional. Kecenderungan komunal dalam masyarakat urban akan tetap melihat bahwa kepentingan publik tidak begitu penting ketimbang surga dan neraka.

Politik identitas akan tetap bermain dan getol diusung Sang Demagog untuk menguasai masyarakat kontemporer urban yang doyan mendengarkan ceramah ustadz selebritis produk neo-kapital. Tentunya dengan perlahan mendekati orang-orang yang berfatwa bahwa non-muslim tidak boleh jadi pemimpin. Cara-cara seperti ini memang khas para demagog politik berkedok agama.

Mereka menanamkan keresahan, kemudian mengeksploitasi keresahan ini agar timbul kecurigaan publik pada pihak-pihak yang sejatinya tidak perlu dicurigai. Sampailah kita semua pada titik temu—titik temu yang menjadi tujuan para demagog, titik temu kehancuran.

Politik keresahan yang diusung oleh Sang Demagog tidak akan bisa sempurna tanpa adanya “pemujaan”. Bisa dipa-

hami, pemujaan adalah langkah yang secara otomatis membuka potensi benci terhadap pihak-pihak yang tidak turut meramaikan pemujaan terhadap figur-figur yang saat ini sedang digodok untuk mensukseskan proyek demagog.

Demagogi ini, menurut Haryatmoko, efektif untuk menggalang dukungan politik dari khayalak karena mempunyai mekanisme yang khas: pertama, Sang Demagog selalu mencari kambing hitam atas segala masalah. Dengan cara itu, seorang demagog menjamin fanatisme kelompoknya dengan menghancurkan pribadi atau kelompok lain yang dianggap sebagai sumber permasalahan. Kepada mereka, kebencian ditumbuhkan, dipelihara, bahkan diperdasyat intensitasnya.

Kedua, argumen yang dijadikan senjata utama biasanya *ad hominem* (menyerang pribadi orangnya) dan argumen kepemilikan kelas (gagasan seseorang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan atau kelas dari mana dia berasal). Cuma, penyampaian tentu lebih lembut. Pasalnya, Sang Demagog sudah mencitrakan dirinya sebagai orang yang santun. Padahal, hanya kedok belaka. Kedua argumen itu rentan dikaitkan dengan soal SARA, yang dapat membangkitkan sentimen agama dan kelompok.

Argumen-argumen itu cenderung mengalihkan perhatian dari substansi permasalahan, karena demagogi cenderung mencari kambing hitam. Orang dapat, misalnya, memojokkan seseorang pada soal agama atau etnis tertentu, sehingga simpati dan dukungan kepada orang itu dapat dihambat atau bahkan direbut.

Ketiga, seorang demagog biasanya sangat cangguh dalam membuat skematisasi. Skematisasi merupakan mekanisme penyederhanaan suatu gagasan atau pemikiran supaya ada efektivitas sosial. Penyederhanaan itu dirumuskan dalam bentuk opini yang membentuk keyakinan. Bahayanya muncul ketika opini yang dikonstruksi tidak lebih dari sebuah reduksi.

Demagog-demagog itulah yang menghasut. Lihat saja status-status di media sosial yang berisi konten-konten keagamaan. Pasti akan langsung mendapat sambaran dari orang bodoh untuk kemudian disebarluaskan sambil seolah-olah menganggap dirinya juga orang beragama hanya karena ikut menyebarkan konten agama yang nyata-nyata tidak dipahaminya secara hakiki.

Oleh karenanya, para pemilih mesti cerdas menilai mana seorang demagog dan mana yang memang demokrat dan nasionalis sejati. Sebab, Sang Demagog sangat pandai memainkan emosi publik. Dengan rekam jejak intelektual, Sang Demagog menjadikannya sebagai bahan membual ke hadapan khalayak.

Alih-alih menggunakan sedemikian rupa kadar intelektualnya, Sang Demagog malah menyuapi publik dengan kotoran yang mampu memecah belah warga di Ibu Kota. Walhasil, dengan begitu Sang Demagog akan diingat sebagai satu-satunya politisi yang berpikiran kotor.

● Moh Ilham A Hamudy

Call for Papers

JURNAL MATRA PEMBARUAN

Kontribusi naskah dikirimkan dengan mengikuti petunjuk penulisan, sebagai berikut:

- Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat.
- Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespon isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan dalam berbagai perspektif.
- Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.
- Sumber referensi minimal 10 buah dan 50% di antaranya harus berasal dari sumber primer, seperti: jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan/atau disertasi.

Matra Pembaruan (MP) merupakan jurnal baru di bawah naungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, yang fokus pada publikasi hasil penelitian tentang inovasi kebijakan pemerintah. Dijadwalkan MP akan terbit sebanyak tiga kali setahun (Maret, Juli, dan November) mulai 2017. Sebagai jurnal ilmiah, MP memuat naskah hasil penelitian terkait pelbagai inovasi kebijakan. Oleh karenanya, kami mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan para pemerhati inovasi untuk mengirimkan naskah hasil penelitiannya agar dapat dimuat di Matra Pembaruan.

- Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan gaya APA (*American Psychological Association*) style
- Lampirkan biodata ringkas dan nomor telepon seluler penulis
- Keterangan lebih detil silakan lihat <http://matrapembaruan.com>


BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KIRIMKAN ARTIKEL ANDA KE MATRAPEMBARUAN@GMAIL.COM
BATAS AKHIR PENERIMAAN NASKAH OLEH REDAKSI UNTUK EDISI MARET
2017 PALING LAMBAT 14 FEBRUARI 2017.

THEME

HOME AFFAIRS GOVERNANCE

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration
and Rural Governance
Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation
Regional Fiscal Policy and Development
Other Issues in Public Administration

SUBMIT A SCIENTIFIC PAPER
on the theme of Home Affairs Governance
to jurnalbinapraja@yahoo.com

ACCREDITED NO
735/AU2/P2MI-LIPI/04/2016

CALL FOR PAPERS

Researchers, lecturers, and public administration
experts are invited to contribute their scientific papers to

JURNAL BINA PRAJA

TERMS & CONDITIONS

Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38.000-40.000 character without space in Indonesian or English (preferably in English) | For the writing systematics and format, see <http://binaprajajournal.com> | A minimum of 10 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact

PUBLISHED BY

RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS



INDEXED BY:

